



BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENDIKDASMEN

RENCANA STRATEGIS

2025—2029



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

BANGGA,
MAHIR, DAN MAJU
BERSAMA
BAHASA INDONESIA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon (021) 4706287, 4706288

Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5889/I/BS.01.02/2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2025—2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025–2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025–2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
9. Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025--2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2025—2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025–2029, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis, adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja, serta kerangka regulasi dan kelembagaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selama periode tahun 2025–2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis disusun sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan dan sasaran strategis.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan arah kebijakan pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;

- b. menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebahasaan dan kesastraan melalui penerapan prinsip tata kelola yang responsif, adaptif, melayani, akuntabel, dan harmonis; dan
- d. menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kinerja, dan evaluasi capaian kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selama periode tahun 2025–2029.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA,



[Handwritten signature]
HAFIDZ MUKSIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Tahun 2025—2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di seluruh Indonesia.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029. Selain itu, Renstra ini juga disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun sebelumnya (periode 2020—2024) untuk menjaga kesinambungan program sekaligus menyesuaikan dengan perubahan situasi, kondisi, dan kebijakan. Inovasi dan strategi pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan tuntutan organisasi saat ini.

Melalui empat program prioritas yang tertuang dalam Renstra ini, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia, Badan Bahasa berkomitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik melalui jalur pendidikan maupun nonpendidikan. Dalam pelaksanaan program tersebut, dijalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui partisipasi semesta. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan program kebahasaan sebagai sebuah gerakan yang menumbuhkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Sikap positif itulah yang akan menjadi modal kuat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jakarta, Oktober 2025
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,



Hafidz Muksin

DAFTAR ISI

SK KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Kondisi Umum	10
1.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020—2024	10
1.1.2 Aspirasi Masyarakat	15
1.2 Potensi dan Permasalahan	20
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	23
2.1 Visi	23
2.2 Misi	23
2.3 Tujuan	24
2.4 Sasaran Strategis	26
2.5 Sasaran Program	27
2.6 Sasaran Kegiatan	28
2.7 Manajemen Risiko	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	35
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	35
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	36
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	37
3.3.1 Arah Kebijakan	37
3.3.2 Strategi Pelaksanaan Program	45
3.4 Kerangka Regulasi	47
3.5 Kerangka Kelembagaan	49
3.5.1 Struktur Organisasi	49
3.5.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	51
3.5.3 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	55
3.5.4 Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ..	56
3.5.5 Pengelolaan Arsip Tematik Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	57
3.5.6 Reformasi Birokrasi menuju Satuan Kerja ZI-WBK/WBBM	58
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	61
4.1 Target Kinerja	62
4.2. Kerangka Pendanaan	64
BAB V PENUTUP	65
LAMPIRAN	67

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5889/I/BS.01.02/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2025—2029

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2025—2029

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multibahasa dengan satu bahasa nasional (bahasa Indonesia), 718 bahasa daerah, dan puluhan bahasa asing. Keberagaman bahasa tersebut merupakan kekayaan dan modal sosial yang tak ternilai harganya bagi bangsa berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa ini. Pada satu sisi, dalam keberagaman bahasa terkandung potensi bangsa ini untuk bersatu dan menjadi negara maju karena kemampuan bahasa menyimpan konsep dan daya ungkap yang merupakan sumber inovasi dan kreativitas. Namun, pada sisi lain, dalam keberagaman bahasa juga tersimpan potensi keterpecahbelahan karena berbagai perbedaan yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan bahasa yang terpadu demi menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membawa bangsa ini menuju kemajuan peradaban.

Pengelolaan bahasa-bahasa di Indonesia dilaksanakan melalui prinsip Trigatra Bangun Bahasa: *Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing*. Bahasa Indonesia diutamakan agar semakin mantap sebagai pemersatu dan peneguh jati diri bangsa. Bahasa daerah dilestarikan agar semakin kokoh sebagai akar identitas keindonesiaan. Sementara itu, berbagai bahasa asing dikuasai sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di kancah global. Pengelolaan ketiganya secara terangkai dan berkelanjutan diarahkan untuk membentuk SDM unggul dan, pada saat bersamaan, mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia: *berdaulat di dalam negeri, berdaulat di luar negeri*.

Pembentukan SDM unggul merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas dan unggul akan terwujud melalui proses panjang pendidikan bermutu yang dirasakan oleh semuaarganya. Dalam proses panjang tersebut, bahasa menempati posisi dan peran strategis. Bahasa merupakan infrastruktur intelektual pendidikan yang menjadi jalur utama pengiriman semua pengetahuan, pembentuk cara berpikir, penguat karakter, dan pembuka akses

kesetaraan/inklusivitas (melalui keberagaman bahasa, termasuk bahasa isyarat). Pendidikan bermutu untuk semua akan sulit tercapai jika aspek kebahasaan diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan.

Sementara itu, kedaulatan bahasa Indonesia di dalam negeri dan di luar negeri merupakan cita-cita luhur untuk menjaga martabat bangsa. Kedaulatan di dalam negeri ditunjukkan oleh legalitas perundang-undangan dan legitimasi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan strategis berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah Indonesia. Kedaulatan di luar negeri ditunjukkan oleh penerimaan bahasa Indonesia di ranah global sehingga bahasa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam diplomasi internasional tanpa kehilangan jati diri keindonesiaannya.

Upaya meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia dilaksanakan melalui pembangunan nasional bidang kebahasaan dan kesastraan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (disingkat Badan Bahasa) adalah sebuah lembaga kebahasaan yang mengemban amanat konstitusi dan undang-undang untuk menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Secara historis, keberadaan Badan Bahasa, dengan beberapa perubahan penamaannya, bila ditelusuri telah mampu menjalankan tugas fundamentalnya sebagai penunjang keberagaman bahasa dan suku bangsa serta mampu mempersatukan bangsa ini sebagai negara-bangsa melalui pembangunan identitas nasional: Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. Fakta ini dapat dibuktikan melalui maklumat ketiga Sumpah Pemuda 1928: *Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*. Melalui maklumat ini, bahasa Indonesia pun bermanifestasi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah.

Sebagai lembaga yang berpartisipasi aktif dalam mengawal perjalanan bangsa menuju sebuah negara bangsa modern, Badan Bahasa terbukti tidak sekadar menjadi penunjang dan pemersatu keragaman bahasa dan suku bangsa, tetapi juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya, yakni menjalankan fungsi bahasa Indonesia sebagai penggerak utama ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Badan Bahasa memberikan perhatian serius pada keterangkain antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dalam bingkai inilah Badan Bahasa mempertautkan dan menyinergikan bidang kebahasaan dengan wahana utama pengembangan bahasa, yakni bidang kesastraan.

Badan Bahasa, dalam kapasitasnya sebagai lembaga kebahasaan yang terus mendapatkan kepercayaan publik, tidak lagi sekadar penyangga utama kedaulatan negara dan pemertabatan bangsa, tetapi sekaligus penggerak utama pemajuan pendidikan nasional. Dengan kata lain, peran Badan Bahasa tidak lagi sebatas penopang kedaulatan bangsa, tetapi sekaligus motor penggerak kemajuan bangsa. Untuk itu, Badan Bahasa selaku instansi yang diberi mandat oleh undang-undang

untuk mengelola bahasa dan sastra di Indonesia perlu menyusun rencana strategis pembangunan kebahasaan dan kesastraan secara komprehensif.

Rencana strategis tahun 2025—2029 tersebut harus selaras dengan agenda pemerintah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2025—2045, jangka menengah (RPJMN) 2025—2029, Asta Cita presiden terpilih 2025—2029, dan prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029. Sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis tersebut, berikut ini dikemukakan kondisi umum dan potensi serta permasalahan bidang kebahasaan dan kesastraan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020—2024

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbagai permasalahan utama, seperti rendahnya literasi, kepunahan bahasa daerah, dan belum optimalnya peran bahasa Indonesia di dalam negeri dan di luar negeri diatasi melalui upaya berkesinambungan. Pada periode pembangunan kebahasaan dan kesastraan tahun 2020—2024, terdapat tiga program prioritas, yaitu (1) Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan, (2) Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, dan (3) Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Ketiga program tersebut dilaksanakan secara serempak dan kolaboratif oleh 34 satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Tiga program prioritas dilaksanakan melalui pendekatan kelompok kepakaran dan layanan profesional (KKLP) yang terdiri atas (1) Perkamusan dan Peristilahan, (2) Pemodernan dan Pelindungan, (3) Pembinaan dan Bahasa Hukum, (4) UKBI, (5) Literasi, (6) BIPA, dan (7) Penerjemahan. Semua pegawai teknis kebahasaan dan kesastraan bergabung ke dalam kelompok tersebut sesuai dengan kepakaran yang dimiliki.

Sepanjang kurun waktu tersebut, capaian pembangunan kebahasaan dan kesastraan berbasis tiga program prioritas dirangkum sebagai berikut.

Tabel
Capaian Program Prioritas Badan Bahasa Tahun 2020—2024

Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	
 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 38.339.247 eksemplar buku telah terdistribusi ke satuan pendidikan <input type="checkbox"/> 93.513 satuan pendidikan di 3T dan Non 3T <input type="checkbox"/> 319 taman bacaan masyarakat penerima buku bacaan literasi <input type="checkbox"/> 40 perpustakaan daerah penerima buku bacaan literasi tahun 2021 (tahun 2023 tidak ada) <input type="checkbox"/> 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia penerima buku bacaan literasi <input type="checkbox"/> 39.137 orang telah mengikuti pelatihan pemanfaatan buku bacaan (tahun 2022 dan 2023) <input type="checkbox"/> 9.370 produk penerjemahan <input type="checkbox"/> 999.915 pejuji kemahiran berbahasa Indonesia
Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 341 kab/kota di 38 provinsi melaksanakan revitalisasi bahasa daerah <input type="checkbox"/> 114 bahasa daerah/dialek yang sudah direvitalisasi hingga tahun 2024 <input type="checkbox"/> 18.827.026 SD/SMP dan 608 komunitas terlibat dalam RBD hingga tahun 2024 <input type="checkbox"/> 8.958.454 siswa SD dan SMP terlibat dalam pembelajaran bahasa daerah hingga tahun 2024 <input type="checkbox"/> 479.654 pengawas, kepala sekolah, guru, fasilitator, sastrawan, pegiat bahasa/sastra dan komunitas aktif terlibat RBD hingga tahun 2024 <input type="checkbox"/> 1.710.075 partisipan FTBIN hingga tahun 2024
Internasionalisasi Bahasa Indonesia	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 56 negara terfasilitasi program BIPA <input type="checkbox"/> 250 lembaga BIPA terfasilitasi di luar negeri dan 3817 lembaga BIPA terfasilitasi di dalam negeri <input type="checkbox"/> 198.256 orang pemelajar BIPA <input type="checkbox"/> 911 penugasan pengajar BIPA

Dari berbagai capaian program kebahasaan dan kesastraan periode tahun 2020—2024, perlu dicatat pula tiga capaian utama yang mewakili tiap program prioritas. *Pertama*, pencetakan dan pendistribusian buku bacaan bermutu pada program prioritas *Literasi Kebahasaan dan Kesastraan* telah menghasilkan dampak yang terukur. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pengiriman buku bacaan bermutu tahun 2022, misalnya, terdapat peningkatan nilai literasi yang setara dengan dua bulan pembelajaran. Dalam kajian selanjutnya tahun 2024, kelanjutan program distribusi buku bacaan bermutu menjadi salah satu rekomendasi utama. Hal itu menunjukkan bahwa program penyediaan buku bermutu berdampak positif dan perlu untuk dilanjutkan.

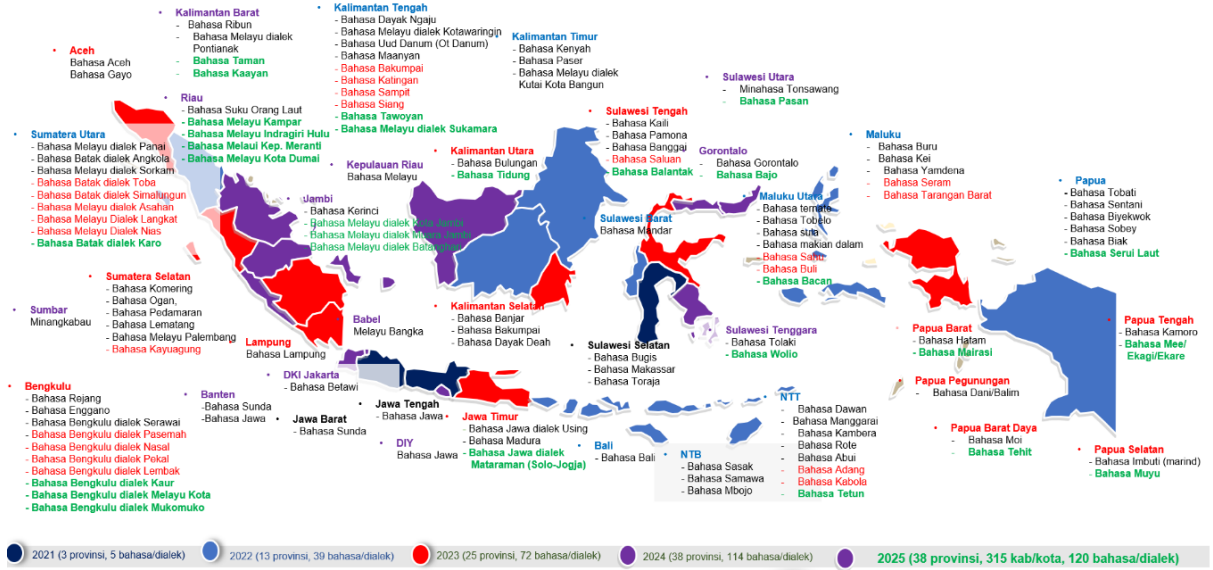
Dampak Inovasi Penyediaan Bahan Bacaan Bermutu

1. Secara nasional sekolah yang mendapatkan buku bacaan bermutu tahun 2022 memiliki kenaikan skor **capaian literasi AN 1,1 lebih tinggi** dibandingkan sekolah kontrol.
 2. Secara nasional bantuan buku bacaan bermutu meningkatkan **capaian literasi siswa SD setara dengan 2 bulan belajar**.
- * Sumber: Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2023



Kedua, revitalisasi bahasa daerah (RBD) pada program prioritas *Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah* disambut baik oleh pemerintah daerah. Dari tahun ke tahun, semakin banyak pemerintah daerah dan penutur bahasa daerah yang berpartisipasi dalam program ini. Semakin besar rasa peduli dari pemerintah daerah dan penutur bahasa daerah untuk melestarikan bahasa dan sastranya, semakin besar peluang bahasa dan sastra daerah untuk lestari sehingga bisa diwariskan pada generasi mendatang. Berdasarkan data capaian RBD, terdapat peningkatan jumlah bahasa yang diintervensi sebagaimana tampak dalam gambar berikut.

Sasaran Revitalisasi Bahasa Daerah/Dialek (2021–2025)



Ketiga, peningkatan peran bahasa Indonesia di kancah global melalui program prioritas *Internasionalisasi Bahasa Indonesia* telah membuahkan hasil positif ketika bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO. Momentum bersejarah tersebut terjadi pada saat Sidang Pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO pada tanggal 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Sidang mengadopsi Resolusi Nomor 42 C/83 tentang *Recognition of Bahasa Indonesia as An Official Language of the General Conference*.

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi dalam Sidang Umum UNESCO

X. Languages of the Conference

Rule 48 Working languages
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish are the working languages of the General Conference.

Rule 49 Language of the country where the General Conference is held
When the Conference is held in a country where the national language is not one of the working languages, the Executive Board may make special arrangements for the use of the national language of the country concerned during the Conference.

Rule 50 Interpretation of other languages
Delegates may speak in languages other than the working languages, but they must themselves provide for interpretation of their speech into one of the working languages, according to their choice; the Secretariat shall provide interpretation into the other working languages.

Rule 51 Use of working languages
All working documents except the Journal of the General Conference shall be issued in the working languages. The verbatim record of plenary meetings shall be published in provisional form in a single edition, in which each intervention shall be reproduced in the working language in which it was made, and in final form in a single edition, in which each intervention shall be reproduced in the working language in which it was made and interventions made in a working language other than English or French shall be followed by a translation into either English or French, alternately meeting by meeting.

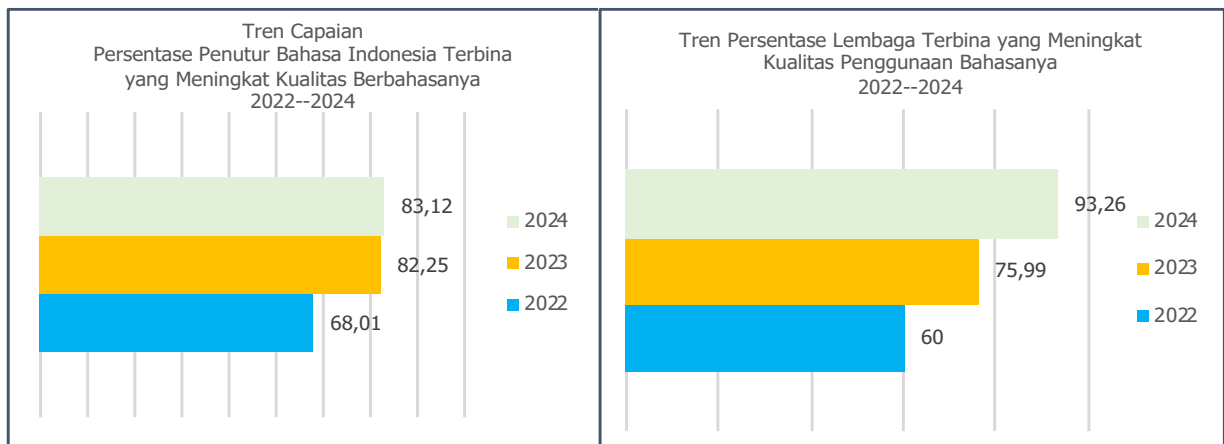
Rule 52 Official languages
1. Arabic, Bahasa Indonesia, Chinese, English, French, Hindi, Italian, Portuguese, Russian and Spanish are the official languages of the General Conference.
2. Any other language may also be recognized as an official language of the General Conference on the request of the Member State or Member States concerned. No Member State may request recognition of more than one language.

Rule 52 Official languages

- 1. Arabic, **Bahasa Indonesia**, Chinese, English, French, Hindi, Italian, Portuguese, Russian and Spanish are the official languages of the General Conference.
- 2. Any other language may also be recognized as the official language of the General Conference on the request of the Member State or Member States concerned. No Member State may request recognition of more than one language.

Selain capaian-capaian di atas, berikut ini diuraikan pula capaian tiga program prioritas dari perspektif sasaran program yang tertuang dalam target dan capaian indikator kinerja program yang disajikan bersamaan untuk mengetahui persentase ketercapaiannya.

Sasaran program pertama ialah *Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan* yang diukur melalui indikator kinerja program berupa (a) Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya dan (b) Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya.



Berbagai aktivitas yang mendukung sasaran program pertama, antara lain,

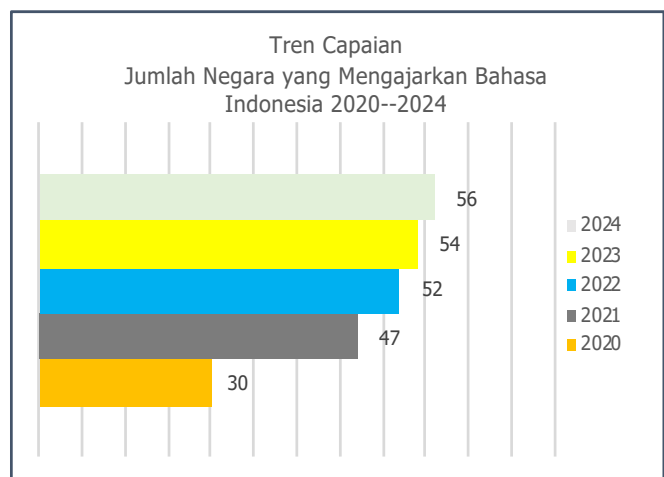
1. Penyediaan bahan penguatan literasi, seperti buku pengayaan, produk kodifikasi bahasa (kamus, tata bahasa, ejaan, ensiklopedia, dan sebagainya), produk alih wahana karya sastra;
2. Pembinaan keterampilan berbahasa guru, siswa, wartawan, ASN, dll.;
3. Pembinaan penggunaan bahasa di lembaga pemerintah, swasta, dan sekolah; dan.
4. Pengujian kemahiran berbahasa Indonesia bagi masyarakat

Sasaran program kedua ialah *Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional* yang diukur melalui indikator kinerja program berupa jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia.

Beberapa aktivitas yang mendukung sasaran program kedua, antara lain,

1. Fasilitasi penyelenggaraan program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
2. Fasilitasi penerjemahan dan penjurubahasaan

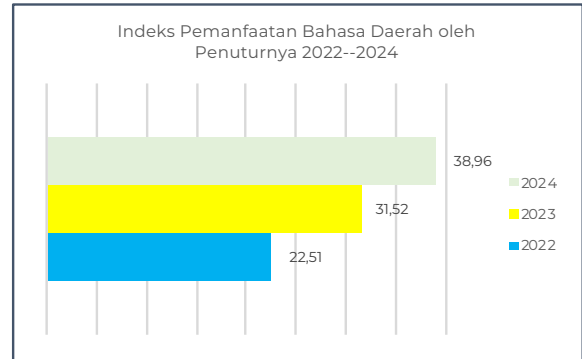
Sasaran program ketiga ialah *Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah* yang diukur melalui indikator kinerja program berupa Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya.



Beberapa aktivitas yang mendukung sasaran program ketiga, antara lain,

1. Pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah (RBD)
2. Pengembangan korpus bahasa daerah untuk perlindungan bahasa.

Sasaran program keempat ialah *Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas* yang diukur melalui indikator kinerja program berupa (a) Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan (b) Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI/WBK.



Aktivitas yang mendukung sasaran program keempat, antara lain,

1. Pelayanan manajemen kinerja internal (perencanaan, evaluasi, keuangan, kearsipan)
2. Pelayanan manajemen SDM internal
3. Pelayanan sarana dan prasarana internal
4. Pelayanan dukungan manajemen internal (BMN, humas, protokoler, dll.)

1.1.2 Aspirasi Masyarakat

a. Rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023

Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin lima tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas Bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di kota Solo pada tahun 1938. Pada mulanya kongres diadakan untuk memperingati hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, selanjutnya ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya. Pada tanggal 25—28 Oktober 2023, Kongres Bahasa Indonesia ke XII (KBI XII) di gelar di Jakarta. Tema yang diangkat adalah “Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa”.

KBI XII merekomendasikan ditetapkannya payung hukum yang lebih tegas dan mengikat untuk menjamin pengelolaan bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah, bahasa dan sastra asing serta literasi di Indonesia sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Program prioritas nasional ini harus termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat dan daerah untuk

memperoleh dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan dana nonpemerintah.

1. Tentang bahasa dan sastra Indonesia, KBI XII merekomendasikan
 - a. ditetapkannya rencana induk dan peta jalan pemajuan dan pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
 - b. ditetapkannya rencana induk dan peta jalan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi dengan misi diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang melibatkan semua pemangku kepentingan diplomasi Indonesia, baik kementerian, lembaga pemerintah/swasta, maupun perseorangan.

2. Tentang bahasa dan sastra daerah, KBI XII merekomendasikan
 - a. ditetapkannya undang-undang bahasa daerah untuk menjamin pewarisan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
 - b. ditetapkannya rencana induk dan peta jalan pewarisan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah secara menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menguatkan kemitraan komunitas dan pegiat perlindungan bahasa dan sastra daerah supaya berkembang lebih sehat dan berdaya guna untuk menghasilkan karya yang bernilai tinggi.

3. Tentang bahasa dan sastra asing, KBI XII merekomendasikan ditetapkannya rencana induk dan peta jalan pemajuan pembelajaran bahasa dan sastra asing melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal secara proporsional untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi, memperluas pergaulan internasional, serta meningkatkan daya saing bangsa.

4. Tentang literasi, KBI XII merekomendasikan
 - a. ditetapkannya rencana induk dan peta jalan terpadu gerakan literasi yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman dan keilmuan literasi melalui melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kecakapan literasi seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. ditetapkannya model pengukuran indeks literasi masyarakat, baik pada jalur formal, nonformal, maupun informal.

b. Rekomendasi Konsolidasi Nasional Tahun 2025

Dalam konteks penyelenggaraan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 (Konsolnas Dikdasmen) dengan tema Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Badan Bahasa dalam Komisi VIII mengemban amanat untuk mengampu topik “Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah”. Topik ini dijabarkan

dalam tiga subfokus kebijakan utama, yaitu (1) Kedaulatan Bahasa Indonesia, (2) Peningkatan Literasi Berbasis Bahasa dan Sastra, dan (3) Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah. Ketiga agenda tersebut merupakan hasil rumusan strategis yang dikembangkan berdasarkan arah kebijakan RPJPN 2025–2045, agenda prioritas Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, serta visi pendidikan nasional yang menekankan pembentukan generasi berpengetahuan, terampil, dan rendah hati.

Agenda pertama, kedaulatan bahasa Indonesia, difokuskan pada penguatan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara melalui pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai standar nasional untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia serta penguatan sistem pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen resmi. Agenda kedua, peningkatan kompetensi berbahasa dan bersastra bagi guru, distribusi bahan bacaan bermutu dalam berbagai format, dan pelibatan komunitas literasi untuk meningkatkan pemahaman membaca yang bermakna. Adapun agenda ketiga, penguatan revitalisasi bahasa daerah, diarahkan pada pembentukan regulasi perlindungan, kurikulum muatan lokal berbasis bahasa daerah, serta pemberdayaan komunitas dan maestro dalam pelestarian bahasa dan sastra daerah sebagai warisan intelektual.

Adapun rekomendasi Komisi VIII sebagai berikut.

1. Kedaulatan Bahasa Indonesia

- a. Penguatan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai Instrumen Standar Nasional
 - UKBI sebagai prasyarat karier ASN dan pendidik: Menjadikan hasil UKBI sebagai salah satu indikator peningkatan jenjang karier guru, kepala sekolah, pengawas, serta pejabat struktural dan fungsional, guna meningkatkan mutu komunikasi profesional dan akademik dalam bahasa Indonesia.
 - Tenaga kerja asing wajib memiliki sertifikat UKBI sebagai bukti kemampuan berbahasa Indonesia yang fungsional sebelum bekerja di wilayah NKRI.
 - Integrasi UKBI dengan sistem kepegawaian dan pendidikan nasional, serta interkoneksi dengan sistem digital keuangan negara (SIMPONI).

- b. Penguatan Sistem Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia
- Pengawasan dilakukan secara sistemik: dimulai dari sosialisasi regulasi, pemantauan lapangan (objek lanskap dan dokumen), pendampingan lembaga, hingga evaluasi dan penghargaan.
 - Pengawasan berbasis data dan klasifikasi objek bahasa dilakukan secara bertahap dan terukur dengan melibatkan satuan pendidikan, lembaga pemerintah/swasta, media, dan masyarakat.
 - Penguatan kerangka regulasi daerah (perda/pergub/perbup/perwali) menjadi strategi desentralisasi pengawasan bahasa sesuai karakter wilayah.

2. Peningkatan Literasi Berbasis Bahasa dan sastra

- a. Peningkatan Kompetensi Literasi Guru melalui Wiyata Kinarya
- Pelatihan wiyata kinarya: model pelatihan kontekstual dan aplikatif berbasis praktik, untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan praktik literasi berkelanjutan di kelas
 - Integrasi literasi dalam Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan: menjadikan kompetensi literasi sebagai indikator utama evaluasi mutu pembelajaran
- b. Penguatan Akses dan Pemanfaatan Buku Bacaan Bermutu
- Pencetakan dan digitalisasi buku bacaan melalui platform Penerjemahan Daring (Penjaring) dan Buku Digital (Budi), untuk memperluas akses bahan literasi di satuan pendidikan dan komunitas
 - Pemutakhiran data penerima buku dan pelibatan Balai Bahasa dalam fasilitasi distribusi, pelatihan pemanfaatan, dan pendampingan penggunaan bahan bacaan
- c. Penjaminan Mutu Literasi dan Pendalaman Aktivitas Membaca
- Penjaminan mutu program literasi melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan
 - Penguatan penghayatan aktivitas membaca: literasi tidak hanya sebatas membaca teks, tetapi juga menumbuhkan pemahaman kritis melalui ulasan/refleksi bacaan
 - Program peningkatan kemampuan membaca dasar untuk siswa di daerah 3T berbasis komunitas literasi binaan Badan Bahasa

3. Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah

- a. Penguatan Regulasi dan Dukungan Anggaran
 - Mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk menyusun dan menetapkan perda/pergub/perbup/perwali tentang perlindungan bahasa dan sastra daerah
 - Pemerintah pusat mendukung regulasi daerah dengan menerbitkan regulasi payung nasional dan dukungan teknis serta anggaran
 - Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menganggarkan secara khusus kegiatan revitalisasi bahasa daerah dalam program tahunan mereka
- b. Pembentukan Infrastruktur Pelindungan Bahasa Daerah
 - Membentuk bidang khusus dalam struktur Dinas Pendidikan yang menangani pelindungan bahasa dan sastra daerah.
 - Menyusun standar kurikulum nasional tentang pembelajaran bahasa daerah sebagai rujukan penyusunan muatan lokal daerah.
- c. Penguatan SDM Bahasa Daerah dan Kolaborasi Pendidikan
 - Membuka jurusan pendidikan bahasa daerah di perguruan tinggi untuk mencetak tenaga pengajar yang profesional.
 - Memasukkan bahasa daerah sebagai mata kuliah pilihan di semua program studi bahasa di perguruan tinggi.
 - Memberdayakan maestro, budayawan, dan guru utama dalam pembelajaran bahasa daerah di satuan pendidikan.
 - Menyediakan formasi ASN untuk lulusan program studi bahasa daerah sebagai guru bahasa daerah.
- d. Model Revitalisasi Kontekstual dan Berbasis Komunitas
 - Menyesuaikan model revitalisasi berdasarkan kantong bahasa daerah masing-masing, memperhatikan sebaran geografis, sosiologis, dan kultural.
 - Meningkatkan kolaborasi antara dinas pendidikan, komunitas literasi, dan komunitas budaya lokal dalam membangun aktivitas pelestarian berkelanjutan.
- e. Perluasan Gerakan Revitalisasi
 - Mengadakan kegiatan serupa FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) untuk jenjang SMA/SMK sederajat agar pelestarian bahasa berlanjut di usia remaja

c. Rekomendasi Konsolidasi Daerah

Konsolidasi daerah merupakan tindak lanjut Konsolidasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilakukan oleh Badan Bahasa sebagai upaya penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi di tingkat daerah untuk mendukung pembangunan kebahasaan dan kesastraan secara terpadu. Pemerintah daerah bersama masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas, dan media bersama-sama mengelola, melestarikan, serta mengembangkan bahasa dan sastra agar memiliki daya hidup dan fungsi nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, konsolidasi daerah merupakan langkah strategis agar pembangunan bahasa dan sastra tidak hanya menjadi program pusat, tetapi juga tumbuh kuat di daerah dengan dukungan ekosistem lokal.

Beberapa daerah yang telah melaksanakan konsolidasi daerah pada tahun 2025 ialah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, Papua, Banten, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penyelenggaraan beberapa konsolidasi daerah tersebut, terdapat beberapa rekomendasi umum berikut ini.

1. Pemerintah daerah menyusun SK pelaksana pengawasan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.
2. Pemerintah daerah membuat SE implementasi Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.
3. Pemerintah daerah membuat program kerja dan menyusun anggaran implementasi Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan kebahasaan dan kesastraan pada periode 2020—2024 telah dilaksanakan dengan baik sehingga menorehkan catatan positif. Berbagai capaian menunjukkan keberhasilan di semua program prioritas. Namun, luasnya cakupan pembangunan kebahasaan memerlukan penanganan serius secara masif dan berdampak nyata. Oleh sebab itu, perlu dianalisis berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ke depan. Berikut ini identifikasi dan analisis berbagai faktor tersebut.

A. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a. Mandat kelembagaan yang kuat dalam bidang kebahasaan dan kesastraan
- b. Jaringan Balai dan Kantor Bahasa di daerah yang menjangkau seluruh provinsi
- c. Sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kebahasaan dan kesastraan

- d. Sumber daya kebahasaan dan kesastraan yang beragam
- e. Sumber daya sosial kebahasaan dan kesastraan (duta bahasa, komunitas, asosiasi profesi)
- f. Portofolio produk kebahasaan dan kesastraan yang beragam
- g. Bahasa Indonesia yang diajarkan di 56 negara
- h. Transformasi digital yang sudah dilakukan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan

2) Kelemahan

- a. Rendahnya indeks pemangku kepentingan bidang pendidikan
- b. Pemanfaatan produk dan layanan kebahasaan dan kesastraan yang belum optimal
- c. Masih terdapat 8 provinsi yang belum memiliki Balai dan Kantor Bahasa, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan sehingga pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bahasa di ketiga provinsi tersebut belum optimal
- d. Keterbatasan teknis sumber daya manusia di bidang teknologi informasi
- e. Tidak adanya dasbor pemantauan dan evaluasi secara waktu nyata dan terintegrasi
- f. Rendahnya penguasaan bahasa asing pegawai

B. Faktor Eskternal

1) Peluang

- a. Dukungan RPJMN 2025—2029 terhadap pembangunan kebahasaan dan kebahasaan
- a. Meningkatnya minat masyarakat internasional pada bahasa Indonesia
- b. Tumbuhnya komunitas penutur dan penggiat bahasa di tingkat lokal dan global
- c. Kesadaran publik akan kelestarian bahasa daerah
- d. Banyaknya komunitas bahasa dan sastra di Indonesia
- e. Bahasa Indonesia mulai diakui dalam forum multilateral
- f. Sastra Indonesia mulai dikenal di dunia internasional

2) Ancaman

- a. Ancaman kepunahan bahasa daerah
- b. Dominasi bahasa asing di media dan pendidikan
- c. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan bahasa dan sastra
- d. Merosotnya nalar kritis pada anak karena pengaruh negatif teknologi
- e. Berdasarkan hasil AN 2024, kompetensi literasi siswa di Indonesia belum merata

- f. Adanya ancaman peretas yang akan meretas laman, aplikasi, maupun platform digital milik Badan Bahasa
- g. Disinformasi dan penyalahgunaan bahasa
- h. Produk pengayaan pendukung literasi yang berasal dari pendanaan APBN diperjualbelikan di masyarakat
- i. Menurunnya sikap positif penutur terhadap penggunaan bahasa Indonesia

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

2.1.1 Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai Visi

Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Visi ini menggambarkan bahwa Indonesia bercita-cita memiliki sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga negara dengan dukungan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat demi mencapai kemajuan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera pada tahun 2045.

Sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal itu diwujudkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan melalui peningkatan kecakapan literasi membaca, pelestarian bahasa dan sastra daerah, pemertabatan bahasa dan sastra daerah serta penginternasionalan bahasa Indonesia.

2.1.1 Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Mengacu pada Visi Kementerian tersebut, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional bidang kebahasaan akan mengedepankan gotong-royong guna mencapai kedaulatan bahasa bangsa, mahir, dan maju pendidikan untuk semua, Badan Bahasa menetapkan visi sesuai dengan visi Kementerian dan Presiden sebagai berikut.

Terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra

2.2 Misi

2.2.1 Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai misi

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran
2. Mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara langsung mendukung ketiga misi Kemendikdasmen tersebut. Ketiganya ditindaklanjuti menjadi misi khusus bidang kebahasaan dan kesastraan.

2.2.2 Misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sesuai tugas dan kewenangannya, Badan Bahasa mengejawantahkan tiga misi Kementerian tersebut ke dalam lima misi organisasi sebagai berikut.

1. Meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan;
2. Mewujudkan kemartabatan bahasa Indonesia;
3. Mewujudkan kelestarian bahasa dan sastra daerah;
4. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional;
5. Mewujudkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis (RAMAH)

2.3 Tujuan

2.3.1 Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Perumusan tujuan Kementerian diarahkan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun tujuan dan indikator tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

Tabel
Tujuan dan Indikator Tujuan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Tujuan Kemendikdasmen	Indikator Tujuan Kemendikdasmen
1	Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/ Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 2. Angka Partisipasi Sekolah 7—18 Tahun
2	Penguatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD 2. Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi Membaca b. Numerasi 3. Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebinekaan pada Kategori Baik

No.	Tujuan Kemendikdasmen	Indikator Tujuan Kemendikdasmen
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaannya dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Kebahasaan 2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indoneisa
4	Meningkatnya Mutu Layanan dan Relevansi Pendidikan Vokasi	1. Persentase Angkatan Kerja Lulusan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Waktu Kurang dari 1 Tahun
5	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

2.3.2 Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sesuai dengan tujuan dan indikator tujuan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Bahasa memiliki tujuan dan indikator tujuan sebagai berikut.

Tabel

**Tujuan dan Indikator Tujuan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

No.	Tujuan Badan Bahasa	Indikator Tujuan Badan Bahasa	Target Keberhasilan 2029
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional; Literasi Membaca	76,62
2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan	1. Indeks Pembangunan Kebahasaan	55,01
		2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indoneisa	55,87

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sasaran strategis merupakan tujuan jangka menengah spesifik yang ditetapkan untuk mencapai kondisi masa depan yang diinginkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029 sebagai berikut.

Tabel
Sasaran Strategis
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS 1	Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah yang Berkeadilan untuk Semua
SS 2	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaannya dalam Dunia Pendidikan dan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS 4	Meningkatnya Mutu Layanan dan Relevansi Pendidikan Vokasi	Meningkatnya Mutu dan Daya Saing Pendidikan Vokasi
SS 5	Menguatnya Sistem Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Dengan mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan mengampu tiga sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian, yaitu

Tabel
Sasaran Strategis
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan						
IKSS 2.2	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. a. Literasi Membaca	Persentase	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan						
IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01
IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	Indeks	52,73	53,5	54,28	55,07	55,87
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabilitas						
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	90	90,10	90,20	90,30

2.5 Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan empat sasaran program tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan						
IKP 2.2.19	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
SP 3	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia						
IKP 3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
IKP 3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Persentase	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6
IKP 3.1.3	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Persentase	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
IKP 3.1.4	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29
IKP 3.2.1	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	Persentase	55	55,5	56	56,5	57
IKP 3.2.2	Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian						
IKP 5.1.27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Katagori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.28	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A	AA

2.6 Sasaran Kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam upaya mencapai sasaran program, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuh sasaran kegiatan tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 2.2.20.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
IKK 2.2.20.2	Persentase Produk Penerjemahan Yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	24	30	36	42	48
IKK 2.2.20.3	Persentase Produk Pengembangan Yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	12,96	26,30	40,37	54,81	70
7567	Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 3.1.1.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Persentase	41	43	45	47	49
IKK 3.1.1.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72
SK	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1.2.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,930	63,136	66,342	69,548	72,754

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 3.1.2.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
IKK 3.1.3.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah						
SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 3.1.4.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
IKK 3.1.4.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK	Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA						
IKK 3.2.1.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi a. Luar Negeri	Persentase	25	25,5	26	26,5	27
IKK 3.2.1.2	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi a. Dalam Negeri	Persentase	55	55,5	56	56,5	57
SK	Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional						
IKK 3.2.2.1	Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional	Persentase	22	32	42	52	62
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
IKK 5.1.27.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Persentase	95	96	97	98	99

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.1.28.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	Persentase	100	100	100	100	100

2.7 Manajemen Risiko Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Manajemen risiko pembangunan kebahasaan dan kesastraan adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Sebagai salah satu bentuk pembangunan nasional, manajemen risiko pembangunan kebahasaan dan kesastraan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas penanggung jawab dan pengelola kebijakan sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, manajemen risiko program pengembangan dan pembinaan bahasa ditetapkan mencakupi sasaran program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, indikasi risiko, penanganan risiko atau rencana mitigasi, pemilik risiko, dan pengelola risiko.

**Tabel Manajemen Risiko
Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa**

No	Sasaran Program Badan Bahasa	Indikasi Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	
				Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
1	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Daya baca-tulis peserta didik pada wilayah tertentu, khususnya wilayah 3T, masih cukup rendah. Kondisi ini terlihat dari hasil asesmen nasional (AN). Selain itu, semakin dominannya penggunaan teknologi digital pada gilirannya menuntut pendekatan baru yang secara teknologis memiliki daya tarik tinggi bagi peserta didik untuk meningkatkan daya baca-tulisnya.	Melakukan berbagai pendekatan yang inklusif, termasuk menginisiasi pendekatan pemangku kepentingan sebagai mitra kerja dan pemanfaatan platform digital yang sudah melekat dengan kehidupan peserta didik (transformasi digital).	Kepala Badan	Kapusbin

No	Sasaran Program Badan Bahasa	Indikasi Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	
				Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
		Produk penerjemahan bahan bacaan berbasis STEM masih terbatas pada jenjang usia dini dan masih belum menyentuh peserta didik tingkat dasar dan menengah. Di samping itu, kebutuhan terhadap bahan bacaan sastra asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, khususnya bagi peserta didik tingkat dasar dan menengah menuntut sumber-sumber penerjemahan yang lebih beragam.	Memperluas sasaran produk penerjemahan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anak usia dini, tetapi juga peserta didik tingkat dasar dan menengah. Diversifikasi produk penerjemahan yang tidak sebatas berfokus STEM, tetapi juga mencakupi karya sastra asing bagi peserta didik tingkat dasar dan menengah.	Kepala Badan	Kapusdaya
		Produk pengembangan berupa bahan bacaan pengayaan masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik karena distribusi yang masih terbatas.	Peningkatan jumlah bahan pengayaan alih wahana, peningkatan angka distribusi, dan digitalisasi produk sehingga lebih terjangkau oleh peserta didik di seluruh wilayah NKRI.	Kepala Badan	Kapusbanglin
2	Meningkatnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Sebaran profesi yang belum merata dalam pemanfaatan UKBI yang sebagian besar pejuji merupakan kelompok pelajar.	Melakukan pendekatan kelembagaan lintas profesi untuk pemanfaatan UKBI sebagai salah satu standardisasi kompetensi dari lembaga-lembaga profesi	Kepala Badan	Kapusbin

No	Sasaran Program Badan Bahasa	Indikasi Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	
				Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
		Semakin dominannya penggunaan bahasa asing di media massa, platform digital, dan pendidikan berdampak pada menurunnya sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia.	Inisiasi gerakan pengutamaan bahasa negara secara masif, sistematis, dan berkelanjutan, baik pada ruang publik secara konvensional maupun berbasis digital dengan mekanisme pelibatan pemangku kepentingan secara lebih beragam dan luas, seperti komunitas bahasa dan sastra, satuan pendidikan, lembaga pemerintahan terkait, dan lainnya.	Kepala Badan	Kapusbin
		Pemanfaatan produk dan layanan kebahasaan dan kesastraan yang belum optimal	Membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pemanfaatan produk dan layanan kebahasaan dan kesastraan.	Kepala Badan	Kapusbanglin dan Kapusbin

No	Sasaran Program Badan Bahasa	Indikasi Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	
				Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
		<p>Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan bahasa dan sastra. Ini dapat dilihat dari minimnya dukungan pemerintah daerah atas penerbitan regulasi terkait pelestarian bahasa daerah dan pengambilan kebijakan yang relevan. Permendagri dan Permendikdasmen masih belum tersosialisasikan secara masif pada tingkat pemerintah daerah. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai kelestarian bahasa daerah masih cukup rendah. Hal ini dapat berdampak pada terjadinya kepunahan bahasa daerah pada bahasa-bahasa daerah tertentu.</p>	<p>Penguatan regulasi mengenai pelestarian bahasa daerah pada tingkat pemerintah daerah. Melakukan konsolidasi dan kampanye yang masif, sistematis, dan berkelanjutan untuk penumbuhan kesadaran atas pelestarian bahasa daerah baik melalui satuan-satuan pendidikan maupun lembaga-lembaga pemerintahan daerah terkait.</p>	Kepala Badan	Kapusbanglin dan Sekretaris Badan
		<p>Terbatasnya fasilitasi pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing terhadap Standar Kompetensi Lulusan. Upaya internasionalisasi masih berfokus pada aspek pembelajaran bahasa Indonesia dan menyampingkan upaya internasionalisasi sastra Indonesia sebagai salah satu upaya diplomasi kebahasaan dan kesastraan.</p>	<p>Melakukan digitalisasi fasilitasi Standar Kompetensi Lulusan terhadap pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga penerbitan luar negeri untuk promosi dan publikasi karya sastra Indonesia ke luar negeri melalui pendekatan kemitraan.</p>	Kepala Badan	Kapusdaya

No	Sasaran Program Badan Bahasa	Indikasi Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	
				Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
		Fakta pengakuan UNESCO atas bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resminya belum mengindikasikan fakta bahwa daya saing bahasa dan sastra Indonesia di kancah global masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih cukup rendahnya pemanfaatan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Sebaran pengiriman pengajar BIPA di luar negeri tidak menunjukkan dampak penguatan diplomasi bahasa dan sastra Indonesia.	Pendekatan kemitraan dan diplomasi yang lebih intensif baik dengan lembaga pemerintahan lain yang relevan di dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional di luar negeri. Selain itu, pengiriman pengajar BIPA akan difokuskan, dan dibatasi, pada negara-negara tujuan yang relevan dengan peningkatan daya saing bahasa dan sastra Indonesia di kancah global.	Kepala Badan	Kapusdaya
3	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Belum seluruh pegawai mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 jam pelajaran	Program peningkatan kompetensi seluruh pegawai diselenggarakan secara berkelanjutan	Sesban	Kabag Umum dan Keuangan
		Belum seluruh hasil evaluasi pelaksanaan program dan anggaran digunakan sebagai acuan penyusunan kebijakan, program, dan anggaran	Hasil evaluasi pelaksanaan program dan anggaran digunakan sebagai acuan penyusunan kebijakan, program, dan anggaran	Kepala Badan	Sesban
		Pemenuhan BMN belum berbasis analisis yang berdasarkan pada kebutuhan lembaga	Perlu melakukan analisis rencana kebutuhan BMN yang berdasarkan pada kebutuhan lembaga	Kepala Badan	Sesban
		Pengelolaan arsip masih dilakukan secara konvensional	Pengelolaan arsip dilakukan secara tematik	Kepala Badan	Sesban
		Pengelolaan SPBE (pemerintahan digital) belum terintegrasi dengan baik	Pengelolaan SPBE (pemerintahan digital) harus terintegrasi dengan baik	Kepala Badan	Sesban

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Prioritas Nasional 8:Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatkan kualitas pembelajaran, dan sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industriialah sebagai berikut.

- 1) Perluasan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua yang Berkeadilan
- 2) Penguatan Layanan PAUD dan 1 (Satu) Tahun Prasekolah
- 3) Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan
- 4) Penguatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi
- 6) Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Bahasa Daerah dan Penginternasionalan Bahasa Indonesia
- 7) Penguatan Pembiayaan dan Tata Kelola Pendidikan
- 8) Penguatan Tatakelola serta Akuntabilitas Kementerian

Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen dalam menopang agenda pembangunan sebagai berikut.

- 1) Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan
 - a. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
 - b. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
 - c. Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang

relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.

- 2) Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
 - a. Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
 - b. Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
 - c. Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
 - d. Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
 - e. Penginternasionalan Bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.
- 3) Penguatan Tata Kelola serta Akuntabilitas Kementerian
 - a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
 - b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
 - c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikdsamen, berikut ini arah kebijakan dan strategi Badan Bahasa tahun 2025—2029.

3.3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan bidang kebahasaan dan kesastraan ditujukan pada empat fokus utama, yaitu (1) Peningkatan Kecakapan Literasi, (2) Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia, (3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah, dan (4) Penginternasionalan Bahasa Indonesia. Empat fokus tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.



1) Peningkatan Kecakapan Literasi

Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup manusia. Kecakapan literasi berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa. Untuk meningkatkan kecakapan literasi, Badan Bahasa berupaya menumbuhkembangkan pembiasaan baca-tulis, meningkatkan kemampuan bernalar kritis, dan meningkatkan daya kreasi dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga ranah: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khusus di ranah sekolah, Badan Bahasa bermitra dengan seluruh pihak yang berada dalam ekosistem persekolahan (kepala sekolah, guru, dan komite sekolah).

Dalam implementasinya, peningkatan kecakapan literasi di ranah sekolah merupakan kontribusi langsung Badan Bahasa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di seluruh pelosok negeri. Capaian utama yang diharapkan ialah meningkatnya hasil belajar para peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan berbagai upaya kolaboratif untuk meningkatkan dua aspek utama peningkatan literasi, yaitu

- Akses, melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi
- Kompetensi, melalui pembinaan kecakapan literasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Peningkatan akses dilaksanakan melalui penyediaan bahan pengayaan pendukung literasi. Dalam hal ini, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Produk-produk tersebut berupa, antara lain, buku bacaan

bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braile), komik, karya sastra yang dialihwahkan, produk penerjemahan antarbahasa, dan kamus pelajar. Secara berkala buku bermutu dicetak dan disebarluaskan kepada sekolah-sekolah yang memiliki nilai literasi rendah dalam asesmen nasional. Selain dalam bentuk cetak, produk-produk tersebut dapat diakses melalui beberapa portal yang dimiliki Badan Bahasa, misalnya budi.kemendikdasmen.go.id dan penjaring.kemendikdasmen.go.id. Semua produk dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan minat dan kemampuan baca tulis anak Indonesia.

Salah satu prioritas penting dalam rencana strategis 2025—2029 ialah dukungan Badan Bahasa terhadap pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menjadi pendekatan Kemendikdasmen agar pengembangan peserta didik dilaksanakan melalui tiga prinsip utama, yaitu berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menyenangkan (*joyful*). Badan Bahasa dapat menyediakan beragam media pembelajaran literasi yang dapat mendorong eksplorasi peserta didik melalui peningkatan kemampuan berbahasa dan bersastra. Media pembelajaran yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dapat dimodifikasi menjadi buku besar (*big book*) yang dapat dibaca bersama di kelas, buku permainan kata, buku yang diselingi dengan audio atau musik, dan sebagainya. Media tersebut dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sehingga tercipta pengalaman belajar yang reflektif, kontekstual, dan menggembirakan.

Sementara itu, peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pembinaan kecakapan literasi dengan sasaran jenjang SD, SMP, dan SMA. Sasaran pembinaan diarahkan pada dua unsur, yaitu SDM pendidikan dan satuan pendidikan. SDM pendidikan (pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan) merupakan sasaran prioritas pembinaan yang diharapkan secara akumulatif mampu meningkatkan kecakapan literasi para peserta didik. Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia sebagai pintu masuk penguatan literasi. Selain terhadap SDM pendidikan, pembinaan juga dilaksanakan dengan objek satuan pendidikan. Pembinaan untuk satuan pendidikan ini diarahkan pada dua aspek, yaitu penggunaan bahasa di ruang publik dan penggunaan bahasa pada dokumen di lingkungan sekolah. Bahasa di ruang publik dan di dokumen sekolah merupakan media ajar otentik yang dilihat oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa yang tepat menjadi contoh baik yang dapat langsung diajarkan kepada peserta didik.

Guna mendukung pembelajaran mendalam, pembinaan terhadap SDM pendidikan juga dapat dimodifikasi, antara lain, dalam bentuk lomba-lomba untuk mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan sosial. Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dan sejenisnya dapat menumbuhkan keberanian berekspresi, kecakapan menggunakan bahasa, dan berpikir kritis/logis. Lomba-lomba tersebut juga memberikan pengalaman belajar yang

menyenangkan bagi para peserta didik sehingga diharapkan meninggalkan jejak positif dalam pengembangan diri mereka.

Peningkatan Kecakapan Literasi

Akses

Penyediaan

- Buku bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braile, komik)
- Karya sastra yang dialihwahkanakan
- Kamus dan produk kodifikasi bagi pelajar
- Produk penerjemahan lintas bahasa

Modifikasi/inovasi:

- Buku besar (*big book*), buku teka teki, buku musik

Kompetensi

Pembinaan

SDM Pendidikan

- Pendidik
- Peserta didik
- Tenaga kependidikan

Satuan Pendidikan

- Ruang publik
- Dokumen (laporan, persuratan, naskah dinas)

(jenjang SD, SMP, dan SMA)

Modifikasi/inovasi:

- Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dsb.

Pembelajaran Mendalam (Berkesadaran, Bermakna, Menyenangkan)

2) Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga keduanya diakui, dihargai, dan digunakan secara luas dengan penuh rasa bangga.

Pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat nasional dilaksanakan melalui penguatan berbagai program kebahasaan dengan sasaran utama masyarakat umum di luar jalur pendidikan. Pemertabatan tersebut bertujuan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang tecermin dari tiga aspek, yaitu kognitif (ide/pemikiran), afektif (mental/rasa), dan konatif (perbuatan). Pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia merupakan upaya kolektif yang terdiri atas penyediaan produk pengembangan bahasa, pembinaan SDM, pengujian kemahiran berbahasa, hingga pembinaan lembaga dan komunitas.

Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia



Terdapat dua tonggak penting dalam pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu

- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7466/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah.



Peraturan Mendikdasmen dan SE Mendagri melengkapi dan memperkuat upaya pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, terutama di daerah. Dengan hadirnya dua ketentuan tersebut, pemerintah daerah di seluruh provinsi memiliki acuan yang kuat untuk melaksanakan program kebahasaan dan kesastraan di daerah masing-masing. Dalam praktiknya, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Balai/Kantor Bahasa untuk bersama-sama memartabatkan bahasa dan sastra Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Permendikdasmen dan SE Mendagri tersebut, Balai/Kantor Bahasa di daerah melaksanakan

konsolidasi daerah yang melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari konsolidasi tersebut dihasilkan SK tentang tim pengawas penggunaan bahasa Indonesia yang melibatkan berbagai perangkat di daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, dan Balai/Kantor Bahasa. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memartabatkan bahasa Indonesia di daerah akan menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana strategis ini.

Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Tujuan Pengawasan
Mengoptimalkan Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meningkatkan kualitas dan martabat bahasa Indonesia, serta memperkuat jati diri bangsa.

Sasaran Pengawasan
Instansi pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan ruang publik lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia.

Aspek yang Diawasi
Penggunaan ejaan, tata bahasa, pilihan kata, dan penyusunan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Tindak Lanjut Pengawasan
Pemberian teguran, saran perbaikan, serta pembinaan terhadap penggunaan bahasa yang belum sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Manfaat Pengawasan
Meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat identitas nasional, dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Bentuk Pengawasan

1. Sosialisasi
Peningkatan sikap positif (kebanggaan berbahasa, kesetiaan berbahasa, dan kesadaran terhadap kaidah bahasa Indonesia) untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia.

2. Pemantauan
Pengumpulan dan analisis data untuk memastikan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah.

3. Pendampingan
Memberikan bantuan teknis dan konsultasi untuk perbaikan penggunaan bahasa Indonesia.

4. Evaluasi
Mengukur efektivitas pengawasan, membuat laporan untuk tindak lanjut, dan memberi penghargaan.

4 Buku Saku Fermentidiasmen Nomor 2 Tahun 2025

3) Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

Pelestarian bahasa dan sastra daerah adalah upaya mempertahankan, menjaga, dan meningkatkan daya hidup bahasa dan sastra daerah agar tetap digunakan, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya sehingga tidak punah atau kehilangan fungsi sosialnya. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa atau sastra punah, dunia kehilangan sejumlah besar pengetahuan berharga, termasuk kearifan lokal, yang terhimpun dari generasi ke generasi.

Saat ini ihwal bahasa daerah bukan semata urusan lokal dan berorientasi masa lalu. Kepundahan bahasa daerah sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional. UNESCO telah menetapkan tahun 2022 sampai 2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah sebagai seruan kepada seluruh negara di dunia untuk berpartisipasi melindungi bahasa daerah di wilayah masing-masing. Isu bahasa daerah sedemikian penting karena

berkaitan dengan hak asasi berbahasa (*linguistic rights*) yang melekat pada setiap individu.

PELESTARIAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Program Strategis Pelindungan 2025–2029

- 1 PEMETAAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA**
Pendataan dan pemutakhiran informasi sebaran bahasa, karya sastra, dan aksara nusantara di Indonesia
- 2 PENGUATAN REVITALISASI BAHASA DAERAH (RBD)**
Penerapan modei, media kreatif, dan pelibatan masyarakat penutur dan pemerintah daerah dalam upaya keberlanjutan bahasa daerah
- 3 ANALISIS DAYA HIDUP DAN KONSERVASI BAHASA DAN SASTRA DAERAH**
Analisis—Sintesis vitalitas bahasa, pelestarian karya sastra, dan penguatan nilai budaya lokal
- 4 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN**
Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk dokumentasi, registrasi, dan publikasi kebahasaan
- 5 PENGOPTIMALAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK**
Pelibatan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, komunitas, tokoh masyarakat, dan dunia usaha dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah

Berkaitan dengan itu, Badan Bahasa melakukan berbagai aktivitas untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah, mulai dari pemetaan bahasa, sastra, dan aksara, revitalisasi, konservasi, dan lain-lain. Pendekatan dengan melibatkan banyak pihak atau partisipasi semesta menjadi prioritas agar upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah lebih optimal, efektif, dan efisien.

4) **Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia**

Penginternasionalan bahasa Indonesia merupakan usaha yang bertahap, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berjati diri teguh dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dilakukan upaya diplomasi kebahasaan sebagai bentuk diplomasi lunak yang bertujuan untuk menguatkan literasi keindonesiaan dalam konteks global, dalam hal ini, meningkatkan pemahaman dan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan pengaruh Indonesia, bangsa Indonesia, dan nilai-nilai keindonesiaan dalam peradaban dunia.

Pelaksanaan diplomasi kebahasaan untuk menguatkan literasi keindonesiaan dalam konteks global ditempuh melalui penyebaran bahasa Indonesia serta penguasaan dan pemanfaatan bahasa asing untuk tujuan strategis. Penyebaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui berbagai intervensi, antara lain, (1) pengembangan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, (2) pengembangan dan pemberdayaan lembaga dan komunitas diplomasi kebahasaan di luar negeri, (3) pengembangan kerja sama internasional kebahasaan dan kesastraan, serta (4) fasilitasi penggunaan bahasa Indonesia dalam forum dan lembaga internasional. Sementara itu, penguasaan dan pemanfaatan bahasa asing untuk tujuan strategis dilaksanakan melalui berbagai aksi, antara lain, (1) fasilitasi penguasaan bahasa asing untuk mendukung diplomasi kebahasaan, (2) fasilitasi penguasaan bahasa asing bagi warga negara Indonesia untuk tujuan strategis, (3) penerjemahan karya sastra, dokumen, dan buku bernilai strategis, serta (4) penjurubahasaan dalam forum internasional strategis.

Sejalan dengan penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia, pelaksanaan diplomasi kebahasaan melalui penyebaran bahasa Indonesia berorientasi pada peningkatan fungsi (daya guna dan daya pajan) bahasa Indonesia dalam konteks global, yakni dalam berbagai ranah penggunaan atau komunikasi global dan di berbagai kawasan internasional dengan menggunakan pendekatan multidimensi. Pendekatan multidimensi dalam aksi penginternasionalan bahasa Indonesia tersebut meliputi (1) pendekatan pendidikan melalui dimensi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, riset, dan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) pendekatan politik melalui dimensi politik dalam negeri dan luar negeri; (3) pendekatan ekonomi melalui dimensi investasi, perdagangan, perindustrian, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan; (4) pendekatan sosial dan budaya melalui dimensi kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan, dan media; (5) pendekatan pertahanan dan keamanan melalui dimensi pertahanan dan dimensi keamanan; serta (6) pendekatan keagamaan melalui dimensi pendidikan keagamaan dan dimensi peribadatan.

Sesuai dengan lini masa dalam Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia, pada periode tahun 2025—2029, kegiatan penginternasionalan bahasa Indonesia berada pada tahap fondasi. Pada tahap tersebut, intervensi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa difokuskan pada penguatan regulasi operasional dan tata kelola kelembagaan serta koordinasi dan fasilitasi berkelanjutan guna menunjang penguatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penerjemahan dan penjurubahasaan, peningkatan kemahiran berbahasa asing untuk mendukung diplomasi kebahasaan, serta pemberdayaan lembaga dan komunitas diplomasi kebahasaan.



3.3.2 Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan dua program teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu (a) *Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran* dan (b) *Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan*, Badan Bahasa menerapkan strategi pelaksanaan program melalui pemberdayaan dua jalur penugasan, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Secara struktural, program dilaksanakan melalui penjabaran sasaran dan target dari Kepala Badan kepada kepala pusat hingga kepala bidang. Secara fungsional, program dilaksanakan melalui pemfokusan kepakaran dan layanan kebahasaan. Pemberdayaan dua jalur tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi. Program melalui jalur struktural dan fungsional dilaksanakan di seluruh provinsi di bawah kendali para kepala unit pelaksana teknis di daerah.

Strategi pelaksanaan program melalui jalur struktural dilaksanakan dengan mengoptimalkan struktur kelembagaan yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan dibantu Kepala

Pusat melaksanakan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kepala Pusat dibantu Kepala Bidang menjalankan tiga tugas khusus bidang kebahasaan, yaitu

- a. Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra;
- b. Bidang Peningkatan dan Penguatan Literasi; dan
- c. Bidang Kemitraan dan Diplomsia Bahasa.

Kepala Pusat	Kepala Bidang	UPT
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra	Kepala Balai/ Kantor Bahasa
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Peningkatan dan Penguatan Literasi	
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Kemitraan dan Diplomasi Bahasa	

Strategi pelaksanaan program melalui jalur fungsional dilaksanakan dengan memfokuskan kepakaran pegawai yang dimiliki oleh Badan Bahasa. Berdasarkan kepakaran tersebut, para pegawai dikelompokkan ke dalam lima tim kerja di tingkat pusat dan tiga tim kerja di tingkat UPT yaitu

- a. Tim Kerja di tingkat pusat terdiri atas
 - 1) Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan;
 - 2) Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
 - 3) Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
 - 4) Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum;
 - 5) Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing; dan
 - 6) Tim Kerja Penerjemahan.
- b. Tim Kerja di tingkat UPT terdiri atas
 - 1) Tim Kerja Pengembangan;
 - 2) Tim Kerja Pelindungan; dan
 - 3) Tim Kerja Pembinaan

Koordinasi pelaksanaan program antara Tim Kerja Pusat dan UPT digambarkan sebagai berikut.

Penanggung Jawab	Tim Kerja Pusat	Tim Kerja UPT
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan	Tim Kerja Pengembangan
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pelindungan

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Tim Kerja Pembinaan
	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum	
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Penerjemahan	

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis bidang kebahasaan dan kesastraan, diperlukan beberapa regulasi yang menjadi penguat pelaksanaan program sebagai berikut.

Tabel 8
Kerangka Regulasi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan. 2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir. 3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring. 	Pusbin	Tahun 2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
2.	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa. 2. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. 3. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional. 	Sekretariat	Tahun 2026
3.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023 2. Belum adanya regulasi yang memuat ketentuan terpadu untuk menunaikan amanat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44. 3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mengatur peran dari tiap K/L dalam menunaikan amanat UU 24/2009 tersebut. 	Pusdaya	Tahun 2026

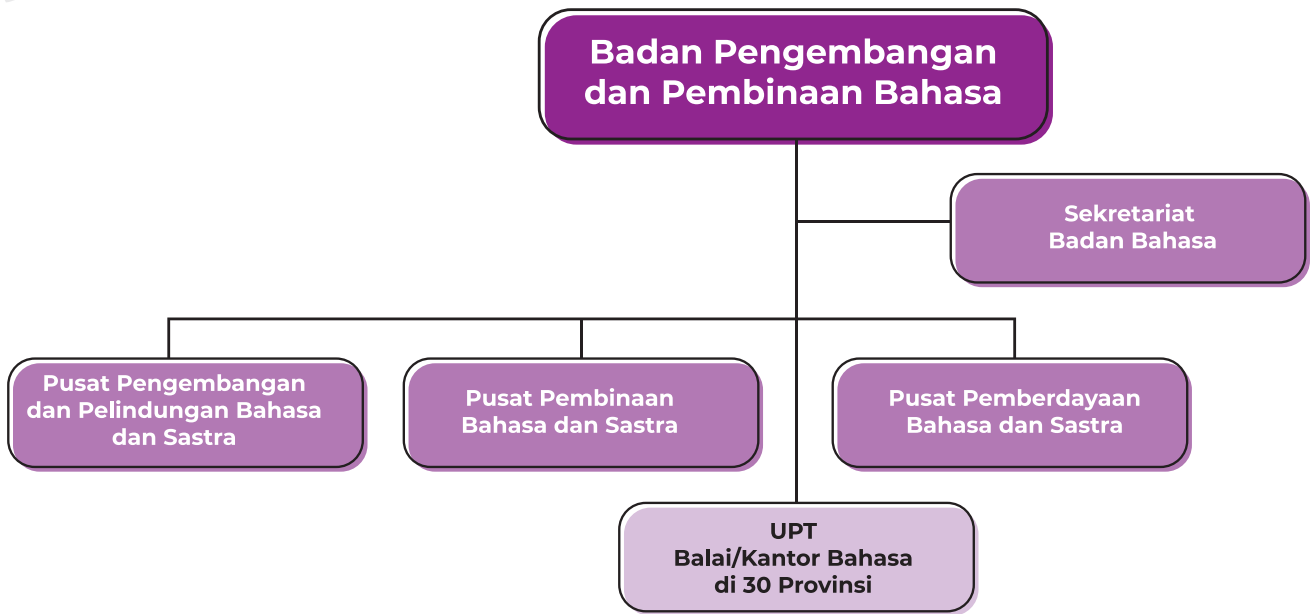
No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
4.	Peraturan Presiden tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Terpadu Gerakan Literasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023 2. Program literasi tersebar di berbagai kementerian/ lembaga. Perlu ada peta jalan terpadu untuk menyinkronkan semua program tersebut. 3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mampu mengatur peran dari tiap K/L dalam program literasi. 4. Naskah akademik pernah disusun oleh Kemenko PMK sehingga Kemendikdasmen tidak memulai pembahasan dari nol. 	Pusbin	Tahun 2027
5.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pewarisan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023 2. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang harus dilestarikan sesuai dengan amanat UUD. 3. Pelestarian bahasa daerah merupakan isu internasional, nasional, dan lokal. 4. UNESCO memutuskan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah. 	Pusbanglin	Tahun 2026

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Badan Bahasa memerlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Dukungan tersebut diperlukan agar Badan Bahasa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan adanya kerangka kelembagaan ini, penataan organisasi dapat diselaraskan dengan pencapaian sasaran organisasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

3.5.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas Sekretariat Badan, Pusat, dan unit pelaksana teknis di daerah sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut.



Secara keseluruhan, terdapat 34 satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa yang terkoordinasi di bawah Kepala Badan (1 Sekretariat, 3 Pusat, dan 30 UPT). Semua satuan kerja tersebut melaksanakan program dan kegiatan dengan pembagian tugas sebagai berikut.

Program	Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Pelaksana
Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Peningkatan Kecakapan Literasi	Pusbin	1. Pusbin 2. Pusbanglin 3. Pusdaya 4. Balai/Kantor Bahasa
Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pusbin	1. Pusbin 2. Balai/Kantor Bahasa
	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Pusbanglin	1. Pusbanglin 2. Balai/Kantor Bahasa
	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pusdaya	1. Pusdaya 2. Balai/Kantor Bahasa
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sekretariat	1. Sekretariat Badan 2. Pusbanglin 3. Pusbin 4. Pusdaya 5. Balai/Kantor Bahasa

Berkaitan dengan satuan kerja di daerah, saat ini belum semua provinsi memiliki UPT Balai/Kantor Bahasa. Dari 38 provinsi di Indonesia, Balai/Kantor Bahasa baru hadir di 30 provinsi. Provinsi yang belum memiliki Balai/Kantor Bahasa ialah (1) Daerah Khusus Jakarta, (2) Kalimantan Utara, (3) Sulawesi Barat, (4)

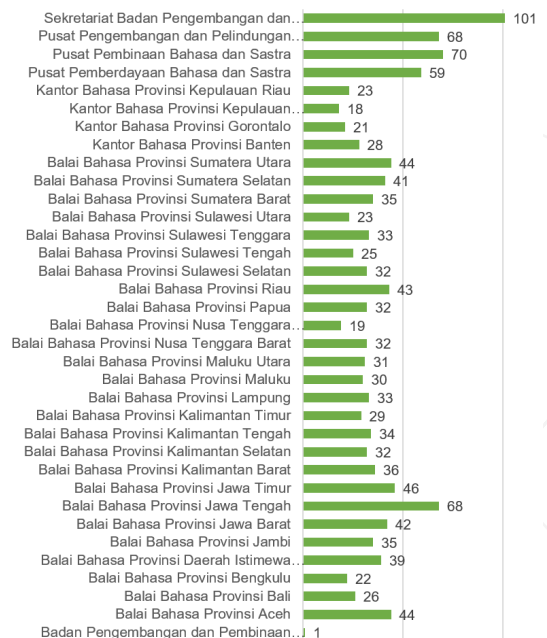
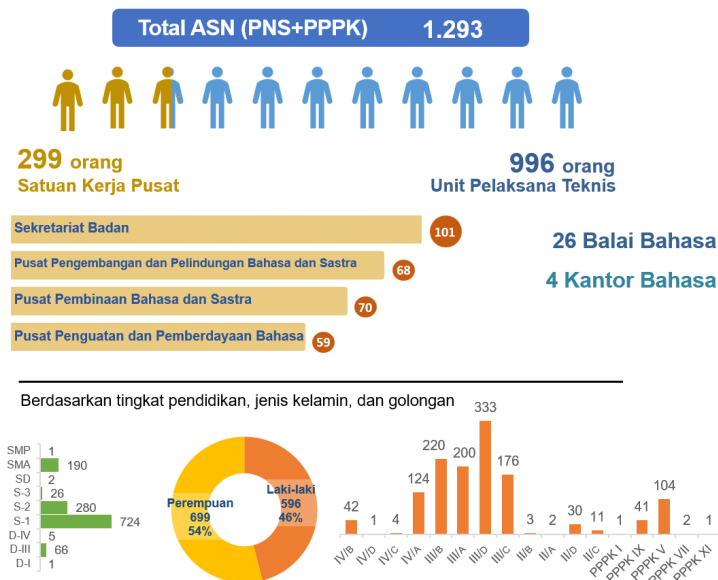
Papua Barat, (5) Papua Tengah, (6) Papua Pegunungan, (7) Papua Selatan, dan (8) Papua Barat Daya. Kehadiran Balai/Kantor Bahasa di provinsi-provinsi tersebut sangat diperlukan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas SDM. Di wilayah tersebut juga terdapat beragam bahasa dan sastra daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Badan Bahasa perlu menempuh langkah-langkah percepatan untuk pendirian Balai/Kantor Bahasa agar layanan kebahasaan dapat dirasakan manfaatnya oleh penduduk di provinsi-provinsi tersebut.

3.5.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Saat ini terdapat 1.293 pegawai yang bekerja di 34 satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sesuai dengan peran dan jabatannya, para pegawai tersebut melaksanakan tugas untuk mendukung program teknis kebahasaan dan kesastraan serta program dukungan manajemen. Sebaran pegawai di tiap satuan kerja dapat dilihat melalui gambar berikut.

Sebaran Jumlah SDM

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Badan Bahasa dilaksanakan secara holistik, mulai dari perekrutan, peningkatan kompetensi, mutasi, hingga purnabakti. Prioritas utama yang akan diusung dalam rencana strategis tahun 2025—2029 ialah aspek peningkatan kompetensi pegawai, baik kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural. Hal itu selaras dengan Asta Cita ke-4 yang dijanjikan oleh Presiden, yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Peningkatan kompetensi pegawai di Badan Bahasa dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, yaitu (1) Analisis kebutuhan pelatihan (*training need analysis/TNA*), (2) Penyusunan rencana dan anggaran pengembangan kompetensi, (3) Pelaksanaan pengembangan secara klasikal dan nonklasikal, (4) Integrasi ke dalam sistem manajemen karier pegawai, dan (5) Evaluasi serta tindak lanjut pengembangan kompetensi.

Peningkatan kompetensi pegawai perlu menjadi prioritas agar layanan yang diberikan oleh Badan Bahasa mampu menjawab persoalan di masyarakat.

Maraknya kasus kebahasaan, seperti berita bohong, pencemaran nama baik, dan sebagainya, membutuhkan penyelesaian yang melibatkan para ahli bahasa. Pesatnya laju kepunahan bahasa daerah juga menjadi keprihatinan bangsa dan memerlukan penanganan khusus yang melibatkan para pakar bahasa. Perubahan kebijakan tata kelola organisasi juga perlu ditindaklanjuti dengan baik oleh SDM administratif yang andal dan terampil. Oleh karena itu, secara bertahap Badan Bahasa perlu meningkatkan kompetensi pegawai dengan prioritas sebagai berikut.

a. Prioritas berdasarkan bidang keahlian

Peningkatan kompetensi SDM bidang kebahasaan dan kesastraan difokuskan pada lima bidang utama, yaitu

(1) Kebijakan dan perencanaan bahasa

Kepakaran dalam bidang kebijakan dan perencanaan bahasa diperlukan agar pegawai Badan Bahasa memiliki pengetahuan yang komprehensif untuk menganalisis fenomena kebahasaan di masyarakat dan memahami arah pembangunan nasional sehingga mampu merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

(2) Leksikografi

Kepakaran dalam bidang Leksikografi diperlukan agar pegawai Badan Bahasa memiliki kemampuan dalam menyusun kamus, tesaurus, dan produk leksikografis lainnya sebagai acuan utama dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa.

(3) Linguistik forensik

Kepakaran dalam bidang linguistik forensik diperlukan agar pegawai Badan Bahasa memiliki kemampuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan penegakan keadilan sehingga memperkuat kontribusi Badan Bahasa dalam aspek penegakan hukum.

(4) Pelestarian bahasa dan sastra

Kepakaran dalam bidang pelestarian bahasa dan sastra, misalnya pemetaan, konservasi, dan revitalisasi, sangat diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan ratusan bahasa daerah di Indonesia. Selain menjaga bahasa daerah tersebut dari kepunahan, kepakaran dalam bidang ini juga diperlukan untuk menggali kekayaan yang terkandung dalam bahasa dan sastra daerah sehingga nilai luhur tersebut mampu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat global.

(5) Penerjemahan

Kepakaran dalam bidang penerjemahan lintas bahasa diperlukan agar pegawai Badan Bahasa memiliki keterampilan tinggi dalam menyampaikan pesan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Keterampilan itu sangat diperlukan agar bangsa Indonesia dapat belajar dari keunggulan bangsa lain. Demikian pula, bangsa lain dapat belajar dari keunggulan bangsa Indonesia yang terkandung dalam berbagai dokumen mutakhir, karya sastra, naskah kuno, tradisi lisan, dan sumber-sumber lain.

b. Prioritas berdasarkan jabatan

Peningkatan kompetensi SDM Badan Bahasa juga dilaksanakan dengan berbasis pada jabatan yang diemban oleh para pegawai, baik tataran struktural, fungsional, maupun pelaksana, dengan prioritas sebagai berikut.

(1) Struktural

Para pejabat struktural diprioritaskan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi dalam bidang manajerial sehingga mampu mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Selain itu, para pejabat struktural juga perlu diperkuat dengan kompetensi di bidang komunikasi organisasi, pengambilan keputusan berbasis data, dan pengendalian kinerja serta akuntabilitas instansi pemerintah.

(2) Fungsional

Para pejabat fungsional diprioritaskan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang yang dikerjakan sehari-hari. Pejabat fungsional Widyabasa, misalnya, perlu mendapatkan pengembangan kompetensi teknis kebahasaan, baik Linguistik murni maupun terapan. Mereka juga perlu didorong dan difasilitasi untuk menyajikan gagasan atau tulisan dalam forum-forum ilmiah kebahasaan dan kesastraan di dalam negeri dan luar negeri. Pejabat fungsional Penerjemah juga demikian. Mereka perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai ragam teks (petunjuk operasional, fiksi, hukum, laporan, dan sebagainya). Para penerjemah, terutama para juru bahasa, perlu dilibatkan di berbagai forum multilateral untuk memfasilitasi pengalihan pesan yang disampaikan melalui pidato atau penyampaian pendapat secara resmi. Para pejabat fungsional bidang administrasi, misalnya Perencana dan Analisis APBN, perlu ditingkatkan kompetensinya agar mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas sesuai dengan tata kelola organisasi modern.

(3) Pelaksana

Para pejabat pelaksana, misalnya pengolah data dan penelaah teknis kebijakan, diprioritaskan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas jabatannya. Kompetensi yang diprioritaskan ialah kecakapan dan keterampilan teknis dalam memecahkan masalah dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Salah satu keterampilan utama yang perlu dikuasai berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi atau aplikasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas. Peningkatan kompetensi dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengiriman pegawai pelaksana untuk mengikuti diklat di instansi pengampu teknologi atau aplikasi tersebut.

Strategi yang ditempuh oleh Badan Bahasa untuk meningkatkan kompetensi pegawai ialah kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Badan Bahasa berbagi sumber daya dan fasilitas dengan mitra melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan. Pada periode 2025—2029, mitra yang menjadi prioritas untuk peningkatan kompetensi SDM ialah

a. Perguruan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri

Badan Bahasa menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi unggulan di dalam negeri dan luar negeri yang memiliki program studi kebahasaan atau kesastraan

agar menjadi tujuan tempat menimba ilmu lebih lanjut bagi para pegawai. Untuk perguruan tinggi di luar negeri, para pegawai juga diberi amanat untuk membantu pengajaran BIPA di universitas tujuan.

b. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Badan Bahasa menginisiasi kerja sama dengan lembaga pengelola dana pendidikan (LPDP) agar teralokasikan beasiswa bidang kebahasaan bagi para pegawai Badan Bahasa yang melanjutkan studi.

c. Pusat Pengembangan SDM Kemendikdasmen

Badan Bahasa dan PPSDM sudah menyusun modul pembelajaran yang siap diintegrasikan ke dalam sistem wiyata kinarya Kemendikdasmen. Dengan hadirnya materi kebahasaan tersebut, peningkatan kompetensi pegawai dapat dilaksanakan secara masif karena pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

d. Lembaga Kebahasaan di Luar Negeri

Badan Bahasa perlu menginisiasi kerja sama dengan lembaga kebahasaan di luar negeri, seperti Akademi Prancis, Royal Academia Espanola, dan sebagainya. Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan mengirim pegawai untuk magang mendalami pengetahuan khusus linguistik atau sastra di lembaga-lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peningkatan kompetensi pegawai Badan Bahasa 2025—2029 dirancang dengan prioritas sebagai berikut.

Tahun	Agenda	Uraian
2025	Pemetaan Kompetensi dan Penyusunan Rencana Pengembangan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan kompetensi seluruh pegawai secara komprehensif 2. Menyusun peta jalan peningkatan kompetensi SDM 3. Memfinalkan modul pembelajaran kebahasaan untuk Wiyata Kinarya
2026	Peningkatan Kompetensi I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi teknis (5 bidang kebahasaan utama dan bidang administratif) 2. Meningkatkan kompetensi manajerial 3. Meningkatkan kompetensi bahasa asing 4. Kolaborasi magang dan partisipasi dalam forum internasional
2027	Peningkatan Kompetensi II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi teknis (5 bidang kebahasaan utama dan bidang administratif) 2. Meningkatkan kompetensi manajerial 3. Meningkatkan kompetensi bahasa asing 4. Kolaborasi magang dan partisipasi dalam forum internasional
2028	Peningkatan Kompetensi III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi teknis (5 bidang kebahasaan utama dan bidang administratif) 2. Meningkatkan kompetensi manajerial 3. Meningkatkan kompetensi bahasa asing 4. Kolaborasi magang dan partisipasi dalam forum internasional

Tahun	Agenda	Uraian
2029	Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi efektivitas program peningkatan kompetensi 2. Menyusun rekomendasi untuk pembelajaran berkelanjutan

3.5.3 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Bahasa memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana beserta pemeliharannya tertuang dalam pengelolaan barang milik negara (BMN). Pengelolaan BMN di Badan Bahasa dilaksanakan selaras dengan prinsip tata kelola aset negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketertiban pengelolaan BMN, baik administrasi maupun fisik.

Pengelolaan BMN di Badan Bahasa tahun 2025—2029 difokuskan pada upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang terpadu dan berkelanjutan. Secara garis besar, upaya tersebut diuraikan dalam agenda tahunan sebagai berikut.

Tahun	Agenda	Uraian
2025	Identifikasi dan Penertiban data BMN di seluruh satker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kondisi faktual BMN 2. Menyusun analisis kebutuhan
2026	Penyusunan peta jalan pengelolaan BMN dan standardisasi BMN Badan Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peta jalan pengelolaan BMN 2. Menyusun standardisasi BMN Badan Bahasa
2027	Optimalisasi pemanfaatan BMN I	Memastikan pemanfaatan dan keamanan aset di seluruh satker
2028	Optimalisasi pemanfaatan BMN II	Memastikan pemanfaatan dan keamanan aset di seluruh satker
2029	Evaluasi dan Pengelolaan Berkelanjutan	Mengevaluasi pelaksanaan peta jalan dan pemanfaatan BMN untuk perencanaan periode selanjutnya

Secara khusus, terdapat prioritas pengadaan prasarana untuk satuan kerja di Badan Bahasa sebagai berikut.

Tahun	Satker	Agenda Prioritas	Strategi
2025	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	Rehab gedung	Percepatan rehab setelah buka blokir
2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Bahasa Sumatra Utara 2. Balai Bahasa NTT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehab gedung 2. Pengadaan tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan rehab pada awal tahun 2. Optimalisasi anggaran dari seluruh satker

Tahun	Satker	Agenda Prioritas	Strategi
2027	Balai Bahasa Provinsi Riau	Pembangunan Gedung	Pengurusan izin prinsip mulai tahun 2026
2028	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Pembangunan Gedung	Pengurusan izin prinsip mulai tahun 2026
2029	Balai Bahasa NTT	Pembangunan Gedung	Pengurusan izin prinsip mulai tahun 2027

3.5.4 Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan adanya SPBE, layanan pemerintah, termasuk layanan kebahasaan dan kesastraan, bertransformasi dari penyelenggaraan layanan secara tradisional menuju pemerintahan digital untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan partisipatif.

Saat ini berbagai layanan kebahasaan telah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bentuk aplikasi. Berdasarkan statistik pengguna aplikasi tersebut, layanan kebahasaan sangat digemari dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pada aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), misalnya, tercatat 308.313.263 pencarian (data 28 Oktober 2025). Berbagai aplikasi lain telah digunakan oleh masyarakat ketika ingin mendapatkan layanan kebahasaan dan kesastraan. Berbagai aplikasi tersebut terintegrasi dalam superaplikasi Halo Bahasa sebagaimana gambar berikut.

Inovasi Layanan dalam Satu Superaplikasi Halo Bahasa



Para periode 2025—2029, SPBE di Badan Bahasa diarahkan untuk penguatan tata kelola dan pelayanan prima selaras dengan peta arsitektur pemerintahan digital secara nasional.

Tahun	Agenda	Uraian
2025	Identifikasi dan penentuan rencana komprehensif tentang SPBE Badan Bahasa	Melaksanakan pemetaan awal, asesmen, dan analisis kebutuhan SPBE di lingkungan Badan Bahasa
2026	Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Badan Bahasa hingga tahun 2029	Menyusun arsitektur, proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur
2027	Peningkatan Kualitas Satu Data Kebahasaan dan kesastraan	Mengintegrasikan pengelolaan data kebahasaan dan kesastraan dalam aplikasi Data Pokok Kebahasaan (Dapobas) agar selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI)
2028	Integrasi Layanan Kebahasaan dan Kesastraan secara Nasional	Meningkatkan kualitas Halo Bahasa sebagai portal terpadu untuk semua layanan kebahasaan di Indonesia dengan mengintegrasikan layanan di Pusat dan UPT
2029	Layanan Publik Cerdas	Mengoptimalkan penggunaan AI (termasuk chatbot) untuk analisis data dan layanan otomatis agar lebih reponsif melayani kebutuhan masyarakat.

3.5.5 Pengelolaan Arsip Tematik Bidang Kebahasaan dan Kesastraan

Pengelolaan kearsipan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mengelola keseluruhan daur hidup arsip (*life cycle of a records*) yang terdiri atas fase: penciptaan dan penerimaan (*creation and receipt*); pendistribusian (*distribution*); penggunaan (*use*); pemeliharaan (*maintenance*) dan penyusutan (*disposition*) suatu arsip. Setiap fase di dalam daur hidup arsip ini akan mempengaruhi fase yang lain. Dengan kata lain, tata kearsipan merupakan suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah.

Pengelolaan arsip di Badan Bahasa telah dilakukan terhadap dokumen teknis kebahasaan dan dokumen administratif pendukung kegiatan. Pada periode 2025—2029, selain pengelolaan arsip standar, perlu dilakukan penelusuran dan pengelolaan arsip tematik bidang kebahasaan dan kesastraan yang memiliki nilai tinggi dari perspektif akademis maupun sejarah. Prioritas diarahkan pada arsip tentang

- a. Kongres Bahasa Indonesia
- b. Bulan Bahasa dan Sastra
- c. Pemetaan Bahasa

- d. Duta Bahasa
- e. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Untuk itu, Badan Bahasa akan memproyeksikan penyusunan arsip secara tematik dalam kurun waktu 2025—2029 sebagai berikut.

Tahun	Tahapan Kegiatan	Uraian
2025	Identifikasi, Penetapan Tema, dan Penyusunan Rencana Arsip Tematik	Menyusun dokumen perencanaan arsip tematik
2026	Penelusuran Arsip Tematik Kebahasaan I	Melaksanakan pengelolaan arsip tematik prioritas I
2027	Penelusuran Arsip Tematik Kebahasaan II	Melaksanakan pengelolaan arsip tematik prioritas II
2028	Penelusuran Arsip Tematik Kebahasaan III	Melaksanakan pengelolaan arsip tematik prioritas III
2029	Pemanfaatan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan diseminasi, publikasi arsip tematik I, II, dan III. 2. Mengevaluasi penyusunan arsip tematik untuk memastikan keberlanjutan program

3.5.6 Reformasi Birokrasi menuju satuan kerja ZI-WBK/WBBM

Reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen. Sebagai bagian integral dari Kemendikdasmen, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Bahasa diarahkan untuk memperkuat efektivitas organisasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Reformasi Birokrasi dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat organisasi di lingkungan Badan Bahasa mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Penguatan manajemen dan kinerja menjadi landasan utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif. Hal tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-7, tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Fokus Reformasi Birokrasi diarahkan pada dua hal, yaitu

1. Reformasi Birokrasi General, difokuskan untuk memperkuat internal birokrasi yang efisien, profesional, dan adaptif melalui: penyederhanaan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan; Penguatan tata kelola internal yang berbasis sistem informasi terintegrasi dan pengambilan keputusan berbasis data; Manajemen SDM berbasis sistem merit, guna memastikan penempatan dan pengembangan pegawai sesuai kompetensi dan

kebutuhan organisasi; Transformasi budaya kerja birokrasi, untuk mewujudkan organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

2. Reformasi Birokrasi Tematik, difokuskan untuk mendukung penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui optimalisasi peran birokrasi.

Di lingkungan Badan Bahasa, reformasi birokrasi untuk menjadikan seluruh satuan kerja berkinerja tinggi dan berpredikt ZI-WBK/WBBM dilaksanakan secara serempak dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Predikat ZI dari tim penilai internal kementerian maupun tim penilai nasional dijadikan praktik baik bagi satker lainnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan kebahasaan dan kesastraan. Berikut ini perjalanan reformasi birokrasi menuju satker ZI-WBK/WBBM dari tahun ke tahun.

Tahun	Usulan ZI	ZI Kementerian	ZI Nasional
2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusbanglin 2. Pusbin 3. BBP DIY 4. BBP Jatim 5. BBP Bali 6. BBP Kalteng 7. BBP NTB 8. KBP Lampung 9. KBP Sultra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBP Jawa Timur 2. BBP Bali 3. BBP Kalimantan Tengah 4. BBP Nusa Tenggara Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBP Jawa Timur 2. BBP Bali
2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusbanglin 2. Pusbin 3. BBP Jabar 4. BBP Jateng 5. BBP DIY 6. BBP Kalteng 7. KBP NTB 8. KBP Lampung 9. KBP Sultra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusbanglin 2. Pusbin 3. BBP Jabar 4. BBP Jateng 5. BBP DIY 6. KBP NTB 8. KBP Sultra 	
2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusbanglin 2. Pusbin 3. BBP Jabar 4. BBP Jateng 5. BBP DIY 6. BBP Kalteng 7. BBP Sulsel 8. BBP Papua 9. BBP NTB 10. BBP Jambi 11. BBP Lampung 12. BBP Sultra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusbin 2. BBP Jabar 3. BBP Jateng 4. BBP DIY 5. BBP Kalteng 6. BBP NTB 7. BBP Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBP Jateng 2. BBP DIY 3. BBP NTB

2025	1. BBP Jabar 2. BBP Lampung 3. BBP Bengkulu 4. BBP Jambi 5. BBP Sumsel 6. BBP Kalteng 7. BBP Sultra 8. BBP Sulsel 9. BBP Maluku 10. Pusbin	1. BBP Jabar 2. BBP Lampung 3. BBP Bengkulu 4. BBP Jambi 5. BBP Kalteng 6. BBP Sultra 7. BBP Maluku 8. Pusbin	(belum diumumkan)
2026	12 satuan kerja terpilih	Membangun paradigma dan komitmen bersama seluruh pegawai.	
2027	14 satuan kerja terpilih		
2028	16 satuan kerja terpilih		
2029	18 satuan kerja terpilih		

Untuk mewujudkan satker berkinerja tinggi dan meraih predikat ZI-WBK/WBBM, diperlukan arah kebijakan, rencana, dan pendampingan yang sistematis terhadap semua satker. Dukungan diperlukan dari aspek, antara lain, penganggaran, pembinaan SDM, dan sarana prasarana. Namun, perhatian utama diprioritaskan pada upaya membangun paradigma dan komitmen seluruh pegawai tentang reformasi birokrasi, pelayanan prima, dan zona integritas. Pemahaman dan semangat yang sama di antara para pegawai akan secara langsung meningkatkan kinerja organisasi sehingga mampu menghadirkan layanan kebahasaan dan kesastraan yang berkualitas, merata, dan inklusif, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja tahun 2025—2029 sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan						
IKSS 2.2	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. a. Literasi Membaca	Persentase	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan						
IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01
IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	Indeks	52,73	53,5	54,28	55,07	55,87
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabilitas						
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	90	90,10	90,20	90,30

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan						
IKP 2.2.19	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
SP 3	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia						
IKP 3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
IKP 3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Persentase	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKP 3.1.3	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Persentase	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
IKP 3.1.4	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29
IKP 3.2.1	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	Persentase	55	55,5	56	56,5	57
IKP 3.2.2	Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomas Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6
SP 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian						
IKP 5.1.27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.28	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A	AA

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 2.2.19.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
IKK 2.2.19.2	Persentase Produk Penerjemahan Yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	24	30	36	42	48
IKK 2.2.19.3	Persentase Produk Pengembangan Yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	12,96	26,3	40,37	54,81	70
7567	Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 3.1.1.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Persentase	41	43	45	47	49

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 3.1.1.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72
SK	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1.2.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,93	63,136	66,342	69,548	72,754
IKK 3.1.2.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
IKK 3.1.3.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah						
SK	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 3.1.4.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
IKK 3.1.4.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK	Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA						
IKK 3.2.1.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi a. Luar Negeri	Persentase	25	25,5	26	26,5	27
IKK 3.2.1.2	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi a. Dalam Negeri	Persentase	55	55,5	56	56,5	57
SK	Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomas Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional						
IKK 3.2.2.1	Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional	Persentase	22	32	42	52	62

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
IKK 5.1.27.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Persentase	95	96	97	98	99
IKK 5.1.28.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	Persentase	100	100	100	100	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan serta program dan kegiatan prioritas. Berkaitan dengan hal itu, kerangka pendanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2025—2029 disusun sebagai berikut.

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan)				
		2025	2026	2027	2028	2029
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	161.641	368.204	378.926	390.650	402.368
DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan					
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	101.375	219.623	225.117	230.749	236.520
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	79.878	127.182	130.979	134.253	137.609
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	34.077	53.792	55.137	56.515	57.928
WA	Program Dukungan Manajemen					
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	301.927	490.043	371.479	380.766	391.099

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029 ini merupakan gambaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dokumen rencana strategis ini merupakan penjabaran dari (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 dan (2) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencana Strategis ini menjabarkan visi dan misi Presiden yang diuraikan ke dalam arah kebijakan tingkat kementerian dan tingkat unit kerja eselon I. Dalam dokumen ini digambarkan keterkaitan antara agenda pembangunan nasional, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selain itu, dokumen ini dapat pula dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan akademis, dunia industri, maupun masyarakat umum. Dengan demikian, berbagai pihak dapat terlibat secara aktif, efektif, dan konstruktif untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LAMPIRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5889/I/BS.01.02/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2025—2029

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran													
	SS 2	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan													
	IKSS	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca	Persentase	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62							Badan Bahasa
	SP	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan													
	IKP 2.1.1	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80	200.425	179.640	195.338	208.615	215.292	Badan Bahasa	
	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi													
	SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik													
	IKK 2.1.1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80	157.058	118.438	132.043	143.130	145.029	Pusbin dan UPT	
	7569.BMA	Data dan Informasi Publik													
	7569.BMA.003	Produk Pengayaan Pendukung Literasi	Dokumen	413	620	620	620	620	17.219	34.438	36.160	37.968	39.867	Pusbin	
7569.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat														

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7569.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Orang	18.280	18.020	18.020	18.020	18.020	14.451	7.032	7.250	7.475	7.707	Pusbin dan UPT
	7569.QDC.004	Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan	Orang	-	21.000	23.250	25.500	25.500	69.919	84.000	95.883	105.162	105.162	UPT
	7569.QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan												
	7569.QGC.001	Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa	Lembaga		750	750	750	750	-	3.590	3.698	3.806	3.914	Pusbin dan UPT
	IKK 2.1.1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	24	30	36	42	48	38.577	39.657	40.768	41.909	43.083	Pusdaya dan UPT
	7569.QMA	Data dan Informasi Publik												
	7569.QMA.003	Produk Penerjemahan	Dokumen	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	38.577	39.657	40.768	41.909	43.083	Pusdaya dan UPT
	IKK 2.1.1.3	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	12,96	26,30	40,37	54,81	70,00	4.790	21.545	22.527	23.575	27.181	Pusbanglin
	7569.QMA	Data dan Informasi Publik												
	7569.QMA.001	Karya Sastra yang Dialih-Wahanakan	Dokumen	34	50	50	50	50	4.790	5.269	5.796	6.376	9.500	Pusbanglin dan UPT
	7569.QMA	Data dan Informasi Publik												
	7569.QMA.004	Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar	Dokumen	2	2	3	3	3	-	16.275	16.731	17.199	17.681	Pusbanglin
Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan												
	SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan												
	IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01	-	-	-	-	-	Badan Bahasa
	SP	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia												
	IKP 3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52	51.202	52.636	54.110	55.625	57.182	Badan Bahasa
	7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia												
SK	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia													

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 3.1.1.2	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persentase	41	43	45	47	49	12.275	12.619	12.972	13.335	13.709	Pusbin dan UPT
	7567.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	7567.QDC.002	Penutur Bahasa Teruji	Orang	186.569	188.432	190.315	192.223	194.143	10.250	10.537	10.832	11.135	11.447	Pusbin dan UPT
	7567.BMA	Data dan Informasi Publik												
	7567.BMA.001	Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun	Dokumen	7	7	7	7	7	2.025	2.082	2.140	2.200	2.262	Pusbin
	IKK 3.1.1.3	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya		60	63	66	69	72	38.927	40.017	41.137	42.289	43.473	Pusbin dan UPT
	7567.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	7567.QDC.001	Penutur Bahasa Terbina	Orang	8.250	5.250	5.250	5.250	5.250	14.468	14.873	15.290	15.718	16.158	UPT
	7567.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	7567.QDC.003	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Orang	-	17.975	17.975	17.975	17.975	69.919	71.877	73.890	75.958	78.085	Pusbin dan UPT
	7567.PEG	Konferensi dan Event												
	7567.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan	Kegiatan	115	124	124	124	124	24.459	25.144	25.848	26.571	27.315	Pusbin dan UPT
	IKP 3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Persentase	48,13	49,45	50,15	50,73	51,60	28.259	29.225	30.225	31.262	32.336	Badan Bahasa
	7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia												
	SK	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan												
	IKK 3.1.2.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,93	63,14	66,34	69,55	72,75	6.510	6.712	6.920	7.134	7.355	Pusbin dan UPT
	7567.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7567.BDB.001	Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	1.545	750	750	750	750	6.510	6.712	6.920	7.134	7.355	UPT
	IKK 3.1.2.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70	21.750	22.513	23.306	24.128	24.980	Pusbin dan UPT
	7567.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
	7567.BDB.002	Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	9.500	9.794	10.098	10.411	10.733	UPT
	7567.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
	7567.QDD.001	Komunitas Literasi yang Difasilitasi dan Diapresiasi	Kelompok Masyarakat	100	100	100	100	100	5.737	6.024	6.325	6.641	6.973	Pusbin
	7567.QDD.002	Komunitas Sastra yang Difasilitasi dan Diapresiasi	Kelompok Masyarakat	100	100	100	100	100	6.513	6.696	6.883	7.076	7.274	Pusbin
	IKP 3.1.3	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Persentase	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89	64.810	122.981	89.304	94.534	101.064	Badan Bahasa
	7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia												
	SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra												
	IKK 3.1.3.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76	20.065	21.884	23.329	25.274	27.510	Pusbanglin dan UPT
	7567.QMA	Data dan Informasi Publik												
	7567.QMA.003	Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan	Dokumen	32	32	32	32	32	854	897	959	1.046	1.150	Pusbanglin dan UPT
	7567.QMA	Data dan Informasi Publik												
	7567.QMA.004	Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa	Dokumen	81	82	82	83	83	19.211	20.987	22.370	24.228	26.360	Pusbanglin dan UPT

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKP 3.1.4	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29	135.356	142.123	144.830	148.891	151.598	Badan Bahasa
	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah												
	SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra												
	IKK 3.1.4.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8	11.057	48.725	10.677	10.675	10.956	Pusbanglin dan UPT
	7566.QMA	Data dan Informasi Publik												
	7566.QMA.002	Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	Dokumen	33	33	33	33	33	11.057	48.725	10.677	10.675	10.956	UPT
	IKK 3.1.4.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30	33.689	52.372	55.297	58.585	62.598	UPT
	7566.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
	7566.QDD.001	Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah yang Difasilitasi dan Diapresiasi (Komunitas dan Perseorangan)	Komunitas/ Perseorangan	-	30	35	40	50	3.300	4.500	5.250	6.000	7.500	Pusbanglin
	7566.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	7566.QDC.001	Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	Orang	7.741	7.817	7.893	8.007	8.197	15.048	16.582	17.623	18.947	20.080	UPT
	7566.PEG	Konferensi dan Event												
	7566.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	32	32	32	32	32	15.342	31.291	32.425	33.638	35.018	Pusbanglin dan UPT
	IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indoneisa	Indeks	52,73	53,50	54,28	55,07	55,87	-	-	-	-	-	Badan Bahasa
	SP	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi bahasa Indonesia												
	IKP 3.2.1	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar	Persentase	55	55,5	56	56,5	57	28.903	38.633	39.693	40.783	41.902	Badan Bahasa

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Kompetensi Lulusan												
	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia												
	SK	Meningkatnya Fasilitas Terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA												
	IKK 3.2.1.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luar Negeri)	Persentase	25	25,5	26	26,5	27	27.154	28.531	29.308	30.107	30.927	Pusdaya
		Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persentase	55	55,5	56	56,5	57	1.749	10.102	10.385	10.676	10.975	UPT
	7568.QDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga												
	7568.QDB.001	Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Lembaga	387	387	418	449	480	28.903	29.712	30.544	31.400	32.279	Pusdaya dan UPT
	7568.PEG	Konferensi dan Event												
	7568.PEG.001	Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	7.919	8.085	8.287	8.494	8.707	Pusdaya
	7568.BMA	Data dan Informasi Publik												
	7568.BMA.003	Bahan Fasilitas Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Dokumen	4	4	4	4	4	132	836	862	889	916	Pusdaya
	IKP 3.2.2	Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6						Badan Bahasa
	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia												
	SK	Meningkatnya Pemanfaatan Bahan Diplomasi Kebahasaan di Forum Internasional												

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 3.2.2.1	Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional	Persentase	22	32	42	52	62	402	1.412	1.456	1.501	1.547	Pusdaya
	7568.BMA	Data dan Informasi Publik												
	7568.BMA.002	Fasilitas Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Dokumen	25	32	38	44	50	-	2.354	3.431	3.534	3.640	Pusdaya
	7568.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	7568.BDC.001	Sastrawan Berkarya di Mancanegara	Orang	2	5	5	8	10	942	3.127	3.220	5.307	6.734	Pusdaya
Program Dukungan Manajemen	WA	Program Dukungan Manajemen												
	SS	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel												
	IKSS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	90	90,1	90,2	90,3	-	-	-	-	-	Badan Bahasa
	SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah												
	IKP 4.1.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	298.903	298.903	341.773	352.199	362.944	Badan Bahasa
	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa												
	SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa												
	IKK 3.1.1.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Persentase	95	96	97	98	99	274.813	284.499	315.351	325.037	335.021	Seluruh Satker
	7613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	7613.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Layanan	34	34	34	34	34	174.422	200.485	206.700	213.108	219.715	Seluruh Satker
7613.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	34	34	34	34	34	72.089	74.530	78.741	81.182	83.699	Seluruh Satker	
7613.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
7613.EBB.951	Layanan sarana Internal	Unit	3	1481	14	5	14	1.872	15.928	8.464	2.179	7.179	Seluruh Satker	

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	7613.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit	2	3	3	2	3	143.838	12.031	46.300	35.450	16.800	Sekretariat, Pusbanglin, Sumbar, Kalsel, Jabar, Sumut, Riau, Sumsel, Sulut, Bengkulu, NTT
	7613.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal												
	7613.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Orang	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	14.440	14.845	15.260	15.688	16.127	Sekretariat
	7613.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	7613.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	9	9	9	9	9	5.509	5.663	5.821	5.984	6.152	Sekretariat
	7613.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	7	7	7	7	7	3.137	3.225	3.315	3.408	3.503	Sekretariat
	7613.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	272	272	272	272	272	3.699	3.803	3.909	4.019	4.131	Seluruh satker
	7613.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	Sekretariat
	7613.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	36	36	36	36	36	1.517	1.559	1.603	1.648	1.694	Sekretariat
	IKP 4.1.1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A	AA	-	-	-	-	-	Badan Bahasa
	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa												
	SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa												
	IKK 3.1.1.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Persentase	100	100	100	100	100	24.090	25.703	26.422	27.162	27.923	Eselon I

Program/ Kegiatan	Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Unit Pengampu
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Pemerintah minimal A												
	7613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	7613.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	59	59	59	59	59	2.864	2.944	3.027	3.112	3.199	Seluruh satker
	7613.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	42	42	42	42	42	10.581	10.877	11.181	11.494	11.816	Sekretariat
	7613.EBA.959	Layanan Protokoler	Layanan	1	1	1	1	1	1.044	1.074	1.104	1.135	1.166	Sekretariat
	7613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	34	34	34	34	34	3.665	3.768	3.873	3.981	4.093	Sekretariat
	7613.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	34	34	34	34	34	5.936	6.690	6.878	7.070	7.268	Seluruh satker
	7613.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	34	34	34	34	34	-	350	360	370	380	Sekretariat
	7613.EBA.963	Layanan Perkantoran	Layanan	34	34	34	34	34	-	350	360	370	380	Sekretariat

B. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan. 2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir. 3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring. 	Pusbin	Kemenaker, Asosiasi Profesi	Tahun 2025
2.	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa. 2. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. 3. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan 	Sekretariat Badan	BPS, BRIN, Perpustakaan Nasional	Tahun 2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional.			
3.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023 2. Belum adanya regulasi yang memuat ketentuan terpadu untuk menunaikan amanat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44. 3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mengatur peran dari tiap K/L dalam menunaikan amanat UU 24/2009 tersebut. 	Pusdaya	Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen, Kementerian Luar Negeri	Tahun 2026
4.	Peraturan Presiden tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Terpadu Gerakan Literasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023 2. Program literasi tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Perlu ada peta jalan terpadu untuk menyinkronkan semua program tersebut. 3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mampu mengatur peran dari tiap K/L dalam program literasi. 4. Naskah akademik pernah disusun oleh Kemenko PMK sehingga Kemendikdasmen tidak memulai pembahasan dari nol. 	Pusbin	Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen.	Tahun 2027

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5.	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pewarisan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023 2. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang harus dilestarikan sesuai dengan amanat UUD. 3. Pelestarian bahasa daerah merupakan isu internasional, nasional, dan lokal. 4. Unesco memutuskan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah. 	Pusbanglin	Kementerian Dalam Negeri	Tahun 2026

C. DEFINISI OPERASIONAL

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS	:	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
IKSS	:	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca
Definisi	:	<p>Kompetensi minimum literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.</p> <p>Kemampuan literasi peserta didik dibagi menjadi empat kategori/level kompetensi, yaitu level jauh di bawah kompetensi minimum, di bawah kompetensi minimum, mencapai kompetensi minimum, dan di atas kompetensi minimum. Seorang siswa dikatakan memiliki kompetensi minimum dalam numerasi jika memiliki kompetensi pada level "mencapai kompetensi minimum" dan "di atas kompetensi minimum".</p>
Metode Penghitungan	:	<p>Persentase peserta didik yang mencapai kompetensi minimum dalam AKM diperoleh berdasarkan jumlah peserta didik pada level "mencapai kompetensi minimum" dan "di atas kompetensi minimum" dibagi dengan jumlah peserta didik peserta AKM literasi.</p> $X = \frac{A}{B} \times 100$ <p>Keterangan: X = Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada literasi membaca A = Jumlah peserta didik pada level "mencapai kompetensi minimum" dan "di atas kompetensi minimum literasi membaca" B = Jumlah peserta didik peserta AKM literasi</p>
Satuan	:	Persen
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Asesmen Nasional
Variabel data	:	Kemampuan Literasi
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Asesmen Pendidikan

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai capaian, makin baik kemampuan mendasar peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan berinteraksi secara aktif dengan teks.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Rapor Pendidikan
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	-
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Indeks Pembangunan Kebahasaan

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan
Definisi	:	<p>Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan ukuran komposit yang memberikan gambaran objektif dan komprehensif terhadap pembangunan kebahasaan dan kesastraan pada tingkat pusat dan daerah.</p> <p>Dasar hukum Indeks Pembangunan Kebahasaan: UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.</p> <p>Indeks Pembangunan Kebahasaan terdiri atas tiga Dimensi yaitu Pembinaan, Pelindungan dan Pengembangan. Dimensi Pembinaan merupakan gambaran aspek pembangunan</p>

kebahasaan yang mencerminkan upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran, keteladanan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra, baik dalam lingkungan Pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat. Dimensi ini terdiri dari 3 indikator yaitu Angka Kemahiran bahasa Indonesia, Persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra, dan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang membaca buku cerita.

Dimensi perlindungan merupakan gambaran aspek pembangunan kebahasaan yang mencerminkan upaya pemertahanan bahasa daerah dilakukan secara berkelanjutan oleh individu, komunitas, dan pemerintah daerah melalui transmisi antargenerasi, penggunaan aktif dalam lingkungan sosial, serta dukungan kebijakan yang memfasilitasi eksistensi dan kelangsungan bahasa dan sastra. Dimensi ini terdiri dari Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa pertamanya, penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat, dan persentase kab/kota yang memberikan dukungan formal terhadap kegiatan kebahasaan dan kesastraan.

Dimensi Pengembangan: merupakan gambaran aspek pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang mencerminkan hasil pengembangan produk kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan, disebarluaskan, dan diintegrasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dimensi ini terdiri atas 3 indikator, yaitu Angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, Persentase karya ilmiah dan populer kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi, dan persentase pertumbuhan karya sastra yang terpublikasi ke masyarakat.

Tahapan penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan terdiri atas: (1) pengumpulan dan pengolahan data; (2) penghitungan skor; (3) interpretasi dan penyajian hasil; dan (4) evaluasi dan validasi

Metode Penghitungan

- :
- Penghitungan dilakukan melalui beberapa tahapan.
1. Pengolahan data melalui:
 - a. penentuan nilai indikator; dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data primer dan data sekunder,
 - b. normalisasi nilai indikator; dilakukan untuk menstandarisasi agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama.
 - c. penghitungan indeks dimensi; dilakukan dengan

menghitung rata-rata nilai indikator pembentuk setiap dimensi, dengan rumus:

Indeks Per Dimensi

Menghitung indeks untuk tiap Dimensi dengan bobot tiap indikator sama

$$\text{Indeks Dimensi}_j = \left(\frac{SX_1 + \dots + SX_n}{n_j} \right) \times 100$$

dimana n adalah banyaknya indikator di tiap dimensi

2. Penghitungan skor dilakukan melalui:

- a. pembobotan masing-masing dimensi; bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Pembobotan menggunakan nilai yang berbeda antardimensi yang ditentukan berdasarkan metode statistik dan pendapat para ahli.

Pembobotan untuk masing masing dimensi sebagai berikut:

Dimensi Pembinaan 0,4

Dimensi Pelindungan 0,35

Dimensi Pengembangan 0,25

- b. penghitungan indeks total; dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai indeks dimensi dengan menggunakan pembobotan setiap dimensi

Menghitung Indeks dengan bobot tiap dimensi berbeda

$$I = (W_1 * Indeks D_1) + \dots + (W_j * Indeks D_j)$$

dimana W_j adalah nilai bobot dimensi ke- j

Satuan	: Indeks
Tipe Penghitungan	: Tahunan
Unit Pelaksana	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	: Badan Bahasa, Badan Pusat Statistik, BRIN, Pemerintah Daerah
Variabel data	: Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia, Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra, Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Membaca Buku Cerita, Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang Mempelajari Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pertama, Persentase Penduduk Usia Remaja yang Menggunakan Bahasa Daerah di Lingkungan Tetangga dan Masyarakat, Persentase Kab/Kota yang Memberikan Dukungan Formal terhadap Kegiatan Kebahasaan dan Kesastraan, Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan seni, Persentase Karya Ilmiah dan Populer Kebahasaan dan Kesastraan yang Terpublikasi, Persentase

		Pertumbuhan Karya Sastra yang Terpublikasi ke Masyarakat.
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Kebahasaan menunjukkan bahwa pembangunan kebahasaan di Indonesia semakin baik secara nasional melalui peningkatan pada setiap variabel indeks di setiap provinsi.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI)

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI)
Definisi	:	<p>IPBI adalah indikator komposit yang dirancang untuk mengukur tingkat internasionalisasi (eksistensi, penetrasi, pengakuan, peran, dan pengaruh) bahasa Indonesia di kancah internasional. IPBI didukung lima dimensi pengukuran, yaitu (1) sebaran penutur, (2) akses diplomasi, (3) pendidikan bahasa, (4) media digital, dan (5) khazanah bahasa, budaya, dan keilmuan. Setiap dimensi meliputi variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dimensi sebaran penutur terdiri atas variabel penutur asing dan negara; 2. dimensi akses diplomasi terdiri atas variabel status resmi internasional serta juru bahasa dan penerjemah; 3. dimensi pendidikan bahasa terdiri atas variabel institusi penyelenggara, tenaga pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan kurikulum bahasa Indonesia sebagai bahasa asing; 4. dimensi media digital terdiri atas variabel konten daring global serta prasarana dan sarana teknologi digital; serta

	5. dimensi khazanah bahasa, budaya, dan keilmuan terdiri atas variabel karya kreatif bahasa dan budaya serta publikasi ilmiah.
Metode Penghitungan	<p>: IPBI dihasilkan melalui langkah-langkah penghitungan, yakni (1) identifikasi indikator, (2) pengumpulan data setiap indikator, (3) normalisasi data, (4) penentuan bobot per dimensi, (5) penghitungan indeks per dimensi, dan (6) penghitungan indeks gabungan.</p> <p>Rumus IPBI:</p> $IPBI = \sum_{i=1}^5 B_i D_i$ <p>atau</p> $IPBI = \sum_{i=1}^5 (B_i \times D_i) (B_i \times D_i)$ <p>Keterangan rumus: <i>B_i</i>: Bobot dimensi ke-i <i>D_i</i>: Nilai dimensi ke-i Rumus Nilai Dimensi 1—Dimensi 5:</p> $D_i = \left[\left(\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^n \frac{V_{ij} - V_{ij \min}}{V_{ij \max} - V_{ij \min}} \times 100 \right) \times 100 \right] / n$ <p>Keterangan rumus: n: Banyaknya variabel <i>V_{ij}</i>: Nilai variabel ke-j pada dimensi ke-i <i>V_{ij min}</i>: Nilai minimum variabel ke-j pada dimensi ke-i <i>V_{ij maks}</i>: Nilai maksimum variabel ke-j pada dimensi ke-i</p> <p>Keterangan bobot: D1: Dimensi sebaran penutur (bobot 35%) D2: Dimensi akses diplomasi (bobot 15%) D3: Dimensi pendidikan bahasa (bobot 30%) D4: Dimensi media digital (bobot 10%) D5: Dimensi khazanah bahasa, budaya, dan keilmuan (10%)</p>
Satuan	: Indeks
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra); Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum; perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; organisasi profesi (APPBIPA, HPI, AICI, PLJ); platform global

	(Statista, W3Techs, Worldcat, IMDb, DOAJ, GlobalStats Statcounter, Google Play Store, App Store); kamus (KBBI dan Oxford English Dictionary).									
Variabel data	: Data pemelajar BIPA, data negara dengan pemelajar aktif BIPA, data organisasi kerja sama multilateral, data penerjemah dan juru bahasa, data pengajar BIPA, data lembaga penyelenggara program BIPA, data negara dengan lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum bahasa Indonesia, data persentil global konten web berbahasa Indonesia yang terakses secara global, data platform inti digital global, data aplikasi populer penyedia pembelajaran bahasa, data buku pada platform WorldCat, data film pada platform IMDb, data entri kamus Oxford English Dictionary, data entri Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data jurnal dan artikel ilmiah pada platform Directory of Open Access Journal (DOAJ).									
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah									
Polarisasi Indikator	: Polarisasi maksimal									
Interpretasi	: Makin tinggi angka IPBI menunjukkan makin tingginya tingkat internasionalisasi bahasa Indonesia. Angka IPBI dirancang untuk dapat menunjukkan tingkat internasionalisasi bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan tingkat eksistensi, penetrasi, pengakuan, fungsi, dan pengaruh bahasa Indonesia dalam pemanfaatannya di berbagai kawasan dunia dan pada berbagai konteks global. Interpretasi tingkat internasionalisasi bahasa Indonesia dirumuskan dengan kategori sebagai berikut. <table border="1" data-bbox="424 1279 1444 2027"> <thead> <tr> <th>Angka Indeks</th> <th>Kategori</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥80</td> <td>Berdaya (<i>Globally Rising</i>)</td> <td>Angka indeks pada kategori ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki status, fungsi, dan pengaruh yang kuat sebagai bahasa penghubung antarbangsa dan antarnegara yang digunakan di sebagian besar hingga seluruh kawasan dunia serta dalam ranah pemanfaatan pada sebagian besar hingga semua konteks global, baik umum maupun khusus.</td> </tr> <tr> <td>60–79</td> <td>Berpengaruh (<i>Regionally Influential</i>)</td> <td>Angka indeks pada kategori ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki status, fungsi, dan pengaruh yang memadai sebagai bahasa penghubung antarbangsa dan antarnegara yang digunakan di sejumlah lingkup kawasan regional dan antarkawasan serta dalam ranah</td> </tr> </tbody> </table>	Angka Indeks	Kategori	Interpretasi	≥80	Berdaya (<i>Globally Rising</i>)	Angka indeks pada kategori ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki status, fungsi, dan pengaruh yang kuat sebagai bahasa penghubung antarbangsa dan antarnegara yang digunakan di sebagian besar hingga seluruh kawasan dunia serta dalam ranah pemanfaatan pada sebagian besar hingga semua konteks global, baik umum maupun khusus.	60–79	Berpengaruh (<i>Regionally Influential</i>)	Angka indeks pada kategori ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki status, fungsi, dan pengaruh yang memadai sebagai bahasa penghubung antarbangsa dan antarnegara yang digunakan di sejumlah lingkup kawasan regional dan antarkawasan serta dalam ranah
Angka Indeks	Kategori	Interpretasi								
≥80	Berdaya (<i>Globally Rising</i>)	Angka indeks pada kategori ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki status, fungsi, dan pengaruh yang kuat sebagai bahasa penghubung antarbangsa dan antarnegara yang digunakan di sebagian besar hingga seluruh kawasan dunia serta dalam ranah pemanfaatan pada sebagian besar hingga semua konteks global, baik umum maupun khusus.								
60–79	Berpengaruh (<i>Regionally Influential</i>)	Angka indeks pada kategori ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki status, fungsi, dan pengaruh yang memadai sebagai bahasa penghubung antarbangsa dan antarnegara yang digunakan di sejumlah lingkup kawasan regional dan antarkawasan serta dalam ranah								

		pemanfaatan pada konteks global yang tidak hanya umum, tetapi juga lebih khusus.
40–59	Berkembang (<i>Developing</i>)	Angka indeks pada tingkat ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan status dan fungsinya sebagai bahasa penghubung antarbangsa yang digunakan di kawasan yang lebih luas serta dalam ranah pemanfaatan pada sejumlah konteks global yang umum.
<40	Bertumbuh (<i>Emerging</i>)	Angka indeks pada tingkat ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memasuki masa awal pembangunan fondasi untuk merancang dan merintis berbagai upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
Periode Pengumpulan Data	:	Setiap tahun
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Tahunan

**Meningkatnya Tata Kelola
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel**

Program	:	Program Dukungan Manajemen
SS	:	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel
IKSS	:	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Definisi	:	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar

dan Menengah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

Metode Penghitungan

: ***Indeks RB = Nilai RB General (100) + Nilai RB Tematik (10)***

Dimensi RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah yang bersumber pada tata kelola pemerintah yang terjadi di internal birokrasi dan dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Dimensi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah hilir yang terjadi di masyarakat terkait tema-tema prioritas pembangunan.

Kategori tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi/Indeks RB

Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
BB	>70 – 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum

			sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
B	>60 -70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
CC	>50 - 60	Cukup	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Satuan	:	Indeks/Nilai
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	:	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Variabel data	:	Perubahan ketentuan/peraturan terkait reformasi birokrasi, kebijakan nasional, kebijakan internal, dan perubahan struktur
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi indeks Reformasi Birokrasi Kementerian menunjukkan makin meningkatnya Tata Kelola Kementerian yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Publikasi ketersediaan indikator	:	Portal RB Nasional
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Lainnya (reformasi birokrasi)
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya
Meningkat Kualitas Literasi Membaca

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SS	:	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
IKSS	:	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca
SP	:	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
IKP	:	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
Definisi	:	Satuan pendidikan/sekolah yang peserta didiknya telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca dapat dinyatakan sebagai sekolah yang meningkatkan kualitas literasi membacanya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kenaikan kemampuan literasi membaca murid SD, SMP, dan SMA sederajat dalam asesmen kompetensi tingkat nasional.
Metode Penghitungan	:	Jumlah sekolah yang peserta didiknya lebih dari 50% mengalami kenaikan kemampuan literasi membaca dibagi jumlah sekolah yang mendapatkan intervensi aktivitas literasi membaca dikalikan 100%. $PSPL = \frac{\sum SPML}{\sum SSPL} \times 100\%$ <p>Keterangan: PSPL: Persentase satuan pendidikan yang meningkatkan kualitas literasi membacanya SPML: Jumlah satuan pendidikan yang kemampuan literasi membaca peserta didiknya meningkat SSPL: Jumlah seluruh satuan pendidikan yang diintervensi dengan aktivitas literasi membaca</p>
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Tahunan
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	
Variabel data	:	Satuan Pendidikan, Peserta Didik
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi nilai persentase sekolah yang kualitas literasi membacanya meningkat, makin tinggi kualitas literasi membaca

		peserta didiknya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional dan provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan
SP	:	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
IKP	:	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia
Definisi	:	<p>Angka kemahiran berbahasa Indonesia merupakan indikator yang menunjukkan pencapaian kemahiran penutur bahasa Indonesia dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi secara lisan dan tulis dalam ranah kehidupan personal, sosial, vokasional, dan akademik. Selain itu, indikator ini juga dapat menjadi cerminan sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia serta peningkatan kemahiran berbahasanya.</p> <p>Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia menunjukkan agregasi rata-rata perbandingan antara skor Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) penutur lintas profesi dan skor acuan tertingginya. Kemahiran berbahasa Indonesia yang dimaksud di sini adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan memahami bacaan dan dengarkan serta kemampuan dalam berbicara dan menulis yang telah dicapai seseorang.</p> <p>Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.</p>

	<p>Tujuan: meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia warga negara Indonesia serta memupuk sikap positif dan rasa bangga penutur terhadap bahasa Indonesia.</p> <p>Ruang Lingkup: Seluruh warga negara Indonesia yang mengikuti UKBI</p>
<p>Metode Penghitungan</p>	<p>: Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia (AKBI) adalah angka yang menggambarkan kemahiran berbahasa Indonesia masyarakat dalam skala nasional, yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata skor UKBI per profesi di setiap provinsi dan dibandingkan dengan acuan skor tertinggi dalam standar kemahiran berbahasa Indonesia.</p> <p>Karakteristik peuji dicari dengan formula yang memuat unsur (1) Jumlah peserta uji di setiap provinsi, (2) jumlah profesi dan nama profesi di setiap provinsi, (3) Jumlah skor peserta uji di setiap provinsi, (3) Rerata skor peserta uji di setiap provinsi, (4) Skor acuan tertinggi dalam standar kemahiran berbahasa Indonesia, dan (5) Angka kemahiran provinsi.</p> <p>Skor acuan tertinggi merupakan skor kemahiran berbahasa Indonesia yang dianggap standar berdasarkan hasil konvensi yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016. Skor acuan tertinggi tersebut merupakan target skor yang diharapkan dapat diraih oleh penutur bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristiknya.</p> <p>Tahapan dalam menghitung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi jumlah dan nama profesi dalam setiap provinsi Jumlahkan skor UKBI Adaptif setiap profesi dalam setiap provinsi. Buat rata-rata skor profesi dalam setiap provinsi. Bandingkan rata-rata skor profesi dalam setiap provinsi dengan skor acuan tertinggi dalam peraturan menteri tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia untuk membuat angka kemahiran provinsi. Jumlahkan angka kemahiran berbahasa Indonesia provinsi dan buat rata-rata berdasarkan jumlah tersebut untuk menghasilkan angka kemahiran berbahasa Indonesia. <p>Formula Penghitungan Indeks:</p> $AKBI = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \frac{SK_i}{ASK_i} \times 100$ <p>Keterangan: AKBI: Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia N: banyaknya profesi n: jumlah peuji</p>

		Ski: skor kemahiran profesi ASKi: acuan skor kemahiran profesi
Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Tahunan
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Pangkalan data UKBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	:	1. Rerata nilai UKBI profesi dalam provinsi 2. Skor acuan tertinggi berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 3. Angka kemahiran berbahasa setiap provinsi
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai angka kemahiran berbahasa Indonesia, tingkat kemahiran berbahasa Indonesia makin meningkat di setiap provinsi.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Program	:	Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan
SP	:	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
IKP	:	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra

Definisi	: <p>Persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan kegiatan pembinaan bahasa dan sastra adalah nilai yang menunjukkan keterlibatan komunitas yang secara aktif menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan bahasa dan sastra.</p> <p>Dasar Hukum: Kep Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra kemendikbudristek Nomor 0014/I.I3/BS.01.01/2024 tentang Juknis Peluncuran Banpem untuk Komunitas Penggerak Literasi Tahun 2024; Kep Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Nomor 1697/I/HK.06/2023 tentang Juknis Penyaluran Banpem Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong tumbuhkembangnya komunitas sastra di suatu wilayah, meningkatkan peran komunitas sastra di masyarakat sebagai sarana pembelajaran sastra, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra, serta mendorong kualitas dan kuantitas publikasi karya sastra di masyarakat. 2. Mendorong tumbuhkembangnya komunitas penggerak literasi, meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai sarana menumbuhkan minat baca-tulis, dan meningkatkan kecintaan masyarakat pada buku, serta menggiatkan literasi di tengah masyarakat. <p>Ruang lingkup: Komunitas Bahasa dan Sastra meliputi Komunitas Penggerak Literasi dan Komunitas Sastra</p>
Metode Penghitungan	: <p>Perbandingan jumlah komunitas bahasa dan sastra yang melakukan pembinaan bahasa dan sastra dibagi dengan total jumlah komunitas bahasa dan sastra (di setiap provinsi) di kali 100%.</p> $KBSB = \left(\frac{KB}{KBS} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: <i>KBSB</i>: Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan <i>KB</i>: jumlah komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan <i>KBS</i>: jumlah komunitas bahasa dan sastra</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pembinaan Bahasa dan sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	: 1. Komunitas bahasa dan sastra yang telah dibina dan terlibat 2. Total jumlah komunitas bahasa dan sastra
Instansi	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penghasil Data	
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Makin tinggi nilai persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra maka semakin aktif pula peran komunitas bahasa dan sastra dalam mengembangkan kebahasaan di masyarakat. Komunitas penggerak literasi berperan penting dalam membangkitkan minat baca dan tulis di kalangan masyarakat.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: -
Level Estimasi	: Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

Angka Pemanfaatan Produk Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

Program	: Pembangunan kebahasaan dan kesastraan
SS	: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	: Indeks Pembangunan Kebahasaan
SP	: Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
IKP	: Angka Pemanfaatan Produk Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
Definisi	: Angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra merupakan nilai yang memperlihatkan jumlah kumulatif pemanfaat produk pengembangan bahasa dan sastra dari kalangan masyarakat penutur bahasa di satu wilayah provinsi. Dasar Hukum: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. 3) Permendikbud Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi.

	<p>Tujuan: Memastikan sejauh mana produk bahasa dan sastra bermanfaat di masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kepentingan yang lebih luas.</p> <p>Ruang Lingkup: Produk Pengembangan bahasa dan sastra berupa berbagai acuan kebahasaan dan kesastraan.</p>
Metode Penghitungan	<p>:</p> $MPBS = \sum_{i=1}^n MPBS_i$ <p>Keterangan: MPBS = angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra merupakan akumulasi pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra dalam satu tahun MPBS_i = pemanfaatan produk ke-<i>i</i> (misalnya kamus, glosarium, dan istilah) <i>n</i> = banyaknya jenis produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihitung</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Tahunan
Unit Pelaksana	: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	: 1. Jumlah pemanfaat produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Penduduk usia 10 Tahun ke atas
Instansi Penghasil Data	: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi angka pemanfaatan produk bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, makin banyak produk kebahasaan yang digunakan dalam dunia akademik, teknologi, dan seni, dan berdampak positif terhadap perkembangan intelektual dan kreativitas masyarakat.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Ya
Level Estimasi	: Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

Indeks Pelestarian Bahasa Daerah

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Pembangunan Kebahasaan
SP	:	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
IKP	:	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)
Definisi	:	<p>Indeks yang menggambarkan upaya dalam menjaga, melindungi, dan menghidupkan kembali bahasa daerah agar tetap digunakan dan tidak punah. IPBD digambarkan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi kebinekaan, dimensi pewarisan, dan dimensi partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.</p> <p>Setiap dimensi terdiri atas sejumlah variabel berikut ini. (1) Dimensi kebinekaan, meliputi (a) persentase penambahan dokumentasi (konservasi) bahasa dan sastra daerah, dan (b) persentase bahasa/dialek yang direvitalisasi; (c) persentase penambahan jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan. (2) Dimensi pewarisan, meliputi rasio pengajar bahasa daerah terhadap penutur muda yang terimbas. (3) Dimensi partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat, meliputi (a) persentase layanan/fasilitas program pelindungan bahasa dan sastra kepada pemerintah daerah, dan (b) persentase layanan/fasilitas program pelindungan bahasa dan sastra kepada masyarakat.</p>
Metode Penghitungan	:	<p>Untuk menghasilkan IPBD dilakukan langkah perhitungan sebagai berikut. (1) standardisasi data; (2) penghitungan indeks per dimensi; dan (3) penetapan indeks keseluruhan. Adapun rumus perhitungan setiap variabel dan akumulatif dalam IPBD dapat digambarkan berikut ini.</p> <p>Indeks kebinekaan dengan rata-rata geometri:</p> $\text{Indeks Kebinekaan} = \sqrt[2]{b_1 \times b_2 \times b_3}$ <p>Indeks partisipasi dengan rata-rata geometrik:</p> $\text{Indeks Partisipasi} = \sqrt[2]{p_1 \times p_2}$ <p>IPBD dengan rata-rata tertimbang indeks kebinekaan, pewarisan, dan partisipasi</p> $\text{IPBD} = (0.3 \times \text{indeks kebinekaan}) + (0.5 \times \text{indeks pewarisan}) + (0.2 \times \text{indeks partisipasi})$ <p>Keterangan: Bobot dimensi kebinekaan sebesar 30% Bobot indeks pewarisan sebesar 50%</p>

	Bobot indeks partisipasi sebesar 20%						
Satuan	: Indeks						
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif						
Unit Pelaksana	: Balai/Kantor Bahasa						
Sumber Data	: Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra						
Variabel data	: Data bahasa dan sastra terdokumentasi, data bahasa, sastra, dan aksara yang diverifikasi; data bahasa dan sastra yang direvitalisasi; data guru master; data peserta didik hasil pengimbasan; data layanan perlindungan bahasa dan sastra kepada pemerintah daerah dan masyarakat						
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra						
Polarisasi Indikator	<p>: Makin tinggi indeks IPBD, makin baik kondisi pelestarian bahasa daerah yang dilakukan. Indeks tersebut sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan mengukur dampak program pelestarian bahasa daerah yang sudah berjalan, baik intervensi oleh pemerintah pusat melalui Badan Bahasa, maupun pemerintah daerah.</p> <p>IPBD tidak hanya terletak pada angka-angka statistiknya, tetapi juga pada perannya sebagai alat pelindung identitas bangsa, pelestari bahasa, dan penggerak kesadaran masyarakat. Melalui angka-angka statistik indeks tersebut, memantik kesadaran publik terhadap kondisi nyata bahasa daerah, peran serta para pihak dalam pelindungannya. terutama pihak pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelestarian bahasa daerah ke depan. Peran dari komunitas, perseorangan, dan juga lembaga tentu tidak dinafikan dalam mendukung upaya perlindungan tersebut. Tanpa adanya pengukuran yang terstruktur seperti IPBD, upaya pelestarian bahasa daerah akan sulit terukur.</p> <p>IPBD yang dipublikasikan secara terbuka bisa menjadi alat kampanye kesadaran akan pentingnya bahasa daerah. Masyarakat yang melihat penurunan skor pada bahasanya sendiri bisa terdorong untuk lebih aktif menggunakan dan melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari.</p>						
Interpretasi	<p>Makin tinggi indeks, makin tinggi upaya nyata pelestarian bahasa daerah yang dilakukan. Interpretasi terhadap IPBD dapat digambarkan dalam rentang angka dan kategori pada tabel berikut.</p> <table border="1" data-bbox="424 1809 1444 2033"> <thead> <tr> <th>Rentang Indeks</th> <th>Kategori</th> <th>Intepretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0—20</td> <td>Sangat rendah</td> <td>Upaya pelestarian belum berjalan semestinya, hampir tidak ada upaya perlindungan terhadap bahasa daerah.</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Indeks	Kategori	Intepretasi	0—20	Sangat rendah	Upaya pelestarian belum berjalan semestinya, hampir tidak ada upaya perlindungan terhadap bahasa daerah.
Rentang Indeks	Kategori	Intepretasi					
0—20	Sangat rendah	Upaya pelestarian belum berjalan semestinya, hampir tidak ada upaya perlindungan terhadap bahasa daerah.					

		21—40	Rendah	Beberapa inisiatif upaya perlindungan telah muncul, tetapi cakupannya sangat terbatas.
		41—60	Cukup	Terdapat upaya nyata dalam perlindungan bahasa daerah
		61—80	Tinggi	Program perlindungan sudah berjalan cukup baik.
		81—100	Sangat tinggi	Seluruh elemen pelestarian aktif: revitalisasi berjalan, konservasi kuat, pemetaan lengkap, fasilitasi optimal, dan tenaga pengajar serta siswa sangat memadai.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan		
Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra		
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi		
Klasifikasi	:	Tidak ada		
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya		
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun		

Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan

Program	:	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS	:	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	:	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia (IPBI)
SP	:	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
IKP	:	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan
Definisi	:	Persentase pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang terfasilitasi standar kompetensi lulusan adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah pemelajar BIPA yang terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 dengan jumlah total pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang

	teridentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Metode Penghitungan	: Jumlah pemelajar BIPA yang terfasilitasi standar kompetensi lulusan (SKL) BIPA dibagi jumlah total pemelajar BIPA yang teridentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%) Rumus penghitungan indikator: $PP = \frac{p}{n} \times 100 (\%)$ Keterangan: PP : Persentase pemelajar BIPA yang terfasilitasi SKL p : Jumlah pemelajar BIPA yang terfasilitasi SKL BIPA tahun berjalan n : Jumlah total pemelajar BIPA yang teridentifikasi tahun berjalan
Satuan	: Persen
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	: Data pemelajar BIPA yang terfasilitasi standar kompetensi lulusan (SKL) BIPA; data pemelajar BIPA yang teridentifikasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	: maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi persentase pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing yang terfasilitasi standar kompetensi lulusan BIPA menunjukkan makin banyaknya penutur asing yang mampu berbahasa Indonesia sebagai hasil pembelajaran BIPA yang berkualitas dan terstandar yang dapat berdampak pada makin luasnya sebaran wilayah penutur asing yang mampu berbahasa Indonesia sehingga dapat mendorong meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.
Periode Pengumpulan Data	: Setiap tahun
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring
Level Estimasi	: Nasional

Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	: Ya
Frekuensi Penyajian Data	: Tahunan

Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SS	: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
IKSS	: Indeks Pembangunan Kebahasaan
SP	: Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
IKP	: Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan
Definisi	: <p>Persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan dapat diketahui melalui angka yang menunjukkan pertumbuhan jumlah lembaga-lembaga internasional yang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan memperkenalkan, mempromosikan, atau mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat internasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, atau keagamaan. Pemanfaatan dapat terjadi baik melalui fasilitasi langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun atas inisiatif lembaga itu sendiri.</p> <p>Yang dimaksud dengan lembaga internasional dalam konteks indikator ini mencakup organisasi multilateral, institusi pendidikan asing, pusat kebudayaan, atau entitas non-pemerintah yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, atau merupakan bagian dari jaringan internasional yang memiliki kantor cabang di Indonesia; memiliki kerja sama langsung maupun tidak langsung dengan pemerintah Indonesia atau lembaga mitra Indonesia khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, atau keagamaan; serta terlibat atau berpotensi terlibat dalam kegiatan pembelajaran, promosi, dan publikasi bahasa Indonesia, nerjemahan dan penjurubahasaan, promosi karya sastra Indonesia, atau kegiatan lain yang relevan dalam kerangka diplomasi kebahasaan dan kesastraan. Bukti pemanfaatan dapat berupa partisipasi aktif</p>

	dalam program, permintaan kerja sama, keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan, publikasi bersama, atau dokumentasi resmi lainnya.
Metode Penghitungan	: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan (baik melalui fasilitasi oleh pemerintah maupun atas inisiatif sendiri) dengan jumlah total lembaga internasional yang menjadi mitra atau berpotensi melaksanakan kegiatan diplomasi kebahasaan dan kesastraan. Rumus Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan adalah sebagai berikut. $PLI = \left(\frac{LM}{LI} \right) \times 100\%$ Keterangan: PLI : persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan LM : jumlah lembaga internasional yang memanfaatkan atau terlibat aktif dalam minimal satu program diplomasi kebahasaan dan kesastraan LI : jumlah seluruh lembaga internasional yang menjadi mitra atau berpotensi melaksanakan diplomasi kebahasaan dan kesastraan
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	: Data kegiatan internasional, daftar mitra kerja sama, MoU, publikasi, data fasilitasi lembaga, data lembaga Internasional, data lembaga multilateral
Variabel data	: 1. Jumlah lembaga internasional yang memanfaatkan atau terlibat aktif dalam minimal satu program diplomasi kebahasaan dan kesastraan 2. Jumlah seluruh lembaga internasional yang menjadi mitra atau berpotensi melaksanakan diplomasi kebahasaan dan kesastraan
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Nilai PLI menunjukkan efektivitas program diplomasi kebahasaan dan kesastraan dalam menjangkau lembaga internasional. Rentang interpretasi:

		0–20% Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan) 21–40% Rendah (pemanfaatan masih terbatas) 41–60% Sedang (pemanfaatan mulai meluas) 61–80% Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik) 81–100% Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Dokumen Renstra yang tersedia di laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	:	Nasional Internasional
Klasifikasi	:	Outcome / Hasil
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

**Capaian Nilai Kinerja Anggaran
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Program	:	Program Dukungan Manajemen
SS	:	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel
IKSS	:	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
SP	:	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
IKP	:	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Definisi	:	Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berjalan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil evaluasi kinerja anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran (EKA) dan 50% nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA)
Metode Penghitungan	:	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 50% nilai Perencanaan Anggaran + 50% nilai Pelaksanaan Anggaran

Cara perhitungan masing-masing indikator diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023.

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA):

Dalam KMK 466/2023, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap perencanaan anggaran (EKA) adalah proses penilaian sejauh mana realisasi anggaran dan capaian keluaran (output) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (RKA), dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi. (lihat bagian terminologi dan kerangka dalam lampiran KMK)

Komponen Penilaian:

Efektivitas

- Pengukuran berdasarkan capaian keluaran (output) dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam RKA.
- Proporsi bobot efektivitas relatif lebih besar dibanding efisiensi.

Efisiensi

- Pengukuran berdasarkan penggunaan anggaran terhadap standar biaya keluaran (SBK), yang mencakup Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK).
- Bila realisasi anggaran terlalu rendah dibanding SBK (terjadi efisiensi yang berlebihan atau pemblokiran efisiensi), penilaian efisiensi bisa menjadi nol (tidak dianggap efisien)

2. Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA terdiri dari empat aspek utama yang diukur melalui indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu:

b. Kualitas Perencanaan Anggaran

Menilai seberapa baik perencanaan awal dalam mendukung pelaksanaan anggaran, meliputi:

- Deviasi Halaman III DIPA
- Revisi DIPA (frekuensi dan relevansi)

c. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Mengukur efektivitas dan ketepatan pelaksanaan belanja:

- Penyerapan anggaran (progres realisasi terhadap waktu)
- Penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga
- Capaian output kegiatan

d. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan:

- Penyelesaian retur SP2D
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- Pengembalian sisa dana ke kas negara tepat waktu

e. Kepatuhan terhadap Regulasi

		Menilai kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan: <ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi data keuangan • Pelaporan pertanggungjawaban • Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 																		
Satuan	:	Kategori																		
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif																		
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa																		
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan																		
Variabel data	:	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kepatuhan pelaksanaan anggaran berdasarkan data realisasi di sistem keuangan																		
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Keuangan																		
Polarisasi Indikator	:																			
Interpretasi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori Kinerja</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 90</td> <td>Sangat Baik</td> <td>Anggaran digunakan secara sangat efektif dan efisien. Seluruh target output tercapai, dan pelaksanaan sesuai rencana tanpa deviasi berarti.</td> </tr> <tr> <td>80 – < 90</td> <td>Baik</td> <td>Pelaksanaan anggaran cukup baik. Terdapat sedikit keterlambatan atau revisi, tetapi tidak mengganggu capaian program.</td> </tr> <tr> <td>70 – < 80</td> <td>Cukup</td> <td>Kinerja pelaksanaan anggaran cukup memadai, namun terdapat deviasi antara perencanaan dan realisasi yang perlu diperbaiki.</td> </tr> <tr> <td>60 – < 70</td> <td>Kurang</td> <td>Efisiensi rendah, keterlambatan tinggi, atau capaian output belum optimal. Diperlukan perbaikan sistem pelaksanaan dan pengawasan.</td> </tr> <tr> <td>< 60</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>Anggaran tidak digunakan secara efektif dan efisien. Banyak revisi, deviasi besar, dan output tidak tercapai. Perlu evaluasi menyeluruh.</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Nilai	Kategori Kinerja	Interpretasi	≥ 90	Sangat Baik	Anggaran digunakan secara sangat efektif dan efisien. Seluruh target output tercapai, dan pelaksanaan sesuai rencana tanpa deviasi berarti.	80 – < 90	Baik	Pelaksanaan anggaran cukup baik. Terdapat sedikit keterlambatan atau revisi, tetapi tidak mengganggu capaian program.	70 – < 80	Cukup	Kinerja pelaksanaan anggaran cukup memadai, namun terdapat deviasi antara perencanaan dan realisasi yang perlu diperbaiki.	60 – < 70	Kurang	Efisiensi rendah, keterlambatan tinggi, atau capaian output belum optimal. Diperlukan perbaikan sistem pelaksanaan dan pengawasan.	< 60	Sangat Kurang	Anggaran tidak digunakan secara efektif dan efisien. Banyak revisi, deviasi besar, dan output tidak tercapai. Perlu evaluasi menyeluruh.
Rentang Nilai	Kategori Kinerja	Interpretasi																		
≥ 90	Sangat Baik	Anggaran digunakan secara sangat efektif dan efisien. Seluruh target output tercapai, dan pelaksanaan sesuai rencana tanpa deviasi berarti.																		
80 – < 90	Baik	Pelaksanaan anggaran cukup baik. Terdapat sedikit keterlambatan atau revisi, tetapi tidak mengganggu capaian program.																		
70 – < 80	Cukup	Kinerja pelaksanaan anggaran cukup memadai, namun terdapat deviasi antara perencanaan dan realisasi yang perlu diperbaiki.																		
60 – < 70	Kurang	Efisiensi rendah, keterlambatan tinggi, atau capaian output belum optimal. Diperlukan perbaikan sistem pelaksanaan dan pengawasan.																		
< 60	Sangat Kurang	Anggaran tidak digunakan secara efektif dan efisien. Banyak revisi, deviasi besar, dan output tidak tercapai. Perlu evaluasi menyeluruh.																		
Periode Pengumpulan Data	:	Data dilaporkan pada akhir masa anggaran, setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Keuangan																		
Publikasi ketersediaan indikator	:	Dipublikasikan setiap tahun setelah hasil evaluasi dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang diumumkan secara nasional (umumnya pada triwulan I tahun berikutnya).																		

Level Estimasi	:	Instansi / Eselon I (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Dapat diakses oleh umum
Frekuensi penyajian data	:	Setiap Tahun

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Program	:	Program Dukungan Manajemen
SS	:	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel
IKSS	:	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
SP	:	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
IKP	:	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Definisi	:	Indikator ini mengukur tingkat akuntabilitas kinerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dinilai melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen . Badan Bahasa wajib memperoleh nilai evaluasi SAKIP dengan kategori minimal “Memuaskan” (A)
Metode Penghitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi dilakukan melalui tiga aspek: Keberadaan (20%), Kualitas (30%), Pemanfaatan (50%). ✓ Masing-masing aspek dinilai dengan skala AA, A, BB, B, CC, C, D, E—masing-masing memiliki kriteria dan nilai yang jelas. ✓ Bukti dan dokumen pendukung sangat penting untuk mendukung skor setiap kriteria. <p>Hasil akhir LKE kemudian dihitung menjadi skor total dan dikonversi menjadi predikat SAKIP (AA/A/BB/B, dst.).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Predikat diberikan berdasarkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rentang nilai tertentu. Nilai > 90-100 → Predikat AA (“Sangat Memuaskan”) Nilai > 80-90 → Predikat A (“Memuaskan”) Nilai > 70-80 → Predikat BB (“Sangat Baik”). Nilai > 60-70 → Predikat B (“Baik”). Nilai > 50-60 → Predikat CC (“Cukup Memadai”). Nilai > 30-50 → Predikat C (“Kurang”) Nilai < 30 → Predikat D (“Sangat Kurang”)
Satuan	:	Predikat

Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen
Variabel data	:	
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen yang mengacu pada Permenpan RB nomor 80 tahun . Predikat menunjukkan sejauh mana instansi melaksanakan manajemen kinerja secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
Periode Pengumpulan Data	:	Setiap tahun (data dikumpulkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen
Publikasi ketersediaan indikator	:	Dipublikasikan setiap tahun setelah hasil evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen yang diumumkan secara nasional (umumnya pada triwulan I tahun berikutnya).
Level Estimasi	:	Instansi/Eselon I (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)
Klasifikasi	:	Kualitatif – Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>).
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya, dapat diakses melalui situs resmi SPASIKITA, Kemendikdasmen.
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

Kegiatan	: Peningkatan Kecakapan Literasi
SK	: Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKK	: Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
Definisi	: Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Peserta didik diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran peserta didik yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah Peserta didik di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Peserta didik tersebut akan diberi peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh peserta didik akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis. Buku yang digunakan untuk praktik membaca juga akan disesuaikan dengan jenjang kemampuan membaca peserta didik. Ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan kemampuan atau kualitas dalam membaca dan memahami bacaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta didik yang dinilai.
Metode Penghitungan	: Jumlah peserta didik yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah peserta didik yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%. $PPDM = \frac{\Sigma PDML}{\Sigma SPDI} \times 100\%$ <p>PPDM: Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya Σ PDML = Jumlah Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya Σ SPDI = Jumlah Peserta Didik yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: UPT Badan Bahasa

Sumber Data	: UPT Badan Bahasa
Variabel data	: 1. Murid yang mendapatkan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca. 2. Murid yang naik kemampuan membacanya setelah diberi intervensi peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca
Instansi Penghasil Data	: UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Makin tinggi persentase kenaikan kemampuan membaca murid makin tinggi tingkat kecakapan literasi membaca murid
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:
Level Estimasi	: Nasional/ wilayah
Klasifikasi	: Murid SD, SMP, dan SMA.
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

**Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
(Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra)**

Kegiatan	: Peningkatan Kecakapan Literasi
SK	: Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKK	: Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
Definisi	: Indikator ini mengukur proporsi produk hasil penerjemahan yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia serta sebaliknya dan dimanfaatkan secara aktif oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran dan literasi. Batasan dalam indikator ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Produk penerjemahan yang diperhitungkan adalah seluruh hasil penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ke bahasa asing yang diterbitkan, dicetak, atau didistribusikan melalui fasilitasi Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dan mitra kerja sama pemerintah atau diunggah secara daring melalui platform resmi

	<p>pemerintah. Pemanfaatan produk tersebut meliputi kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas maupun kegiatan literasi nonformal, baik yang berlangsung di satuan pendidikan (seperti program literasi sekolah, kelas membaca, dan pojok baca), maupun di luar lingkungan sekolah, seperti di perpustakaan umum, taman baca masyarakat (TBM), komunitas literasi, dan forum-forum literasi anak lainnya, serta pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi pemerintah.</p>
Metode Penghitungan	<p>: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik dengan jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang tersedia di Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa. Pemanfaatan yang dimaksud mencakup penggunaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi, distribusi ke satuan pendidikan, atau bentuk pendayagunaan lainnya yang terverifikasi.</p> <p>Rumus persentase pemanfaatan produk buku hasil penerjemahan oleh peserta didik adalah sebagai berikut</p> $PBu = \left(\frac{Jpt}{JTpt} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: PBu: Persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa</p>
Satuan	: Persentase (%)
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	: Data distribusi buku, data pemanfaatan di satuan pendidikan, data pemanfaatan dari platform digital
Variabel data	: Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	<p>Nilai PBu menunjukkan persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Rentang interpretasi: 0–20%: Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan)</p>

	21–40%: Rendah (pemanfaatan masih terbatas) 41–60%: Sedang (pemanfaatan mulai meluas) 61–80%: Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik) 81–100%: Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	: Nasional
Klasifikasi	: Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

**Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
(Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)**

Kegiatan	: Peningkatan Kecakapan Literasi
SK	: Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKK	: Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
Definisi	: Indikator ini mengukur proporsi produk hasil penerjemahan yang diterjemahkan dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan dimanfaatkan secara aktif oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan literasi. Batasan dalam indikator ini mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Produk penerjemahan yang diperhitungkan adalah seluruh hasil penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia yang diterbitkan, dicetak, atau didistribusikan melalui fasilitasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau mitra kerja sama pemerintah, atau diunggah secara daring melalui platform resmi pemerintah. Pemanfaatan produk tersebut meliputi kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas maupun kegiatan literasi nonformal, baik yang berlangsung di satuan pendidikan (seperti program literasi sekolah, kelas membaca, dan pojok baca), maupun di luar lingkungan sekolah, seperti di perpustakaan umum, taman baca masyarakat (TBM), komunitas literasi, dan forum-forum literasi anak lainnya, serta

		pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi pemerintah.
Metode Penghitungan	:	<p>Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik dengan jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang tersedia di UPT Badan Bahasa. Pemanfaatan yang dimaksud mencakup penggunaan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, pemanfaatan fitur baca buku atau pengunduhan melalui platform digital resmi, distribusi ke satuan pendidikan, atau bentuk pendayagunaan lainnya yang terverifikasi.</p> <p>Rumus persentase pemanfaatan produk buku hasil penerjemahan oleh peserta didik adalah sebagai berikut</p> $PBu = \left(\frac{Jpt}{JTpt} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: PBu: Persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa</p>
Satuan	:	Persentase (%)
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Data distribusi buku, data pemanfaatan di satuan pendidikan, data pemanfaatan dari platform digital, data hasil pemantauan UPT Badan Bahasa
Variabel data	:	<p>Jpt: Jumlah produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik</p> <p>JTpt: Jumlah total produk buku hasil penerjemahan yang dihasilkan UPT Badan Bahasa</p>
Instansi Penghasil Data	:	UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		<p>Nilai PBu menunjukkan persentase produk buku hasil penerjemahan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Rentang interpretasi:</p> <p>0–20%: Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan)</p> <p>21–40%: Rendah (pemanfaatan masih terbatas)</p> <p>41–60%: Sedang (pemanfaatan mulai meluas)</p> <p>61–80%: Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik)</p> <p>81–100%: Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)</p>
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Publikasi ketersediaan indikator	:	Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Kegiatan	:	Peningkatan Kecakapan Literasi
SK	:	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKK	:	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
Definisi	:	Persentase pengembangan produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi produk hasil pengembangan bahasa dan sastra (seperti kamus, pedoman, cerita bergambar, dan komik) yang telah digunakan, dibaca, atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar, literasi, atau kegiatan lainnya oleh peserta didik pada jenjang dasar dan menengah.
Metode Penghitungan	:	<p>Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan Peserta Didik (PPDP) diperoleh dari jumlah peserta didik yang menggunakan produk dibagi jumlah peserta didik yang menjadi sampel dikali 100.</p> <p>Agar indeks ini dapat dihitung, diperlukan: instrumen survei untuk peserta didik, jumlah sampel per jenjang pendidikan, dan identifikasi responden yang pernah menggunakan/memanfaatkan produk.</p> <p>Penentuan jumlah sampel peserta didik per jenjang dasar dan menengah untuk survei pemanfaatan produk bahasa dan sastra dapat dilakukan secara statistik dengan memperhatikan prinsip representatif, efisien, dan terukur.</p> <p>Rumus persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah sebagai berikut.</p> $\text{PPDP (\%)} = \frac{\text{Pp}}{\text{Ps}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>

	PPDP : Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik Pp : jumlah peserta didik yang menggunakan produk Ps : jumlah peserta didik yang menjadi sampel	
Satuan	: Persentase	
Tipe Penghitungan	: Kumulatif	
Unit Pelaksana	: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	
Sumber Data	: Data survei pemanfaatan produk pengembangan oleh peserta didik	
Variabel data	: 1. peserta didik yang menggunakan produk 2. peserta didik yang menjadi sampel 3. produk pengembangan bahasa dan sastra bagi peserta didik	
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
Polarisasi Indikator	: Maksimal	
Interpretasi	: Nilai PPDP menunjukkan persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Rentang interpretasi:	
	0–25%	Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkau atau daya tarik sangat minim.)
	26–50%	Rendah (Produk mulai dikenal, namun masih belum banyak digunakan secara aktif.)
	51–75%	Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)
	76–100%	Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan	
Publikasi ketersediaan indikator	: Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/	
Level Estimasi	: Nasional dan provinsi	
Klasifikasi	: Peserta didik dasar dan menengah	
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	: Ya	
Frekuensi penyajian data	: Tahunan	

**Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan
Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya**

Kegiatan	: Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	: Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	: Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya
Definisi	<p>: Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional.</p> <p>Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji.</p> <p>Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas.</p> <p>Predikat Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.</p>
Metode Penghitungan	<p>: Jumlah penutur teruji pada setiap profesi yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif.</p> $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$ <p>PPT: Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya PSS: Jumlah penutur setiap profesi yang mendapat predikat sesuai dengan dan lebih dari standar PSP: Jumlah keseluruhan penutur setiap profesi yang mengikuti UKBI</p> <p>Metode perhitungan nasional</p> $PPTN = \frac{PPT \text{ Provinsi}}{\text{Jumlah Provinsi}}$ <p>Keterangan: PPTN : Rerata Persentase Penutur Teruji secara nasional</p>

		PPTP : Jumlah Persentase Penutur Teruji di setiap provinsi JP : Jumlah provinsi
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	:	1. Waktu 2. Sumber daya 3. Pemahaman terhadap petunjuk teknis
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya, makin tinggi angka kemahiran berbahasa Indonesia.
Periode Pengumpulan Data	:	Data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	1. Nasional: yang merupakan data akumulasi dan rerata dari tiga puluh unit pelaksana teknis pelaksana 2. Provinsi: Data dapat dihasilkan dari setiap unit kerja pelaksana
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

**Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
(Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra)**

Kegiatan	: Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	: Meningkatkan Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	: Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
Definisi	<p>: Persentase penutur bahasa yang meningkatkan kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari.</p> <p>Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.</p> <p>Upaya pembinaan penutur bahasa dalam rangka implementasi Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh UPT atau balai/kantor bahasa dan pada tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pusat (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra). Pada tingkat provinsi, pembinaan penutur bahasa dilaksanakan secara intensif dengan melaksanakan seluruh tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Dalam hal ini, pembinaan terhadap penutur bahasa dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, balai/kantor bahasa menjalin komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan penutur bahasa yang menjadi sasaran pembinaan.</p> <p>Sementara itu, pada tingkat nasional, pusat melaksanakan pembinaan penutur bahasa dengan berfokus pada penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).</p>

	<p>Dalam hal ini, pusat menyusun perangkat peraturan, petunjuk teknis, dan instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lembaga dan memastikan efektivitas implementasi perangkat tersebut di setiap UPT dengan melakukan pendampingan dan koordinasi yang intensif terhadap balai/kantor bahasa. Selain itu, dalam hal penghitungan rerata persentase penutur bahasa terbina yang meningkat kualitas penggunaannya di Indonesia, pusat menyiapkan instrumen pengukuran, baik secara parsial di setiap wilayah kerja maupun secara agregat di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.</p> <p>Penghitungan persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Setelah persentase penutur bahasa terbina di setiap wilayah kerja didapatkan, penghitungan rerata persentase dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hasil dari seluruh rangkaian proses pembinaan penutur bahasa, yaitu mulai dari penyusunan NSPK hingga pelaksanaan pembinaan penutur bahasa.</p>
<p>Metode Penghitungan</p>	<p>: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di seluruh wilayah kerja dan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap penutur bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $RPPB = \frac{PPB\ 1 + PPB\ 2 + PPB\ 3 + \dots}{WK}$ <p>Keterangan: RPPB = rerata persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya PPB 1 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 1 PPB 2 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 2 PPB 3 = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya di wilayah kerja 3 WK = jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap penutur bahasa</p>
<p>Satuan</p>	<p>: Persentase</p>

Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	1. Wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan 2. Penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

**Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
(Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)**

Kegiatan	:	Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	:	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	:	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
Definisi	:	Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari.

Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembekalan dan pendampingan. Pada tahap pembekalan, materi yang disampaikan kepada peserta adalah materi kebahasaan dan/atau kesastraan yang relevan. Setelah pembekalan, pendampingan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang memudahkan peserta untuk mengakses materi, mengunggah tugas, dan berkomunikasi dengan pendamping. Selanjutnya, penilaian akhir dilaksanakan untuk mengukur kemampuan akhir peserta setelah dilakukan pembekalan dan pendampingan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pembinaan.

Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa penutur dilakukan dengan membandingkan nilai pada tes awal dan tes akhir setiap peserta. Materi dalam tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pelaksanaan pembinaan. Peserta dianggap meningkat kualitas berbahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.

Metode Penghitungan : Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PPB = \frac{PM}{PT} \times 100\%$$

Keterangan:

PPB = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya

PM = jumlah penutur bahasa yang meningkat nilainya

PT = jumlah penutur bahasa terbina

Satuan : Persentase

Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	Penutur bahasa yang terbina Penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasa
Instansi Penghasil Data	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Ya
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

**Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya
(Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra)**

Kegiatan	:	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	:	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	:	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya
Definisi	:	Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen.

Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Upaya pembinaan lembaga dalam rangka implementasi Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dilaksanakan secara berjenjang, yaitu pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh UPT atau balai/kantor bahasa dan pada tingkat nasional yang diselenggarakan oleh pusat (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra). Pada tingkat provinsi, pembinaan lembaga dilaksanakan secara intensif dengan melaksanakan empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Pembinaan lembaga pada tingkat provinsi tersebut dilakukan secara langsung ke lapangan. Dalam hal ini, balai/kantor bahasa menjalin komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan lembaga sasaran pembinaan. Sementara itu, pada tingkat nasional, pusat melaksanakan pembinaan lembaga dengan berfokus pada penyusunan dan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Dalam hal ini, pusat menyusun perangkat peraturan, petunjuk teknis, dan instrumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembinaan lembaga dan memastikan efektivitas implementasi perangkat tersebut di setiap UPT dengan melakukan pendampingan dan koordinasi yang intensif terhadap balai/kantor bahasa. Selain itu, dalam hal penghitungan rerata persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di Indonesia, pusat menyiapkan instrumen pengukuran, baik secara parsial di setiap wilayah kerja maupun secara agregat di seluruh wilayah Indonesia.

Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis di dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.

Penghitungan persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina kemudian dikali seratus persen. Setelah persentase lembaga terbina di setiap wilayah kerja didapatkan, penghitungan rerata persentase dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hasil dari seluruh rangkaian proses pembinaan lembaga, yaitu mulai dari penyusunan NSPK hingga pelaksanaan pembinaan lembaga.

Metode Penghitungan : Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di seluruh wilayah kerja dan jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$RPLT = \frac{PLT1 + PLT2 + PLT3 + \dots}{WK}$$

Keterangan:

RPLT = rerata persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

PLT 1 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 1

PLT 2 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 2

PLT 3 = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya di wilayah kerja 3

WK = jumlah wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan terhadap lembaga

Satuan : Persentase

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	Wilayah kerja yang melaksanakan pembinaan Lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Setahun sekali

**Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya
(Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)**

Kegiatan	:	Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	:	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	:	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya
Definisi	:	Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen.

	<p>Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.</p> <p>Pembinaan lembaga dilaksanakan dalam empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan.</p> <p>Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis pada dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan pada dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.</p>
<p>Metode Penghitungan</p>	<p>: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $PLT = \left(\frac{LM}{LT} \right) \times 100\%$

		Keterangan: PLT = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya LM = jumlah lembaga yang meningkat nilai penggunaan bahasanya LT = jumlah lembaga terbina
Satuan	:	Persentase
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Variabel Data	:	Lembaga yang terbina Lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Instansi Penghasil Data	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi Ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah Indikator Dapat Diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Tahunan

Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya

Kegiatan	: Pemartabatan Bahasa dan Sastra
SK	: Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	: Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya
Definisi	<p>Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A.</p> <p>Persentase komunitas literasi yang meningkat kinerjanya adalah perbandingan (dalam bentuk angka persen) dari jumlah komunitas literasi yang mengalami kemajuan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan literasi terhadap jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu.</p>
Metode Penghitungan	<p>Rumus penghitungan adalah</p> <p>Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100%</p> $PKL \frac{\sum KLM}{\sum SKLT} \times 100\%$ <p>Keterangan: PKL : Persentase Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya $\sum KLM$: Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya. $\sum SKLT$: Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa.</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	: Data Pokok Kebahasaan, Unit pelaksana teknis Badan Bahasa
Variabel data	: 1. Komunitas literasi yang meningkat kinerjanya 2. Komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu
Instansi Penghasil Data	: Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin tinggi tingkat komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya maka makin tinggi efektivitas program pembinaan, keberhasilan pendampingan, dan tingginya motivasi komunitas dalam pengembangan kebahasaan dan kesastraan
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indicator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Kegiatan	:	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	:	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
IKK	:	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
Definisi	:	<p>Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.</p> <p>Tahapan dari proses pembakuan berujung pada validasi. Proses lengkapnya adalah seleksi – elaborasi – verifikasi – validasi. Setelah pembakuan, dilakukan proses kodifikasi dengan tahapan pencatatan – penyelarasan – penyuntingan – penerbitan. Seleksi merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan</p>

materi dari korpus melalui pencarian, pengumpulan, dan pemilihan. Elaborasi merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat, yang dilakukan melalui analisis, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap data kebahasaan dan kesastraan. Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan yang dilakukan, melalui pemeriksaan konsep, penyelarasan konsep, konsultasi dan diskusi yang melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat adat. Validasi merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan yang dilakukan melalui sidang validasi pakar dan pengesahan hasil validasi. Validasi dilakukan oleh Kepala Badan.

Metode Penghitungan : Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PPP (\%) = \frac{PB}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PPP: persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

PB : jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

PA : jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada

Satuan : Persentase

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Unit Pelaksana : 1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sumber Data : Laporan internal

Variabel data : 1. Produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi
2. Produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada

Instansi Penghasil Data : Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan UPT Badan Bahasa

Polarisasi Indikator : Maksimal

Interpretasi : Makin tinggi persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi makin baik kinerja program dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Publikasi : Renstra Badan Bahasa dan Renstra UPT

ketersediaan indikator	
Level Estimasi	: Nasional dan provinsi
Klasifikasi	: Produk
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara dalam Peta Kebinekaan

Kegiatan	: Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah
SK	: Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
IKK	: Persentase penambahan bahasa, sastra, dan aksara dalam Peta Kebinekaan
Definisi	: Penambahan jumlah (entitas) bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dan/atau terdokumentasi terhadap jumlah entitas bahasa, sastra dan aksara yang terpetakan dikalikan seratus. Penambahan entitas bahasa dalam pemetaan, meliputi bahasa, dialek, subdialek, atau beda wicara
Metode Penghitungan	: Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra dan/atau aksara dibagi dengan jumlah entitas bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus. Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPB = \frac{x}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan: <i>PPB</i> : persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam Peta Kebinekaan <i>x</i> : penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara <i>n</i> : Jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	: Data bahasa, sastra, dan aksara yang diverifikasi

Instansi Penghasil Data	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Makin besar persentase penambahan verifikasi bahasa, sastra dan/atau aksara, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Rasio pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

Kegiatan	:	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah
SK	:	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
IKK	:	Rasio pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas
Definisi	:	Perbandingan setiap pengajar utama bahasa daerah yang didukung oleh pengajar sejawat terhadap penutur muda yang mempelajari dan/atau menggunakan bahasa daerah di berbagai ranah, antara lain sekolah, keluarga, komunitas, dan, masyarakat.
Metode Penghitungan	:	Jumlah pengajar utama dibandingkan dengan jumlah penutur muda bahasa daerah dikalikan konstanta.
Satuan	:	Rasio
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	:	1. Jumlah guru utama 2. Jumlah pelajar terimbas
Instansi Penghasil Data	:	Balai/Kantor Bahasa

Polarisasi Indikator	:	Minimal 5 capaian penutur muda
Interpretasi		Makin besar proporsi penutur muda, makin baik capaian kinerja setiap pengajar utama. Capaian guru utama tersebut didukung oleh pengajar sejawat yang merupakan hasil pengimbasan.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	:	Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi Luar Negeri

Kegiatan	:	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	:	Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA
IKK	:	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi Luar Negeri
Definisi	:	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi Luar Negeri adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang teridentifikasi.
Metode Penghitungan	:	Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan

	<p>Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumus penghitungan indikator:</p> $PL = \frac{l}{n} \times 100 (\%)$ <p>Keterangan: PL: Persentase lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA l : Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA n : Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri yang teridentifikasi</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Variabel data	: Data jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; data jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan; Perwakilan Republik Indonesia; pusat budaya Indonesia) di luar negeri yang teridentifikasi.
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di luar negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan makin banyaknya lembaga penyelenggara program BIPA yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembelajarannya kepada pemelajar BIPA yang dapat berdampak pada makin banyaknya penutur asing yang terlayani pembelajaran bahasa Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mendorong meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.

Periode Pengumpulan Data	:	Setiap tahun
Publikasi Ketersediaan Indikator	:	Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Tahunan

Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi Dalam Negeri

Kegiatan SK	:	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
IKK	:	Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA
Definisi	:	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi Dalam Negeri adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitas pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi.
Metode Penghitungan	:	Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitas pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%). Rumus penghitungan indikator: $PL = \frac{l}{n} \times 100 (\%)$

	<p>Keterangan:</p> <p>PL : Persentase lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA</p> <p>l : Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA</p> <p>n : Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang teridentifikasi</p>
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sumber Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Variabel data	: Data jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; data jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi.
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Polarisasi Indikator	: Polarisasi maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan makin banyaknya lembaga penyelenggara program BIPA yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembelajarannya kepada pemelajar BIPA yang dapat berdampak pada makin banyaknya penutur asing yang terlayani pembelajaran bahasa Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mendorong meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.
Periode Pengumpulan Data	: Setiap tahun
Publikasi Ketersediaan Indikator	: Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring
Level Estimasi	: Provinsi
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator	: Ya

dapat diakses oleh umum	
Frekuensi Penyajian Data	: Tahunan

Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional

Kegiatan	: Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	: Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional
IKSS/IKP/IKK	: Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional
Definisi	: <p>Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional dapat diketahui melalui angka yang menunjukkan pertumbuhan jumlah bahan kebahasaan dan kesastraan yang digunakan, disampaikan, atau dipublikasikan melalui forum-forum internasional yang bertujuan memperkenalkan, mempromosikan, atau mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat global. Forum-forum ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, atau keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga multilateral, bilateral, maupun lembaga strategis nonpemerintah lainnya. Pemanfaatan bahan dapat terjadi baik melalui fasilitasi langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun atas inisiatif lembaga internasional mitra strategis Indonesia. Bahan yang dimaksud dapat meliputi karya terjemahan, dokumen penjurubahasaan, publikasi ilmiah, dokumen kesastraan, konten digital kebahasaan, dan media promosi bahasa dan sastra lainnya yang relevan.</p> <p>Bahan kebahasaan merujuk pada dokumen atau naskah diplomasi kebahasaan yang mengandung informasi tentang kebijakan, konsep, cerita, atau praktik kebahasaan dan kesastraan Indonesia, serta naskah resmi pemerintah atau lembaga lainnya yang diterjemahkan atau dijadikan bahan acuan, publikasi, promosi dalam forum multilateral, seperti di UNESCO, ASEAN, PBB, dan organisasi internasional sejenis, atau lembaga mitra strategis, seperti universitas-universitas, sekolah satuan kerja sama, sekolah-sekolah di luar negeri, klub sepak bola di luar negeri, perusahaan asing, dan lainnya.</p> <p>Bahan kesastraan meliputi karya sastra Indonesia (puisi, cerpen, kutipan novel, esai sastra) yang diterjemahkan dan digunakan dalam forum internasional, baik sebagai bahan diskusi,</p>

pembacaan karya, pementasan, atau kurasi dalam festival sastra, pameran buku, dan forum budaya lainnya.

Forum Internasional dibagi menjadi dua jenis, yaitu forum resmi di tingkat internasional dan forum tidak resmi di tingkat internasional.

Forum resmi di tingkat internasional adalah pertemuan atau sidang yang diselenggarakan oleh organisasi internasional, pemerintah, atau institusi multilateral yang memiliki legitimasi hukum dan diakui secara internasional. Forum ini bersifat formal, melibatkan perwakilan resmi negara, memiliki agenda dan hasil yang terdokumentasi, serta menghasilkan keputusan yang mengikat atau diakui secara global. Contohnya meliputi Sidang Umum UNESCO, KTT ASEAN, Sidang Dewan HAM PBB, dan rapat bilateral antarkementerian luar negeri.

Forum tidak resmi di tingkat internasional adalah pertemuan lintas negara yang bersifat informal, seperti seminar, lokakarya, atau diskusi yang diselenggarakan oleh universitas, LSM internasional, atau komunitas profesi, diseminasi produk penerjemahan di sekolah-sekolah, universitas-universitas, atau lembaga-lembaga BIPA. Forum ini tidak menghasilkan keputusan yang mengikat, tetapi mendorong dialog, pertukaran pengetahuan, dan jejaring kerja sama.

Metode Penghitungan	: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan dengan jumlah total bahan kebahasaan dan kesastraan yang ada untuk tujuan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Rumus persentase pemanfaatan bahan di forum internasional adalah sebagai berikut: $PB = \left(\frac{BM}{BT} \right) \times 100\%$ Keterangan: PB : Persentase bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan di forum internasional BM : Jumlah bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan dalam forum internasional BT : Jumlah total bahan kebahasaan dan kesastraan yang ada untuk keperluan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	: Data kegiatan internasional, daftar mitra kerja sama, MoU,

	publikasi, data fasilitasi lembaga, data forum Internasional.
Variabel data	: BM : Jumlah bahan kebahasaan dan kesastraan yang dimanfaatkan dalam forum internasional BT : Jumlah total bahan kebahasaan dan kesastraan yang ada untuk keperluan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Rentang interpretasi: 0–20% : Sangat Rendah (belum ada pemanfaatan signifikan) 21–40% : Rendah (pemanfaatan masih terbatas) 41–60% : Sedang (pemanfaatan mulai meluas) 61–80% : Tinggi (pemanfaatan sudah cukup baik) 81–100% : Sangat Tinggi (pemanfaatan optimal)
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Dokumen Renstra yang tersedia di lamana Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
Level Estimasi	: Internasional
Klasifikasi	: Bahan
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja dengan Kategori Sangat Baik

Kegiatan	: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	: Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK	: Capaian Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Definisi	: Capaian Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dalam periode waktu tertentu yang dinilai oleh Kementerian Keuangan.

	<p>Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil evaluasi kinerja anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran (EKA) dan 50% nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA).</p>
<p>Metode Penghitungan</p>	<p>: Nilai Kinerja Anggaran merupakan penghitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023. Penilaian itu diperoleh melalui capaian:</p> <p>1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA): Dalam KMK 466/2023, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap perencanaan anggaran (EKA) adalah proses penilaian sejauh mana realisasi anggaran dan capaian keluaran (output) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (RKA), dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi. (lihat bagian terminologi dan kerangka dalam lampiran KMK)</p> <p>Komponen Penilaian:</p> <p>Efektivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran berdasarkan capaian keluaran (output) dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam RKA. • Proporsi bobot efektivitas relatif lebih besar dibanding efisiensi. <p>Efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran berdasarkan penggunaan anggaran terhadap standar biaya keluaran (SBK), yang mencakup Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK). • Bila realisasi anggaran terlalu rendah dibanding SBK (terjadi efisiensi yang berlebihan atau pemblokiran efisiensi), penilaian efisiensi bisa menjadi nol (tidak dianggap efisien) <p>2. Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai IKPA terdiri dari empat aspek utama yang diukur melalui indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu:</p> <p>f. Kualitas Perencanaan Anggaran Menilai seberapa baik perencanaan awal dalam mendukung pelaksanaan anggaran, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deviasi Halaman III DIPA • Revisi DIPA (frekuensi dan relevansi) <p>g. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Mengukur efektivitas dan ketepatan pelaksanaan belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan anggaran (progres realisasi terhadap waktu) • Penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga • Capaian output kegiatan

	<p>h. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian retur SP2D • Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) • Pengembalian sisa dana ke kas negara tepat waktu <p>i. Kepatuhan terhadap Regulasi Menilai kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi data keuangan • Pelaporan pertanggungjawaban • Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 																		
Satuan	: Kategori																		
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif																		
Unit Pelaksana	: Satker di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa																		
Sumber Data	: Kementerian Keuangan																		
Variabel data	: 4. Efektivitas 5. Efisiensi 6. Kepatuhan pelaksanaan anggaran berdasarkan data realisasi di sistem keuangan																		
Instansi Penghasil Data	: Kementerian Keuangan																		
Polarisasi Indikator	:																		
Interpretasi	: <table border="1" data-bbox="406 1249 1452 2038"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori Kinerja</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 90</td> <td>Sangat Baik</td> <td>Anggaran digunakan secara sangat efektif dan efisien. Seluruh target output tercapai, dan pelaksanaan sesuai rencana tanpa deviasi berarti.</td> </tr> <tr> <td>80 – < 90</td> <td>Baik</td> <td>Pelaksanaan anggaran cukup baik. Terdapat sedikit keterlambatan atau revisi, tetapi tidak mengganggu capaian program.</td> </tr> <tr> <td>70 – < 80</td> <td>Cukup</td> <td>Kinerja pelaksanaan anggaran cukup memadai, namun terdapat deviasi antara perencanaan dan realisasi yang perlu diperbaiki.</td> </tr> <tr> <td>60 – < 70</td> <td>Kurang</td> <td>Efisiensi rendah, keterlambatan tinggi, atau capaian output belum optimal. Diperlukan perbaikan sistem pelaksanaan dan pengawasan.</td> </tr> <tr> <td>< 60</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>Anggaran tidak digunakan secara efektif dan efisien. Banyak revisi,</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Nilai	Kategori Kinerja	Interpretasi	≥ 90	Sangat Baik	Anggaran digunakan secara sangat efektif dan efisien. Seluruh target output tercapai, dan pelaksanaan sesuai rencana tanpa deviasi berarti.	80 – < 90	Baik	Pelaksanaan anggaran cukup baik. Terdapat sedikit keterlambatan atau revisi, tetapi tidak mengganggu capaian program.	70 – < 80	Cukup	Kinerja pelaksanaan anggaran cukup memadai, namun terdapat deviasi antara perencanaan dan realisasi yang perlu diperbaiki.	60 – < 70	Kurang	Efisiensi rendah, keterlambatan tinggi, atau capaian output belum optimal. Diperlukan perbaikan sistem pelaksanaan dan pengawasan.	< 60	Sangat Kurang	Anggaran tidak digunakan secara efektif dan efisien. Banyak revisi,
Rentang Nilai	Kategori Kinerja	Interpretasi																	
≥ 90	Sangat Baik	Anggaran digunakan secara sangat efektif dan efisien. Seluruh target output tercapai, dan pelaksanaan sesuai rencana tanpa deviasi berarti.																	
80 – < 90	Baik	Pelaksanaan anggaran cukup baik. Terdapat sedikit keterlambatan atau revisi, tetapi tidak mengganggu capaian program.																	
70 – < 80	Cukup	Kinerja pelaksanaan anggaran cukup memadai, namun terdapat deviasi antara perencanaan dan realisasi yang perlu diperbaiki.																	
60 – < 70	Kurang	Efisiensi rendah, keterlambatan tinggi, atau capaian output belum optimal. Diperlukan perbaikan sistem pelaksanaan dan pengawasan.																	
< 60	Sangat Kurang	Anggaran tidak digunakan secara efektif dan efisien. Banyak revisi,																	

			deviasi besar, dan output tidak tercapai. Perlu evaluasi menyeluruh.
Periode Pengumpulan Data	:	Data dilaporkan pada akhir masa anggaran, setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Keuangan	
Publikasi ketersediaan indikator	:	Dipublikasikan setiap tahun setelah hasil evaluasi dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang diumumkan secara nasional (umumnya pada triwulan I tahun berikutnya).	
Level Estimasi	:	Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	
Klasifikasi	:	Tidak ada	
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Dapat diakses oleh umum	
Frekuensi penyajian data	:	Setiap Tahun	

Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
SK	:	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK	:	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A
Definisi	:	Indikator ini mengukur tingkat akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dinilai melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen. Satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa wajib memperoleh nilai evaluasi SAKIP dengan kategori minimal “Memuaskan” (A)
Metode Penghitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evaluasi dilakukan melalui tiga aspek: Keberadaan (20%), Kualitas (30%), Pemanfaatan (50%). ✓ Masing-masing aspek dinilai dengan skala AA, A, BB, B, CC, C, D, E—masing-masing memiliki kriteria dan nilai yang jelas. ✓ Bukti dan dokumen pendukung sangat penting untuk mendukung skor setiap kriteria. <p>Hasil akhir LKE kemudian dihitung menjadi skor total dan dikonversi menjadi predikat SAKIP (AA/A/BB/B, dst.).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Predikat diberikan berdasarkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rentang nilai tertentu. <p>Nilai > 90-100 → Predikat AA (“Sangat Memuaskan”)</p>

		Nilai > 80-90 → Predikat A (“Memuaskan”) Nilai > 70-80 → Predikat BB (“Sangat Baik”). Nilai > 60-70 → Predikat B (“Baik”). Nilai > 50-60 → Predikat CC (“Cukup Memadai”). Nilai > 30-50 → Predikat C (“Kurang”) Nilai < 30 → Predikat D (“Sangat Kurang”)
Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen
Variabel data	:	
Instansi Penghasil Data	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen yang mengacu pada Permenpan RB nomor 80 tahun . Predikat menunjukkan sejauh mana instansi melaksanakan manajemen kinerja secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil.
Periode Pengumpulan Data	:	Setiap tahun (data dikumpulkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen
Publikasi ketersediaan indikator	:	Dipublikasikan setiap tahun setelah hasil evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen yang diumumkan secara nasional (umumnya pada triwulan I tahun berikutnya).
Level Estimasi	:	Instansi/Eselon I (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)
Klasifikasi	:	Kualitatif – Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>).
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Ya, dapat diakses melalui situs resmi SPASIKITA, Kemendikdasmen.
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

D. DISTRIBUSI TARGET DAN ALOKASI ANGGARAN

138.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 7569 - Peningkatan Kecakapan Literasi

<p>IKK Program Kegiatan Klasifikasi Rincian <i>Output</i> Rincian <i>Output</i> Satuan</p>	<p>2.1.1.1 Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca 138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 7569-Peningkatan Kecakapan Literasi 7569.BMA Data dan Informasi Publik 7569.BMA.003 Produk Pengayaan Pendukung Literasi Dokumen</p>
---	--

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	413	620	620	620	620	17.219.118	63.048.000	65.002.488	67.017.565	69.095.110
	JUMLAH	413	620	620	620	620	17.219.118	63.048.000	65.002.488	67.017.565	69.095.110

<p>IKK Program Kegiatan Klasifikasi Rincian <i>Output</i> Rincian <i>Output</i> Satuan</p>	<p>2.1.1.1 Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca 138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 7569-Peningkatan Kecakapan Literasi 7569.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 7569.QDC.004 Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan Orang</p>
---	---

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA		700	775	850	850		1.275.739	1.315.287	1.356.061	1.398.099
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN		700	775	850	850		1.264.718	1.303.924	1.344.346	1.386.021
693269	BALAI BAHASA BALI		700	775	850	850		1.359.206	1.401.341	1.444.783	1.489.571

693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT		700	775	850	850		1.434.183	1.478.643	1.524.481	1.571.739
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN		700	775	850	850		1.438.908	1.483.514	1.529.503	1.576.918
693274	BALAI BAHASA PAPUA		700	775	850	850		1.765.752	1.820.490	1.876.926	1.935.110
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR		700	775	850	850		1.264.500	1.303.700	1.344.114	1.385.782
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT		700	775	850	850		1.233.158	1.271.386	1.310.799	1.351.434
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH		700	775	850	850		1.250.265	1.289.023	1.328.983	1.370.181
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA		700	775	850	850		1.238.681	1.277.080	1.316.670	1.357.486
693279	BALAI BAHASA RIAU		700	775	850	850		1.279.354	1.319.014	1.359.903	1.402.060
693280	BALAI BAHASA ACEH		700	775	850	850		1.257.076	1.296.045	1.336.223	1.377.646
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN		700	775	850	850		1.272.718	1.312.172	1.352.850	1.394.788
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT		700	775	850	850		1.597.668	1.647.196	1.698.259	1.750.905
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH		700	775	850	850		1.646.298	1.697.333	1.749.951	1.804.199
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH		700	775	850	850		1.512.634	1.559.526	1.607.871	1.657.715
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA		700	775	850	850		1.300.131	1.340.435	1.381.989	1.424.830
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG		700	775	850	850		1.448.292	1.493.189	1.539.478	1.587.202
693287	BALAI BAHASA JAMBI		700	775	850	850		1.507.527	1.554.260	1.602.442	1.652.118
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR		700	775	850	850		1.426.183	1.470.395	1.515.977	1.562.972
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT		700	775	850	850		1.319.302	1.360.200	1.402.367	1.445.840
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA		700	775	850	850		1.266.023	1.305.270	1.345.733	1.387.451
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		700	775	850	850		1.174.360	1.210.765	1.248.299	1.286.996
693292	BALAI BAHASA BENGKULU		700	775	850	850		1.240.183	1.278.629	1.318.266	1.359.132
693293	KANTOR BAHASA BANTEN		700	775	850	850		1.232.572	1.270.782	1.310.176	1.350.791

693294	KANTOR BAHASA GORONTALO		700	775	850	850		1.328.918	1.370.114	1.412.588	1.456.378
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA		700	775	850	850		1.347.076	1.388.835	1.431.889	1.476.278
693296	BALAI BAHASA MALUKU		700	775	850	850		1.738.265	1.792.151	1.847.708	1.904.987
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU		700	775	850	850		1.622.076	1.672.360	1.724.204	1.777.654
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR		700	775	850	850		1.703.834	1.756.653	1.811.109	1.867.253
JUMLAH			21.000	23.250	25.500	25.500	-	41.745.600	43.039.714	44.373.945	45.749.537

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

2.1.1.1 Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca

138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

7569-Peningkatan Kecakapan Literasi

7569.QGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan

7569.QGC.001 Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa

Lembaga

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA		25	25	25	25		106.532	109.834	113.239	116.750
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN		25	25	25	25		105.618	108.892	112.268	115.748
693269	BALAI BAHASA BALI		25	25	25	25		113.479	116.997	120.624	124.363
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT		25	25	25	25		119.723	123.434	127.261	131.206
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN		25	25	25	25		120.101	123.824	127.663	131.620
693274	BALAI BAHASA PAPUA		25	25	25	25		147.260	151.825	156.532	161.384
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR		25	25	25	25		105.614	108.888	112.264	115.744
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT		25	25	25	25		102.990	106.183	109.474	112.868
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH		25	25	25	25		104.374	107.610	110.945	114.385
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA		25	25	25	25		103.396	106.601	109.906	113.313
693279	BALAI BAHASA RIAU		25	25	25	25		106.746	110.055	113.467	116.984
693280	BALAI BAHASA ACEH		25	25	25	25		104.875	108.126	111.478	114.934
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN		25	25	25	25		106.141	109.431	112.824	116.321
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT		25	25	25	25		133.151	137.279	141.534	145.922
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH		25	25	25	25		137.176	141.428	145.813	150.333
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH		25	25	25	25		126.032	129.939	133.967	138.120

693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA		25	25	25	25		108.363	111.722	115.186	118.756
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG		25	25	25	25		120.620	124.359	128.214	132.189
693287	BALAI BAHASA JAMBI		25	25	25	25		125.530	129.421	133.433	137.570
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR		25	25	25	25		118.840	122.524	126.322	130.238
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT		25	25	25	25		109.920	113.328	116.841	120.463
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA		25	25	25	25		105.721	108.998	112.377	115.861
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		25	25	25	25		98.074	101.114	104.249	107.481
693292	BALAI BAHASA BENGKULU		25	25	25	25		103.493	106.701	110.009	113.419
693293	KANTOR BAHASA BANTEN		25	25	25	25		102.944	106.135	109.425	112.818
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO		25	25	25	25		110.945	114.384	117.930	121.586
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA		25	25	25	25		112.412	115.897	119.490	123.194
693296	BALAI BAHASA MALUKU		25	25	25	25		145.037	149.533	154.169	158.948
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU		25	25	25	25		135.335	139.530	143.856	148.315
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR		25	25	25	25		141.988	146.390	150.928	155.606
JUMLAH			750	750	750	750	-	3.482.430	3.590.385	3.701.687	3.816.440

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

2.1.1.3 Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

7569-Peningkatan Kecakapan Literasi

7569.QMA Data dan Informasi Publik

7569.QMA.001 Karya Sastra yang Dialihwahanakan

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	34	50	50	50	50	1.100.000	4.691.050	4.836.473	4.986.403	5.140.982
JUMLAH		34	50	50	50	50	1.100.000	4.691.050	4.836.473	4.986.403	5.140.982

IKK	2.1.1.2 Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
Program	138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
Kegiatan	7569-Peningkatan Kecakapan Literasi
Klasifikasi Rincian Output	7569.QMA Data dan Informasi Publik
Rincian Output	7569.QMA.003 Produk Penerjemahan
Satuan	Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	611	611	611	611	611	5.349.676	5.520.866	5.697.533	5.879.854	6.068.010
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	97	97	97	97	97	1.598.340	1.649.487	1.702.270	1.756.743	1.812.959
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	68	68	68	68	68	1.278.500	1.319.412	1.361.633	1.405.205	1.450.172
693269	BALAI BAHASA BALI	102	102	102	102	102	2.038.822	2.104.064	2.171.394	2.240.879	2.312.587
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	35	35	35	35	35	650.860	671.688	693.182	715.363	738.255
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	62	62	62	62	62	1.029.874	1.062.830	1.096.841	1.131.939	1.168.161
693274	BALAI BAHASA PAPUA	40	40	40	40	40	744.022	767.831	792.401	817.758	843.926
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	102	102	102	102	102	2.383.958	2.460.245	2.538.972	2.620.220	2.704.067
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	99	99	99	99	99	2.313.064	2.387.082	2.463.469	2.542.300	2.623.653
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	102	102	102	102	102	1.597.218	1.648.329	1.701.076	1.755.510	1.811.686
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	85	85	85	85	85	1.413.380	1.458.608	1.505.284	1.553.453	1.603.163
693279	BALAI BAHASA RIAU	40	40	40	40	40	746.538	770.427	795.081	820.523	846.780
693280	BALAI BAHASA ACEH	51	51	51	51	51	915.807	945.113	975.356	1.006.568	1.038.778
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	41	41	41	41	41	760.114	784.438	809.540	835.445	862.179
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	56	56	56	56	56	1.172.833	1.210.364	1.249.095	1.289.066	1.330.316
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	37	37	37	37	37	685.230	707.157	729.786	753.140	777.240

693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	70	70	70	70	70	1.061.104	1.095.059	1.130.101	1.166.264	1.203.585
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	30	30	30	30	30	647.794	668.523	689.916	711.993	734.777
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	41	41	41	41	41	761.493	785.861	811.008	836.961	863.743
693287	BALAI BAHASA JAMBI	34	34	34	34	34	1.013.714	1.046.153	1.079.630	1.114.178	1.149.832
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	32	32	32	32	32	820.419	846.672	873.766	901.726	930.582
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	70	70	70	70	70	1.129.554	1.165.700	1.203.002	1.241.498	1.281.226
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	33	33	33	33	33	603.090	622.389	642.305	662.859	684.071
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	32	32	32	32	32	586.852	605.631	625.011	645.012	665.652
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	61	61	61	61	61	1.080.949	1.115.539	1.151.237	1.188.076	1.226.095
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	64	64	64	64	64	2.046.820	2.112.318	2.179.912	2.249.670	2.321.659
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	60	60	60	60	60	867.040	894.785	923.418	952.968	983.463
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	42	42	42	42	42	958.762	989.442	1.021.105	1.053.780	1.087.501
693296	BALAI BAHASA MALUKU	50	50	50	50	50	802.466	828.145	854.646	881.994	910.218
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	20	20	20	20	20	361.512	373.080	385.019	397.340	410.054
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	43	43	43	43	43	1.194.817	1.233.051	1.272.509	1.313.229	1.355.252
JUMLAH		2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	38.614.622	39.850.290	41.125.499	42.441.515	43.799.644

**138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7566 Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah**

IKK
Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

2.1.1.3 Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik
138.DI-Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
7569-Peningkatan Kecakapan Literasi
7569.QMA Data dan Informasi Publik
7569.QMA.004 Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar
Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	2	2	3	3	3	205.868	212.250	218.830	225.613	239.818
	JUMLAH	2	2	3	3	3	205.868	212.250	218.830	225.613	239.818

IKK
Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

2.1.1.1 Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7569-Peningkatan Kecakapan Literasi
7569.QDC Data dan Informasi Publik
7567.QDC.003 Generasi Muda Terbina Program Literasi
Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	315	-	-	-	-	1.314.683	-	-	-	-
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	590	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	590	-	-	-	-	172.720	-	-	-	-
693269	BALAI BAHASA BALI	590	-	-	-	-	280.373	-	-	-	-
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	590	-	-	-	-	322.860	-	-	-	-
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	590	-	-	-	-	525.231	-	-	-	-
693274	BALAI BAHASA PAPUA	590	-	-	-	-	831.604	-	-	-	-
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	590	-	-	-	-	714.524	-	-	-	-
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	590	-	-	-	-	378.598	-	-	-	-
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	590	-	-	-	-	663.068	-	-	-	-
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	590	-	-	-	-	376.080	-	-	-	-
693279	BALAI BAHASA RIAU	590	-	-	-	-	673.386	-	-	-	-

693280	BALAI BAHASA ACEH	590	-	-	-	-	339.985	-	-	-	-
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	590	-	-	-	-	98.100	-	-	-	-
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	590	-	-	-	-	165.387	-	-	-	-
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	590	-	-	-	-	213.470	-	-	-	-
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	590	-	-	-	-	495.567	-	-	-	-
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	590	-	-	-	-	490.079	-	-	-	-
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	590	-	-	-	-	310.170	-	-	-	-
693287	BALAI BAHASA JAMBI	590	-	-	-	-	346.017	-	-	-	-
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	590	-	-	-	-	420.662.	-	-	-	-
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	590	-	-	-	-	524.386	-	-	-	-
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	590	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	570	-	-	-	-	401.540	-	-	-	-
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	590	-	-	-	-	692.013	-	-	-	-
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	885	-	-	-	-	784.899	-	-	-	-
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	590	-	-	-	-	442.552	-	-	-	-
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	590	-	-	-	-	721.500	-	-	-	-
693296	BALAI BAHASA MALUKU	590	-	-	-	-	378.461	-	-	-	-
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	590	-	-	-	-	557.821	-	-	-	-
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	590	-	-	-	-	336.170	-	-	-	-
	JUMLAH	18.290	-	-	-	-	14.451.244	-	-	-	-

IKK **3.1.4.2 Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas**
Program 138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
Kegiatan 7566- Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah
Klasifikasi Rincian Output 7566.PEG Konferensi dan Event
Rincian Output 7566.PEG.001 Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah
Satuan Kegiatan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	2	2	2	2	2	3.298.808	7.407.000	7.636.617	7.873.352	8.117.426
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	360.820	372.005	383.538	395.427	407.685

693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	1.428.390	1.472.670	1.518.323	1.565.391	1.613.918
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	1.469.614	1.515.172	1.562.142	1.610.569	1.660.496
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	222.532	229.430	236.543	243.876	251.436
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	984.275	1.014.788	1.046.246	1.078.680	1.112.119
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	586.498	604.679	623.425	642.751	662.676
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	790.230	814.727	839.984	866.023	892.870
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	1.319.076	1.359.967	1.402.126	1.445.592	1.490.406
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	1.535.326	1.582.921	1.631.992	1.682.583	1.734.743
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	719.685	741.995	764.997	788.712	813.162
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	707.410	729.340	751.949	775.260	799.293
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	1.090.666	1.124.477	1.159.335	1.195.275	1.232.328
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	634.866	654.547	674.838	695.758	717.326
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	550.459	567.523	585.116	603.255	621.956
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	645.639	665.654	686.289	707.564	729.499
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	1.224.125	1.262.073	1.301.197	1.341.534	1.383.122
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	642.302	662.213	682.742	703.907	725.728
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	1.087.084	1.120.784	1.155.528	1.191.349	1.228.281
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	429.387	442.698	456.422	470.571	485.158
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	992.080	1.022.834	1.054.542	1.087.233	1.120.937
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	547.026	563.984	581.467	599.493	618.077
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	218.522	225.296	232.280	239.481	246.905

693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	582.238	600.287	618.896	638.082	657.863
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	661.290	681.790	702.925	724.716	747.182
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	857.247	883.822	911.220	939.468	968.591
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	864.476	891.275	918.904	947.390	976.759
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	729.569	752.186	775.503	799.544	824.330
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	1.714.127	1.767.265	1.822.050	1.878.534	1.936.768
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	670.995	691.796	713.242	735.352	758.148
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	691.180	712.607	734.697	757.473	780.955
JUMLAH		32	32	32	32	32	28.255.942	33.137.805	34.165.077	35.224.195	36.316.145

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.4.2 Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7566- Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

7566.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

7566.QDC.001 Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	250	252	254	257	262	922.244	950.834	980.309	1.010.699	1.042.031
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	251	255	259	265	275	1.186.269	1.223.043	1.260.958	1.300.047	1.340.349
693269	BALAI BAHASA BALI	241	243	245	248	253	1.247.349	1.286.017	1.325.883	1.366.986	1.409.362
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	243	245	247	250	255	1.092.876	1.126.755	1.161.685	1.197.697	1.234.825
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	251	253	255	258	263	1.276.512	1.316.084	1.356.882	1.398.946	1.442.313
693274	BALAI BAHASA PAPUA	500	512	524	542	572	2.323.706	2.395.741	2.470.009	2.546.579	2.625.523

693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	252	254	256	259	264	1.302.058	1.342.422	1.384.037	1.426.942	1.471.177
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	223	225	227	230	235	744.926	768.019	791.827	816.374	841.682
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	223	225	227	230	235	883.054	910.429	938.652	967.750	997.750
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	251	253	255	258	263	1.002.842	1.033.930	1.065.982	1.099.027	1.133.097
693279	BALAI BAHASA RIAU	234	236	238	241	246	774.927	798.950	823.717	849.252	875.579
693280	BALAI BAHASA ACEH	234	236	238	241	246	505.248	520.911	537.059	553.708	570.873
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	234	236	238	241	246	833.699	859.544	886.190	913.661	941.985
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	234	236	238	241	246	945.919	975.242	1.005.475	1.036.645	1.068.781
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	223	225	227	230	235	1.075.146	1.108.476	1.142.838	1.178.266	1.214.793
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	223	225	227	230	235	1.152.630	1.188.362	1.225.201	1.263.182	1.302.341
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	223	225	227	230	235	1.036.170	1.068.291	1.101.408	1.135.552	1.170.754
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	223	225	227	230	235	1.130.002	1.165.032	1.201.148	1.238.384	1.276.774
693287	BALAI BAHASA JAMBI	250	252	254	257	262	1.230.229	1.268.366	1.307.685	1.348.224	1.390.019
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	260	264	268	274	284	1.070.754	1.103.947	1.138.170	1.173.453	1.209.830
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	240	242	244	247	252	1.235.238	1.273.530	1.313.010	1.353.713	1.395.678
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	233	235	237	240	245	1.212.323	1.249.905	1.288.652	1.328.600	1.369.787
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	283	285	287	290	295	903.779	931.796	960.682	990.463	1.021.167
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	223	225	227	230	235	994.119	1.024.937	1.056.710	1.089.468	1.123.241
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	423	427	431	437	447	1.773.370	1.828.344	1.885.023	1.943.459	2.003.706
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	223	225	227	230	235	1.049.008	1.081.527	1.115.055	1.149.621	1.185.260
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	307	309	311	314	319	1.500.397	1.546.909	1.594.863	1.644.304	1.695.278

693296	BALAI BAHASA MALUKU	260	262	264	267	272	940.421	969.574	999.631	1.030.619	1.062.569
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	229	231	233	236	241	1.049.669	1.082.209	1.115.757	1.150.346	1.186.006
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	297	299	301	304	309	1.505.163	1.551.823	1.599.930	1.649.527	1.700.663
JUMLAH		7.741	7.817	7.893	8.007	8.197	33.900.047	34.950.948	36.034.428	37.151.495	38.303.191

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.4.2 Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7566- Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

7566.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

7566.QDD.001 Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah yang Difasilitasi dan Diapresiasi (Komunitas dan Perseorangan)

Kelompok Masyarakat

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	0	30	35	40	50	0	4.000.000	4.124.000	4.251.844	4.383.651
JUMLAH		0	30	35	40	50	-	4.000.000	4.124.000	4.251.844	4.383.651

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.4.1 Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7566- Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

7566.QMA Data dan Informasi Publik

7566.QMA.002 Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	3	3	3	3	3	3.918.515	5.167.315	5.327.502	5.492.654	5.662.927
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	104.250	158.019	162.918	167.968	173.175
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	102.150	154.836	159.636	164.585	169.687

693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	126.330	191.488	197.424	203.544	209.854
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	147.216	223.146	230.064	237.195	244.549
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	149.232	226.202	233.214	240.444	247.898
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	1.495.620	2.267.021	2.337.299	2.409.755	2.484.457
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	102.090	154.745	159.542	164.488	169.587
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	94.123	145.287	149.791	154.434	159.222
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	98.400	149.152	153.776	158.543	163.458
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	96.240	145.878	150.400	155.063	159.870
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	104.820	158.883	163.808	168.886	174.122
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	99.750	151.198	155.885	160.718	165.700
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	98.847	157.428	162.308	167.340	172.527
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	255.444	387.195	399.198	411.573	424.332
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	316.176	479.251	494.108	509.425	525.217
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	192.480	291.756	300.800	310.125	319.739
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	109.380	165.795	170.935	176.234	181.697
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	153.954	233.359	240.593	248.052	255.741
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	189.750	287.618	296.534	305.727	315.204
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	142.395	218.180	224.944	231.917	239.106
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	114.870	174.117	179.515	185.080	190.817
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	102.360	155.155	159.965	164.924	170.036
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	93.510	141.740	146.134	150.664	155.335
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	96.660	146.515	151.057	155.740	160.568
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	95.550	144.832	149.322	153.951	158.723
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	118.500	179.619	185.187	190.928	196.847

693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	122.940	186.349	192.126	198.082	204.222
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	456.502	1.289.729	1.329.711	1.370.932	1.413.431
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	163.972	440.290	453.939	468.011	482.519
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	410.310	621.937	641.217	661.095	681.589
JUMLAH		33	33	33	33	33	9.872.336	14.994.035	15.458.850	15.938.074	16.432.155

**138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7567 Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia**

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.2.1 Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

7567.BDB.001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan

Lembaga

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	45	-	-	-	-	852.069	548.785	565.797	583.337	601.421
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	50	25	25	25	25	168.011	181.988	187.630	193.446	199.443
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	50	25	25	25	25	167.999	181.903	187.542	193.356	199.350
693269	BALAI BAHASA BALI	50	25	25	25	25	138.771	189.839	195.724	201.791	208.047
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	50	25	25	25	25	167.999	193.687	199.691	205.882	212.264
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	50	25	25	25	25	167.999	216.595	223.309	230.232	237.369
693274	BALAI BAHASA PAPUA	50	25	25	25	25	163.046	236.916	244.260	251.832	259.639
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	50	25	25	25	25	138.747	203.856	210.176	216.691	223.408
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	50	25	25	25	25	195.829	201.056	207.289	213.715	220.340
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	50	25	25	25	25	167.999	195.873	201.945	208.205	214.660
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	50	25	25	25	25	163.873	202.778	209.064	215.545	222.227
693279	BALAI BAHASA RIAU	50	25	25	25	25	167.999	227.943	235.009	242.295	249.806
693280	BALAI BAHASA ACEH	50	25	25	25	25	137.902	202.037	208.300	214.757	221.415
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	50	25	25	25	25	167.999	216.595	223.309	230.232	237.369
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	50	25	25	25	25	184.303	182.104	187.749	193.569	199.570

693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	50	25	25	25	25	131.334	198.651	204.809	211.158	217.704
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	50	25	25	25	25	161.493	212.163	218.740	225.521	232.512
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	50	25	25	25	25	161.529	183.183	188.862	194.716	200.753
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	50	25	25	25	25	167.999	192.461	198.427	204.579	210.920
693287	BALAI BAHASA JAMBI	50	25	25	25	25	167.999	207.187	213.610	220.232	227.059
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	50	25	25	25	25	391.934	231.012	238.173	245.557	253.169
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	50	25	25	25	25	166.675	203.442	209.749	216.251	222.955
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	50	25	25	25	25	167.999	207.816	214.258	220.900	227.748
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50	25	25	25	25	167.999	171.622	176.942	182.427	188.083
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	50	25	25	25	25	167.999	204.094	210.421	216.944	223.669
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	50	25	25	25	25	195.133	202.742	209.027	215.507	222.188
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	50	25	25	25	25	162.531	175.234	180.666	186.267	192.041
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	50	25	25	25	25	142.197	200.083	206.286	212.680	219.274
693296	BALAI BAHASA MALUKU	50	25	25	25	25	163.057	210.191	216.707	223.425	230.351
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	50	25	25	25	25	167.999	212.035	218.608	225.385	232.372
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	50	25	25	25	25	167.999	193.972	199.985	206.185	212.576
JUMLAH		1.545	750	750	750	750	6.002.421	6.587.843	6.792.066	7.002.620	7.219.701

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.2.2 Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

7567.BDB.002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina

Lembaga

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	14	14	14	14	14	140.000	144.340	148.815	153.428	158.184
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	29	29	29	29	29	290.000	298.990	308.259	317.815	327.667
693269	BALAI BAHASA BALI	20	20	20	20	20	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	19	19	19	19	19	190.000	195.890	201.963	208.223	214.678
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	36	36	36	36	36	300.000	309.300	318.888	328.774	338.966
693274	BALAI BAHASA PAPUA	26	26	26	26	26	230.000	237.130	244.481	252.060	259.874
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	12	12	12	12	12	120.000	123.720	127.555	131.510	135.586
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	90	90	90	90	90	573.496	591.274	609.604	628.502	647.985
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	69	69	69	69	69	420.000	433.020	446.444	460.283	474.552
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	39	39	39	39	39	250.000	257.750	265.740	273.978	282.472
693279	BALAI BAHASA RIAU	48	48	48	48	48	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693280	BALAI BAHASA ACEH	44	44	44	44	44	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	33	33	33	33	33	329.075	339.276	349.794	360.638	371.817
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	41	41	41	41	41	330.000	340.230	350.777	361.651	372.862
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	20	20	20	20	20	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	19	19	19	19	19	190.000	195.890	201.963	208.223	214.678
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	34	34	34	34	34	250.000	257.750	265.740	273.978	282.472

693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	39	39	39	39	39	300.000	309.300	318.888	328.774	338.966
693287	BALAI BAHASA JAMBI	23	23	23	23	23	230.000	237.130	244.481	252.060	259.874
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	44	44	44	44	44	427.568	440.823	454.488	468.577	483.103
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	87	87	87	87	87	608.000	626.848	646.280	666.315	686.971
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	18	18	18	18	18	180.000	185.580	191.333	197.264	203.379
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	23	23	23	23	23	230.000	237.130	244.481	252.060	259.874
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	20	20	20	20	20	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	158	158	158	158	158	1.494.343	1.540.668	1.588.428	1.637.670	1.688.437
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	33	33	33	33	33	330.000	340.230	350.777	361.651	372.862
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	45	45	45	45	45	300.000	309.300	318.888	328.774	338.966
693296	BALAI BAHASA MALUKU	37	37	37	37	37	370.000	381.470	393.296	405.488	418.058
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	20	20	20	20	20	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	39	39	39	39	39	390.000	402.090	414.555	427.406	440.656
JUMLAH		1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	9.672.482	9.972.329	10.281.471	10.600.197	10.928.803

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output
Rincian Output
Satuan

3.1.1.2 Persentase Penutur Teruji yang Sesuai Dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
7567.BMA Data dan Informasi Publik
7567.BMA.001 Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun
Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	7	7	7	7	7	2.025.372	2.088.159	2.152.891	2.219.631	2.288.440
JUMLAH		7	7	7	7	7	2.025.372	2.088.159	2.152.891	2.219.631	2.288.440

IKK **3.1.1.3 Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya**
 Program 138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
 Kegiatan 7567- Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
 Klasifikasi Rincian *Output* 7567.PEG Konferensi dan *Event*
 Rincian *Output* 7567.PEG.001 Perhelatan Karya Kreatif Pembinaan Bahasa dan Sastra
 Satuan Kegiatan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	4	4	4	4	4	6.824.887	7.036.458	7.254.589	7.479.481	7.711.345
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	4	4	4	4	4	252.363	260.186	268.252	276.568	285.141
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	4	4	4	4	4	694.797	716.336	738.542	761.437	785.041
693269	BALAI BAHASA BALI	4	4	4	4	4	451.118	465.103	479.521	494.386	509.712
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	4	4	4	4	4	403.289	415.791	428.680	441.970	455.671
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	4	4	4	4	4	462.690	477.033	491.821	507.068	522.787
693274	BALAI BAHASA PAPUA	4	4	4	4	4	1.556.288	1.604.533	1.654.273	1.705.556	1.758.428
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	4	4	4	4	4	493.837	509.146	524.929	541.202	557.980
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	4	4	4	4	4	499.024	514.494	530.443	546.887	563.840
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	4	4	4	4	4	598.499	617.052	636.181	655.903	676.236
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	4	4	4	4	4	565.494	583.024	601.098	619.732	638.944
693279	BALAI BAHASA RIAU	4	4	4	4	4	525.427	541.715	558.508	575.822	593.673
693280	BALAI BAHASA ACEH	4	4	4	4	4	322.074	332.058	342.352	352.965	363.907
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	4	4	4	4	4	480.937	495.846	511.217	527.065	543.404
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	4	4	4	4	4	494.922	510.265	526.083	542.391	559.205

693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	4	4	4	4	4	476.500	491.272	506.501	522.202	538.391
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	4	4	4	4	349.434	360.266	371.435	382.949	394.821
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	4	4	4	4	4	590.014	608.304	627.162	646.604	666.649
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	4	4	4	4	4	435.950	449.464	463.398	477.763	492.574
693287	BALAI BAHASA JAMBI	4	4	4	4	4	358.460	369.572	381.029	392.841	405.019
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	4	4	4	4	4	227.994	235.062	242.349	249.862	257.607
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	3	4	4	4	4	614.370	633.415	653.051	673.296	694.168
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	4	4	4	4	4	540.983	557.753	575.044	592.870	611.249
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	4	4	4	4	306.773	316.283	326.088	336.196	346.619
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	4	4	4	4	4	399.760	412.153	424.929	438.102	451.683
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	4	4	4	4	4	594.922	613.365	632.379	651.983	672.194
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	4	4	4	4	4	496.678	512.075	527.949	544.316	561.190
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	3	4	4	4	4	453.917	467.988	482.496	497.453	512.875
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	4	4	4	4	479.092	493.944	509.256	525.043	541.319
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	4	4	4	4	4	280.668	289.369	298.339	307.588	317.123
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	3	4	4	4	4	488.367	503.506	519.115	535.208	551.799
JUMLAH		115	124	124	124	124	21.719.528	22.392.833	23.087.011	23.802.709	24.540.593

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.3 Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

7567.QDC.001 Penutur Bahasa Terbina

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	275	175	175	175	175	319.784	329.697	339.918	350.455	361.319
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	275	175	175	175	175	247.240	254.904	262.806	270.953	279.353
693269	BALAI BAHASA BALI	275	175	175	175	175	348.171	358.964	370.092	381.565	393.394
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	275	175	175	175	175	363.850	375.129	386.758	398.748	411.109
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	275	175	175	175	175	278.570	287.206	296.109	305.288	314.752
693274	BALAI BAHASA PAPUA	275	175	175	175	175	706.460	728.360	750.939	774.219	798.219
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	275	175	175	175	175	485.900	500.963	516.493	532.504	549.012
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	275	175	175	175	175	541.506	558.293	575.600	593.443	611.840
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	275	175	175	175	175	345.806	356.526	367.578	378.973	390.721
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	275	175	175	175	175	546.832	563.784	581.261	599.280	617.858
693279	BALAI BAHASA RIAU	275	175	175	175	175	249.209	256.934	264.899	273.111	281.578
693280	BALAI BAHASA ACEH	275	175	175	175	175	469.399	483.950	498.953	514.420	530.367
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	275	175	175	175	175	345.595	356.308	367.354	378.742	390.483
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	275	175	175	175	175	283.076	291.851	300.899	310.227	319.844
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	275	175	175	175	175	304.425	313.862	323.592	333.623	343.966

693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	275	175	175	175	175	696.809	718.410	740.681	763.642	787.315
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	275	175	175	175	175	280.240	288.927	297.884	307.119	316.639
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	275	175	175	175	175	351.290	362.180	373.408	384.983	396.918
693287	BALAI BAHASA JAMBI	275	175	175	175	175	293.881	302.991	312.384	322.068	332.052
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	275	175	175	175	175	559.142	576.475	594.346	612.771	631.767
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	275	175	175	175	175	270.228	278.605	287.242	296.146	305.327
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	275	175	175	175	175	424.087	437.234	450.788	464.762	479.170
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	275	175	175	175	175	231.105	238.269	245.656	253.271	261.122
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	275	175	175	175	175	278.502	287.136	296.037	305.214	314.676
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	275	175	175	175	175	545.624	562.538	579.977	597.956	616.493
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	275	175	175	175	175	245.855	253.477	261.334	269.436	277.788
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	275	175	175	175	175	375.976	387.631	399.648	412.037	424.810
693296	BALAI BAHASA MALUKU	275	175	175	175	175	437.234	450.788	464.763	479.170	494.025
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	275	175	175	175	175	633.383	653.018	673.261	694.133	715.651
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	275	175	175	175	175	397.770	410.101	422.814	435.921	449.435
JUMLAH		8.250	5.250	5.250	5.250	5.250	11.856.949	12.224.514	12.603.474	12.994.182	13.397.002

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.2 Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

7567.QDC.002 Penutur Bahasa Teruji

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	115	116	117	118	120	1.794.801	1.850.440	1.907.803	1.966.945	2.027.921
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	3.630	3.666	3.703	3.740	3.777	152.548	157.277	162.153	167.179	172.362
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	10.709	10.816	10.924	11.033	11.144	245.000	252.595	260.425	268.499	276.822
693269	BALAI BAHASA BALI	5.274	5.327	5.380	5.434	5.488	308.167	317.720	327.570	337.724	348.194
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	2.954	2.984	3.013	3.044	3.074	264.000	272.184	280.622	289.321	298.290
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	834	842	851	859	868	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693274	BALAI BAHASA PAPUA	8.029	8.109	8.190	8.272	8.355	864.178	890.968	918.588	947.064	976.423
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	20.819	21.027	21.237	21.450	21.664	527.650	544.007	560.871	578.258	596.184
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	15.900	16.059	16.220	16.382	16.546	275.000	283.525	292.314	301.376	310.719
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	16.300	16.463	16.628	16.794	16.962	274.093	282.590	291.350	300.382	309.694
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	9.243	9.335	9.429	9.523	9.618	370.000	381.470	393.296	405.488	418.058

693279	BALAI BAHASA RIAU	5.242	5.294	5.347	5.401	5.455	168.000	173.208	178.577	184.113	189.821
693280	BALAI BAHASA ACEH	1.996	2.016	2.036	2.056	2.077	374.880	386.501	398.483	410.836	423.572
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	3.897	3.936	3.975	4.015	4.055	274.880	283.401	292.187	301.245	310.583
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	2.806	2.834	2.862	2.891	2.920	199.500	205.685	212.061	218.635	225.412
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1.485	1.500	1.515	1.530	1.545	216.137	222.837	229.745	236.867	244.210
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1.386	1.400	1.414	1.428	1.442	183.800	189.498	195.372	201.429	207.673
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	4.546	4.591	4.637	4.684	4.731	200.820	207.045	213.464	220.081	226.904
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	4.390	4.434	4.478	4.523	4.568	241.034	248.506	256.210	264.152	272.341
693287	BALAI BAHASA JAMBI	2.087	2.108	2.129	2.150	2.172	382.470	394.327	406.551	419.154	432.148
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	6.834	6.902	6.971	7.041	7.111	394.020	406.235	418.828	431.812	445.198
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	8.037	8.117	8.199	8.281	8.363	350.000	360.850	372.036	383.569	395.460
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1.362	1.376	1.389	1.403	1.417	200.000	206.200	212.592	219.183	225.977
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8.830	8.918	9.007	9.098	9.189	121.000	124.751	128.618	132.605	136.716
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	2.896	2.925	2.954	2.984	3.014	318.930	328.817	339.010	349.519	360.355

693293	KANTOR BAHASA BANTEN	29.316	29.609	29.905	30.204	30.506	529.764	546.187	563.118	580.575	598.573
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	628	634	641	647	653	241.551	249.039	256.759	264.719	272.925
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	714	721	728	736	743	115.000	118.565	122.241	126.030	129.937
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1.406	1.420	1.434	1.449	1.463	111.255	114.704	118.260	121.926	125.705
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	2.694	2.721	2.748	2.776	2.803	230.575	237.723	245.092	252.690	260.523
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	2.210	2.232	2.254	2.277	2.300	143.473	147.921	152.506	157.234	162.108
JUMLAH		186.569	188.432	190.315	192.223	194.143	10.272.526	10.590.974	10.919.295	11.257.793	11.606.784

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.3 Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

7567.QDC.003 Generasi Muda Terbina Program Literasi

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
				2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	-	590	590	590	590	-	191.005	196.926	203.031	209.325
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	-	590	590	590	590	-	142.393	146.807	151.358	156.050
693269	BALAI BAHASA BALI	-	590	590	590	590	-	178.678	184.217	189.928	195.816
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	-	590	590	590	590	-	187.011	192.808	198.785	204.948
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	-	590	590	590	590	-	217.109	223.839	230.778	237.933
693274	BALAI BAHASA PAPUA	-	590	590	590	590	-	244.162	251.731	259.535	267.580

693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	-	590	590	590	590	-	225.466	232.455	239.662	247.091
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	-	590	590	590	590	-	194.244	200.266	206.474	212.874
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	-	590	590	590	590	-	227.484	234.536	241.807	249.303
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	-	590	590	590	590	-	193.880	199.890	206.087	212.476
693279	BALAI BAHASA RIAU	-	590	590	590	590	-	228.601	235.688	242.994	250.527
693280	BALAI BAHASA ACEH	-	590	590	590	590	-	189.481	195.355	201.411	207.655
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	-	590	590	590	590	-	131.120	135.185	139.375	143.696
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	-	590	590	590	590	-	139.654	143.983	148.447	153.049
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	-	590	590	590	590	-	138.618	142.915	147.346	151.913
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	-	590	590	590	590	-	213.322	219.935	226.753	233.782
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	-	590	590	590	590	-	211.861	218.429	225.200	232.181
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	-	590	590	590	590	-	182.702	188.366	194.205	200.225
693287	BALAI BAHASA JAMBI	-	590	590	590	590	-	190.388	196.290	202.375	208.649
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	-	590	590	590	590	-	206.878	213.291	219.903	226.720
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	-	590	590	590	590	-	216.815	223.536	230.466	237.610
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	-	590	590	590	590	-	221.769	228.644	235.732	243.039
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	570	570	570	570	-	198.981	205.149	211.509	218.066
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	-	590	590	590	590	-	235.740	243.048	250.582	258.350
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	-	885	885	885	885	-	242.378	249.892	257.638	265.625
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	-	590	590	590	590	-	204.936	211.289	217.839	224.592
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	-	590	590	590	590	-	240.055	247.497	255.169	263.079
693296	BALAI BAHASA MALUKU	-	590	590	590	590	-	222.776	229.682	236.802	244.143

693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	-	590	590	590	590	-	194.121	200.139	206.343	212.740
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	-	590	590	590	590	-	188.372	194.212	200.232	206.439
JUMLAH		-	17.975	17.975	17.975	17.975	-	6.000.000	6.186.000	6.377.766	6.575.477

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

3.1.2.2 Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
7567.QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
7567.QDD.001 Komunitas Literasi yang Difasilitasi dan Diapresiasi
Kelompok Masyarakat

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	100	100	100	100	100	5.736.764	6.086.569	6.275.253	6.469.785	6.670.349
JUMLAH		100	100	100	100	100	5.736.764	6.086.569	6.275.253	6.469.785	6.670.349

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

3.1.2.2 Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
7567.QDD. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
7567.QDD.002 Komunitas Sastra yang Difasilitasi dan Diapresiasi
Kelompok Masyarakat

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	100	100	100	100	100	6.513.236	6.715.146	6.923.316	7.137.939	7.359.215
JUMLAH		100	100	100	100	100	6.513.236	6.715.146	6.923.316	7.137.939	7.359.215

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.3.1 Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QMA. Data dan Informasi Publik

7567.QMA.003 Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	2	2	2	2	2	692.399	714.550	736.701	759.539	783.084
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	193.194	199.375	205.556	211.928	218.498
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	195.732	201.994	208.256	214.712	221.368
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	206.065	212.657	219.249	226.046	233.054
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	171.368	176.850	182.332	187.985	193.812
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	185.301	191.229	197.157	203.269	209.570
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	193.904	200.107	206.310	212.706	219.300
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	182.549	188.389	194.229	200.250	206.458
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	205.946	212.535	219.124	225.916	232.920
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	209.258	215.953	222.648	229.550	236.666
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	243.228	251.009	258.790	266.813	275.084
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	172.949	178.482	184.015	189.719	195.601

693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	187.545	193.545	199.545	205.731	212.108
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	162.151	167.339	172.527	177.875	183.389
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	218.055	225.031	232.007	239.199	246.614
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	225.508	232.722	239.936	247.374	255.043
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	179.211	184.944	190.677	196.588	202.682
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	187.034	193.018	199.002	205.171	211.531
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	178.400	184.107	189.814	195.699	201.765
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	2	1	1	1	1	209.109	215.799	222.489	229.386	236.497
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	203.940	210.464	216.988	223.715	230.650
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	229.313	236.649	243.985	251.549	259.347
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	239.926	247.602	255.278	263.191	271.350
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	205.620	212.198	218.776	225.558	232.551
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	202.889	209.380	215.871	222.563	229.462
JUMLAH		32	32	32	32	32	6.453.500	6.659.962	6.866.421	7.079.280	6.453.500

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.3.1 Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7567- Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

7567.QMA. Data dan Informasi Publik

7567.QMA.004 Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	8	9	9	10	10	12.762.050	13.157.674	13.565.561	13.986.094	14.419.663

693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	2	2	2	2	2	164.000	169.084	174.326	179.730	185.301
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	3	3	3	3	3	150.000	154.650	159.444	164.387	169.483
693269	BALAI BAHASA BALI	2	2	2	2	2	168.613	173.840	179.229	184.785	190.513
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	2	2	2	2	2	141.536	145.924	150.447	155.111	159.920
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	2	2	2	2	2	153.735	158.501	163.414	168.480	173.703
693274	BALAI BAHASA PAPUA	4	4	4	4	4	298.123	307.365	316.893	326.717	336.845
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	2	2	2	2	2	145.680	150.196	154.852	159.653	164.602
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	2	2	2	2	2	156.513	161.365	166.367	171.525	176.842
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	2	2	2	2	2	154.773	159.571	164.518	169.618	174.876
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	2	2	2	2	2	222.000	228.882	235.977	243.293	250.835
693279	BALAI BAHASA RIAU	2	2	2	2	2	150.625	155.294	160.109	165.072	170.189
693280	BALAI BAHASA ACEH	2	2	2	2	2	155.120	159.929	164.887	169.998	175.268
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	2	2	2	2	2	157.890	162.785	167.831	173.034	178.398
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	2	2	2	2	2	217.189	223.922	230.863	238.020	245.399
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	2	2	2	2	2	183.462	189.149	195.013	201.058	207.291
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	2	2	2	2	2	234.930	242.213	249.721	257.463	265.444
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	3	3	3	3	3	222.692	229.595	236.713	244.051	251.617
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	2	2	2	2	2	145.843	150.364	155.025	159.831	164.786
693287	BALAI BAHASA JAMBI	3	3	3	3	3	227.353	234.401	241.667	249.159	256.883
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	3	3	3	3	3	191.344	197.276	203.391	209.696	216.197
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	2	2	2	2	2	145.365	149.871	154.517	159.307	164.246

693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	3	3	3	3	3	233.176	240.404	247.857	255.541	263.462
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	2	2	2	2	146.677	151.224	155.912	160.745	165.728
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	3	3	3	3	3	258.236	266.241	274.495	283.004	291.777
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	2	2	2	2	2	144.951	149.444	154.077	158.854	163.778
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	3	3	3	3	3	232.270	239.470	246.894	254.548	262.439
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	4	4	4	4	4	313.731	323.457	333.484	343.822	354.480
693296	BALAI BAHASA MALUKU	3	3	3	3	3	152.816	157.553	162.437	167.473	172.665
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	3	3	3	3	3	225.629	232.623	239.835	247.270	254.935
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	2	2	2	2	2	249.500	257.235	265.209	273.430	281.907
JUMLAH		81	82	82	83	83	18.505.822	19.079.502	19.670.967	20.280.767	20.909.471

**138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7568 Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia**

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

3.2.2.1 Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
7568.BDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
7568.BDC.001 Sastrawan Berkarya di Mancanegara
Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	2	5	5	8	10	403.967	3.126.529	3.223.451	3.323.378	3.426.403
JUMLAH		2	5	5	8	10	403.967	3.126.529	3.223.451	3.323.378	3.426.403

IKK

Program
Kegiatan
Klasifikasi Rincian *Output*
Rincian *Output*
Satuan

3.2.2.1 Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
7568.BMA. Data dan Informasi Publik
7568.BMA.002 Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan
Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	25	32	38	44	50	402.720	1.412.475	1.456.262	1.501.406	1.547.949
JUMLAH		25	32	38	44	50	402.720	1.412.475	1.456.262	1.501.406	1.547.949

IKK

Program
 Kegiatan
 Klasifikasi Rincian *Output*
 Rincian *Output*
 Satuan

3.2.1.1 Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luar Negeri)

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
 7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
 7568.BMA. Data dan Informasi Publik
 7568.BMA.003 Bahan Fasilitasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
 Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	4	4	4	4	4	1.930.680	1.990.531	2.052.238	2.115.857	2.181.448
JUMLAH		4	4	4	4	4	1.930.680	1.990.531	2.052.238	2.115.857	2.181.448

IKK

Program
 Kegiatan
 Klasifikasi Rincian *Output*
 Rincian *Output*
 Satuan

3.2.1.1 Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indoneisa bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luar Negeri)

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
 7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia
 7568.PEG. Konferensi dan Event
 7568.PEG.001 Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan
 Kegiatan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	1.406.200	1.449.792	1.494.736	1.541.073	1.588.846
JUMLAH		1	1	1	1	1	1.406.200	1.449.792	1.494.736	1.541.073	1.588.846

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.2.1.1 Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Luar Negeri)

138.DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

7568- Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia

7568.QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

7568.QDB.001 Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Lembaga

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	129	129	130	131	132	19.102.825	19.695.013	20.305.558	20.935.030	21.584.016
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	12	12	13	14	15	128.109	132.080	136.175	140.396	144.749
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693269	BALAI BAHASA BALI	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	12	12	13	14	15	128.108	132.079	136.174	140.395	144.747
693274	BALAI BAHASA PAPUA	12	12	13	14	15	128.107	132.078	136.173	140.394	144.746
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	12	12	13	14	15	128.109	132.080	136.175	140.396	144.749
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	12	12	13	14	15	128.109	132.080	136.175	140.396	144.749
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	12	12	13	14	15	128.108	132.079	136.174	140.395	144.747
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	6	6	7	8	9	68.483	70.606	72.795	75.051	77.378
693279	BALAI BAHASA RIAU	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693280	BALAI BAHASA ACEH	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	6	6	7	8	9	65.801	67.841	69.944	72.112	74.348
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	6	6	7	8	9	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380

693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	6	6	7	8	9	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	9	9	10	11	12	98.295	101.342	104.484	107.723	111.062
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	9	9	10	11	12	98.297	101.344	104.486	107.725	111.064
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693287	BALAI BAHASA JAMBI	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	6	6	7	8	9	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	6	6	7	8	9	68.485	70.608	72.797	75.054	77.380
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	6	6	7	8	9	68.483	70.606	72.795	75.051	77.378
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	12	12	13	14	15	128.109	132.080	136.175	140.396	144.749
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	6	6	7	8	9	68.484	70.607	72.796	75.052	77.379
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	12	12	13	14	15	128.108	132.079	136.174	140.395	144.747
693296	BALAI BAHASA MALUKU	9	9	10	11	12	98.296	101.343	104.485	107.724	111.063
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	9	9	10	11	12	98.295	101.342	104.484	107.723	111.062
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	9	9	10	11	12	98.297	101.344	104.486	107.725	111.064
JUMLAH		387	387	418	449	480	21.929.779	22.609.602	23.310.500	24.033.125	24.778.152

138.WA - Program Dukungan Manajemen

7613 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.956 Layanan BMN

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	26	26	26	26	26	1.799.091	1.854.863	1.912.364	1.971.647	2.032.768
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	9.220	9.506	9.801	10.104	10.418
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299

693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	10.000	10.310	10.630	10.959	11.299
JUMLAH		42	38	38	38	38	2.129.091	2.195.093	2.263.141	2.333.298	2.405.630

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	11	11	11	11	11	3.628.709	3.741.199	3.857.176	3.976.749	4.100.028
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	333.215	343.545	354.195	365.175	376.495
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	257.600	265.586	273.819	282.307	291.059
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	49.420	50.952	52.532	54.160	55.839
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	255.970	263.905	272.086	280.521	289.217
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	165.560	170.692	175.984	181.439	187.064
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	165.734	170.872	176.169	181.630	187.261
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	185.395	191.142	197.068	203.177	209.475
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	250.630	258.400	266.410	274.669	283.183
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	279.744	288.416	297.357	306.575	316.079
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	244.080	251.646	259.448	267.490	275.783
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	258.150	266.153	274.403	282.910	291.680

693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	175.550	180.992	186.603	192.387	198.352
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	163.510	168.579	173.805	179.193	184.748
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	150.000	154.650	159.444	164.387	169.483
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	242.130	249.636	257.375	265.353	273.579
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	251.269	259.058	267.089	275.369	283.905
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	233.572	240.813	248.278	255.975	263.910
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	210.168	216.683	223.400	230.326	237.466
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	227.250	234.295	241.558	249.046	256.767
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	352.485	363.412	374.678	386.293	398.268
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	164.798	169.907	175.174	180.604	186.203
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	216.578	223.292	230.214	237.351	244.708
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	286.881	295.774	304.943	314.397	324.143
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	288.596	297.542	306.766	316.276	326.081
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	147.155	151.717	156.420	161.269	166.268
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	269.621	277.979	286.597	295.481	304.641
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	195.694	201.761	208.015	214.464	221.112
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	224.869	231.840	239.027	246.437	254.076
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	224.230	231.181	238.348	245.737	253.354

693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	243.840	251.399	259.192	267.227	275.511
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	110.175	113.590	117.112	120.742	124.485
JUMLAH		42	42	42	42	42	10.452.578	10.776.608	11.110.683	11.455.114	11.810.222

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.959 Layanan Protokoler

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	450.319	464.279	478.672	493.510	508.809
JUMLAH		1	1	1	1	1	450.319	464.279	478.672	493.510	508.809

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	1.150.449	1.186.113	1.222.882	1.260.792	1.299.876

693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	185.256	190.999	196.920	203.024	209.318
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	130.036	134.067	138.223	142.508	146.926
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	424.616	437.779	451.350	465.342	479.768
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	101.300	104.440	107.678	111.016	114.457
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	85.718	88.375	91.115	93.939	96.852
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	127.514	131.467	135.542	139.744	144.076
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	32.983	34.005	35.060	36.146	37.267
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	32.468	33.475	34.512	35.582	36.685
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	43.125	44.462	45.840	47.261	48.726
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	87.218	89.922	92.709	95.583	98.546
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	48.932	50.449	52.013	53.625	55.288
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	26.676	27.503	28.356	29.235	30.141
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	24.200	24.950	25.724	26.521	27.343
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	39.750	40.982	42.253	43.563	44.913
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	78.662	81.101	83.615	86.207	88.879
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	58.440	60.252	62.119	64.045	66.031
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	41.740	43.034	44.368	45.743	47.161
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	192.126	198.082	204.222	210.553	217.080
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	192.913	198.893	205.059	211.416	217.970
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	34.700	35.776	36.885	38.028	39.207
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	69.486	71.640	73.861	76.151	78.511
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	37.660	38.827	40.031	41.272	42.552
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	115.782	119.371	123.072	126.887	130.820

693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	60.390	62.262	64.192	66.182	68.234
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	102.801	105.988	109.273	112.661	116.153
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	216.000	222.696	229.600	236.717	244.055
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	235.957	243.272	250.813	258.588	266.605
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	429.593	442.910	456.641	470.796	485.391
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	96.369	99.356	102.436	105.612	108.886
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	83.963	86.566	89.249	92.016	94.869
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	96.519	99.511	102.596	105.776	109.055
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	52.752	54.387	56.073	57.812	59.604
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	92.392	95.256	98.209	101.254	104.392
JUMLAH		34	34	34	34	34	4.828.486	4.978.169	5.132.492	5.291.600	5.455.639

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.962 Layanan Umum

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	899.523	927.408	956.158	985.799	1.016.359
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	739.699	762.630	786.271	810.646	835.776
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	664.634	685.238	706.480	728.381	750.961

693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	812.728	837.923	863.898	890.679	918.290
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	337.008	347.455	358.226	369.331	380.781
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	241.213	248.691	256.400	264.348	272.543
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	272.871	281.330	290.051	299.043	308.313
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	231.950	239.140	246.554	254.197	262.077
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	233.165	240.393	247.845	255.529	263.450
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	290.196	299.192	308.467	318.030	327.888
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	245.906	253.529	261.388	269.492	277.846
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	297.233	306.447	315.947	325.741	335.839
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	235.836	243.147	250.684	258.456	266.468
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	241.274	248.753	256.465	264.415	272.612
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	387.954	399.981	412.380	425.164	438.344
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	263.877	272.057	280.491	289.186	298.151
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	278.985	287.634	296.550	305.743	315.221
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	294.307	303.431	312.837	322.535	332.533
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	404.989	417.544	430.488	443.833	457.591
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	233.211	240.441	247.894	255.579	263.502
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	171.718	177.041	182.530	188.188	194.022
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	248.811	256.524	264.476	272.675	281.128
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	134.880	139.061	143.372	147.817	152.399
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	239.135	246.548	254.191	262.071	270.195
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	182.857	188.526	194.370	200.395	206.608

693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	222.213	229.102	236.204	243.526	251.075
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	316.579	326.393	336.511	346.943	357.698
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	421.224	434.282	447.745	461.625	475.935
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	231.481	238.657	246.055	253.683	261.547
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	105.000	108.255	111.611	115.071	118.638
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	225.443	232.432	239.637	247.066	254.725
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	250.545	258.312	266.320	274.575	283.087
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	113.369	116.883	120.507	124.243	128.094
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	78.811	81.254	83.773	86.370	89.047
JUMLAH		34	34	34	34	34	10.548.625	10.875.632	11.212.777	11.560.373	11.918.745

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Minimal A

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.963 Layanan Data dan Informasi

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	808.897	756.666	780.123	804.306	829.240
JUMLAH		1	1	1	1	1	808.897	756.666	780.123	804.306	829.240

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

7613.EBA.994 Layanan Perkantoran

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	108.312.779	111.670.475	115.132.260	118.701.360	122.381.102
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.098.763	10.411.825	10.734.591	11.067.364	11.410.452
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	6.406.394	6.604.992	6.809.747	7.020.849	7.238.495
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	10.112.671	10.426.164	10.749.375	11.082.606	11.426.166
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	4.454.783	4.592.881	4.735.261	4.882.054	5.033.397
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	3.947.778	4.070.159	4.196.334	4.326.420	4.460.539
693269	BALAI BAHASA BALI	1	1	1	1	1	4.067.071	4.193.150	4.323.138	4.457.155	4.595.327
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	3.910.675	4.031.906	4.156.895	4.285.759	4.418.617
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	3.900.000	4.020.900	4.145.548	4.274.060	4.406.556
693274	BALAI BAHASA PAPUA	1	1	1	1	1	4.218.710	4.349.490	4.484.324	4.623.338	4.766.662
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	6.033.809	6.220.857	6.413.704	6.612.528	6.817.517
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	1	1	1	1	4.643.135	4.787.072	4.935.471	5.088.471	5.246.214

693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	7.595.180	7.830.631	8.073.380	8.323.655	8.581.688
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	4.452.900	4.590.940	4.733.259	4.879.990	5.031.270
693279	BALAI BAHASA RIAU	1	1	1	1	1	5.309.349	5.473.939	5.643.631	5.818.583	5.998.960
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	4.521.863	4.662.041	4.806.564	4.955.568	5.109.190
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	4.489.022	4.628.182	4.771.655	4.919.577	5.072.084
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	3.571.787	3.682.512	3.796.670	3.914.367	4.035.712
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	2.756.138	2.841.578	2.929.667	3.020.487	3.114.122
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	3.698.435	3.813.086	3.931.292	4.053.162	4.178.810
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	2.822.574	2.910.074	3.000.286	3.093.295	3.189.187
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	1	1	1	1	1	3.527.257	3.636.602	3.749.337	3.865.566	3.985.399
693287	BALAI BAHASA JAMBI	1	1	1	1	1	3.668.001	3.781.709	3.898.942	4.019.809	4.144.423
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	3.432.040	3.538.433	3.648.125	3.761.217	3.877.814
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	3.802.701	3.920.585	4.042.123	4.167.429	4.296.619
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	3.413.423	3.519.239	3.628.336	3.740.814	3.856.779
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	1	1	1	1	1.905.000	1.964.055	2.024.941	2.087.714	2.152.433
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	1	1	1	1	1	2.288.961	2.359.919	2.433.076	2.508.502	2.586.265
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	1	1	1	1	1	2.601.603	2.682.253	2.765.403	2.851.130	2.939.515
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	1	1	1	1	2.818.930	2.906.317	2.996.413	3.089.301	3.185.070

693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	1	1	1	1	1	2.507.766	2.585.507	2.665.657	2.748.293	2.833.490
693296	BALAI BAHASA MALUKU	1	1	1	1	1	3.793.309	3.910.902	4.032.140	4.157.136	4.286.007
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	1	1	1	1	1.796.934	1.852.639	1.910.071	1.969.283	2.030.331
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	2.014.792	2.077.251	2.141.645	2.208.036	2.276.485
JUMLAH		34	34	34	34	34	246.894.533	254.548.264	262.439.260	270.574.877	278.962.698

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

7613.EBB.951 Layanan Sarana Internal

Unit

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	1	0				538.154	
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	1	0	0	0	865.338	326.334			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1	0	0	0	0	570.400				
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			650.000		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	1					670.000
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	10	0	0	0		128.888			
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			397.179		

7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	34	0	0	0		497.002			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	1		60.000			560.337
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	36	0	0	0		622.154			
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					422.257
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	51	0	0	0		335.738			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	50	0	0	0		687.000			
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			452.556		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	13	0	0	0		157.735			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693269	BALAI BAHASA BALI										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			650.000		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	23	0	0	0		229.631			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	1	0	0	0		62.400			
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					401.040
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	1					560.000

7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	1	0				680.000	
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					446.355
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	1	0	0			250.000		
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	2	1	0	0		36.000	780.000		
693274	BALAI BAHASA PAPUA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	1	0				564.390	
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	1	0	0			870.000		
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	9	0	0	0		199.594			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	13	0	0	0		686.991			
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	1	0				397.179	
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	4	0	0	0		19.000			
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	1	0	0			450.000		
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	1	0	0			250.000		
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA										

7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					402.522
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	50	0	0	0		250.000			
693279	BALAI BAHASA RIAU										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	20	0	0	0		168.902			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	23	0	0	0		297.000			
693280	BALAI BAHASA ACEH										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					401.541
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	50	0	0	0		316.102			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	155	0	0	0		547.680			
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					516.336
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	38	0	0	0		360.324			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	50	0	0	0		687.793			
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					593.776
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	15	0	0	0		443.657			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	6	0	0	0		278.816			
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					569.091

7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	7	0	0	0		445.482			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	3	0	0	0		139.085			
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	0		431.180			
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	123	0	0	0		325.507			
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			514.131		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	0		400.000			
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	20	0	0	0		259.307			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693287	BALAI BAHASA JAMBI										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	0		423.851			
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	43	0	0	0		224.105			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	2	0	0	0		28.632			

7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	86		0	0		408.424			
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	1	0	0	0		403.789			
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	12	0	0	0		231.228			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	6	0	0	0		100.899			
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	1	0	0	0	0	437.198				
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	74	0	0	0		681.150			
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			431.977		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	78	0	0	0		209.328			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	100	0	0	0		681.000			
693292	BALAI BAHASA BENGKULU										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	105	0	0	0		470.000			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	70	0	0	0		322.500			
693293	KANTOR BAHASA BANTEN										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					504.438
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	1	0	0	0		486.539			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	1	0	0	0		370.181			
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO										

7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					545.823
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	5	0	0	0		245.511			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	35	0	0	0		567.900			
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			432.789		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	40	0	0	0		493.456			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	6	0	0	0		100.000			
693296	BALAI BAHASA MALUKU										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	0	1					585.988
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	1	0	0			375.725		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0	0	0	0					
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0	0					
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR										
7613.EBB.951.995	Pengadaan Kendaraan	0	0	0	1	0			460.155		
7613.EBB.951.996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	3	0	0	0		46.095			
7613.EBB.951.997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	0	2	1	0	0		35.000	1.500.000		
JUMLAH		3	1481	14	5	14	1.872.936	15.928.890	8.464.512	2.179.723	7.179.504

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

7613.EBB.971 Layanan Prasarana Internal

Unit

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	1	0	0	0	1	66.138				4.500.000
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	0	1	0				450.000	
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	1	0	0	0		3.301.724			
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	1	0	0			1.300.000		
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	0	0	1					5.600.000
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	1	0	0	0		8.700.000			
693279	BALAI BAHASA RIAU										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	0	1	0				35.000.000	
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	0	0	1					6.700.000

693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	0	1	0	0			15.000.000		
693292	BALAI BAHASA BENGKULU										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	0	1	0	0	0		30.000			
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR										
7613.EBB.971.998	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	1	0	1	0	0	77.700		30.000.000		
JUMLAH		2	3	3	2	3	143.838	12.031.724	46.300.000	35.450.000	16.800.000

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal

7613.EBC.954 Layanan Manajemen SDM

Orang

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	909	909	909	909	5.945.646	6.129.961	6.319.990	6.515.910	6.717.903
JUMLAH		1	909	909	909	909	5.945.646	6.129.961	6.319.990	6.515.910	6.717.903

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	9	9	9	9	9	4.906.619	5.058.724	5.215.545	5.377.227	5.543.921
JUMLAH		9	9	9	9	9	4.906.619	5.058.724	5.215.545	5.377.227	5.543.921

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	8	8	8	8	8	1.759.666	1.814.216	1.870.456	1.928.440	1.988.222
JUMLAH		8	8	8	8	8	1.759.666	1.814.216	1.870.456	1.928.440	1.988.222

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.954 Layanan Manajemen Keuangan

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	7	3	3	3	3	2.273.819	2.344.307	2.416.981	2.491.907	2.569.156
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	17	8	8	8	8	331.595	341.874	352.473	363.399	374.665
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	22	8	8	8	8	399.592	411.979	424.751	437.918	451.493
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	16	8	8	8	8	230.762	237.916	245.291	252.895	260.735
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	3	6	6	6	6	51.288	52.878	54.517	56.207	57.950
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	8	6	6	6	6	154.428	159.215	164.151	169.240	174.486
693269	BALAI BAHASA BALI	8	6	6	6	6	145.790	150.309	154.969	159.773	164.726
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	2	6	6	6	6	141.699	146.092	150.621	155.290	160.104
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	7	6	6	6	6	132.948	137.069	141.319	145.699	150.216
693274	BALAI BAHASA PAPUA	10	6	6	6	6	152.390	157.114	161.985	167.006	172.183
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	5	6	6	6	6	79.032	81.482	84.008	86.612	89.297
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	7	6	6	6	6	126.158	130.069	134.101	138.258	142.544

693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	7	6	6	6	6	129.132	133.135	137.262	141.517	145.904
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	12	6	6	6	6	224.716	231.682	238.864	246.269	253.903
693279	BALAI BAHASA RIAU	3	6	6	6	6	54.573	56.265	58.009	59.807	61.661
693280	BALAI BAHASA ACEH	5	6	6	6	6	92.500	95.368	98.324	101.372	104.514
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	6	6	6	6	6	111.515	114.972	118.536	122.211	125.999
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	4	6	6	6	6	61.902	63.821	65.799	67.839	69.942
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	4	6	6	6	6	72.570	74.820	77.139	79.530	81.996
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	5	6	6	6	6	79.099	81.551	84.079	86.686	89.373
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	9	6	6	6	6	147.842	152.425	157.150	162.022	167.045
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	5	6	6	6	6	94.702	97.638	100.665	103.785	107.002
693287	BALAI BAHASA JAMBI	2	6	6	6	6	25.602	26.396	27.214	28.058	28.927
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	5	6	6	6	6	66.424	68.483	70.606	72.795	75.052
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	2	6	6	6	6	41.628	42.918	44.249	45.621	47.035
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	2	6	6	6	6	26.886	27.719	28.579	29.465	30.378
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5	6	6	6	6	92.450	95.316	98.271	101.317	104.458
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	5	6	6	6	6	92.930	95.811	98.781	101.843	105.000
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	4	6	6	6	6	49.607	51.145	52.730	54.365	56.050
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	7	6	6	6	6	115.797	119.387	123.088	126.903	130.837
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	4	6	6	6	6	39.560	40.786	42.051	43.354	44.698

693296	BALAI BAHASA MALUKU	7	6	6	6	6	106.139	109.429	112.822	116.319	119.925
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	7	6	6	6	6	114.158	117.697	121.346	125.107	128.986
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	5	6	6	6	6	118.639	122.317	126.109	130.018	134.049
JUMLAH		227	207	207	207	207	6.177.872	6.369.386	6.566.837	6.770.409	6.980.292

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*

Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja

Layanan

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	-	1	1	1	1	-	100.000	103.100	106.296	109.591
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	-	1	1	1	1	-	100.000	103.100	106.296	109.591
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	-	1	1	1	1	-	100.000	103.100	106.296	109.591
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	-	1	1	1	1	-	100.000	103.100	106.296	109.591
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693269	BALAI BAHASA BALI	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693274	BALAI BAHASA PAPUA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796

693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693279	BALAI BAHASA RIAU	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693280	BALAI BAHASA ACEH	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693287	BALAI BAHASA JAMBI	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693296	BALAI BAHASA MALUKU	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	-	1	1	1	1	-	50.000	51.550	53.148	54.796
JUMLAH		-	34	34	34	34	-	1.900.000	1.958.900	2.019.626	2.082.234

IKK

Program

Kegiatan

Klasifikasi Rincian *Output*Rincian *Output*

Satuan

3.1.1.1 Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik

138.WA Program Dukungan Manajemen

7613- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

7613.EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal

7613.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Dokumen

Kode	Satker	Volume					Alokasi (ribu)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
693266	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	1	1	1	1	1	475.000	489.725	504.906	520.559	536.696
693270	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	40.590	41.848	43.146	44.483	45.862
693271	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	1	1	1	1	50.000	51.550	53.148	54.796	56.494
693299	PUSAT PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA	-	1	1	1	1	50.000	51.550	53.148	54.796	56.494
693267	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693268	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693269	BALAI BAHASA BALI	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693272	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693273	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693274	BALAI BAHASA PAPUA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693275	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693276	BALAI BAHASA JAWA BARAT	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693277	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693278	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693279	BALAI BAHASA RIAU	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693280	BALAI BAHASA ACEH	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948

693281	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693282	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693283	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693284	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693285	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693286	BALAI BAHASA LAMPUNG	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693287	BALAI BAHASA JAMBI	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693288	BALAI BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693289	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	15.000	15.465	15.944	16.439	16.948
693290	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693291	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693292	BALAI BAHASA BENGKULU	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693293	KANTOR BAHASA BANTEN	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693294	KANTOR BAHASA GORONTALO	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693295	BALAI BAHASA MALUKU UTARA	-	1	1	1	1	-	15.465	15.944	16.439	16.948
693296	BALAI BAHASA MALUKU	-	1	1	1	1	-	15.000	15.465	15.944	16.439
693297	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	-	1	1	1	1	-	15.000	15.465	15.944	16.439
693298	BALAI BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	-	1	1	1	1	-	15.000	15.465	15.944	16.439
JUMLAH		10	34	34	34	34	720.590	1.097.228	1.131.242	1.166.310	1.202.467

E. CASCADING

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Pengampu			
Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Produk Pengayaan Pendukung Literasi	Pusbin			
						Generasi Muda Terbina Program Literasi	Pusbin dan UPT			
						Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan	UPT			
						Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa	Pusbin dan UPT			
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Penutur Bahasa Teruji	Pusbin dan UPT			
						Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun	Pusbin			
						Penutur Bahasa Terbina	UPT			
						Generasi Muda Terbina Program Literasi	Pusbin dan UPT			
						Perhelatan Karya Kreatif Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	Pusbin dan UPT			
						Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Pusbin dan UPT			
						Komunitas Penggerak Literasi Terbina	UPT			
						Komunitas Literasi yang Difasilitasi dan Diapresiasi	Pusbin			
	Komunitas Sastra yang Difasilitasi dan Diapresiasi	Pusbin								
	Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan	Pusbanglin dan UPT								
	Indeks Penginternasionalisasi Bahasa Indonesia	Meningkatnya Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sasta yang Tervalidasi	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sasta yang Tervalidasi	Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa	Pusbanglin			
							Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	UPT		
							Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah yang Difasilitasi dan Diapresiasi (Komunitas dan Perseorangan)	Pusbanglin		
							Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah	UPT		
	Indeks Penginternasionalisasi Bahasa Indonesia	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Pusbanglin dan UPT			
							Perhelatan Karya Kreatif Diplomasi Kebahasaan	Pusdaya		
Bahan fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)							Pusdaya			
Lembaga Terfasilitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)							Pusdaya dan UPT			
Indeks Penginternasionalisasi Bahasa Indonesia	Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional	Meningkatnya Pemanfaatan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan di Lembaga Internasional	Persentase Bahan Kebahasaan dan Kesastraan yang Dimanfaatkan di Forum Internasional	Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pusdaya				
						Sastrawan Berkarya di Mancanegara	Pusdaya			
						Layanan Perkantoran	Seluruh Satker			
						Layanan Sarana Internal	Seluruh Satker			
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Gaji dan Tunjangan	Seluruh Satker			
						Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Seluruh Satker			
						Layanan Sarana Internal	-			
						Layanan Prasarana Internal	Sumut, Sumbar, NTT, dan Riau			
						Layanan Manajemen SDM	-			
						Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Sekretariat			
						Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Sekretariat			
						Layanan Manajemen Keuangan	Seluruh Satker			
			Layanan Reformasi Kinerja	Sekretariat						
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Sekretariat						
			Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat SAKIP minimal A	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat SAKIP minimal A	Layanan BMN	Seluruh satker	
									Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Sekretariat
									Layanan Protokoler	Sekretariat
									Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Seluruh satker
									Layanan Umum	Seluruh satker
									Layanan Data dan Informasi	Sekretariat
Layanan Perkantoran	Sekretariat									
Layanan Perkantoran	Sekretariat									

